



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

HENNY DAMARYANTI

Nim. B4A 000038

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002



UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

HENNY DAMARYANTI
Nim. B4A 000038

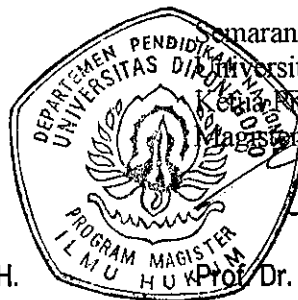
Telah dipertahankan di Depan Dosen Penguji

Pada Tanggal 30 September 2002

Tesis Tersebut Telah Diterima Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Magister
Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing Tesis

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.



Semarang, 30 September 2002

Universitas Diponegoro

Kedua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002



UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :
HENNY DAMARYANTI
Nim. B4A 000038

Kupersembahkan :

Kehadapan Ayahanda dan Ibunda
R. Kasdi Kartosoedibjo (alm & almh),
Suami Ir. Sofian Hadi dan nanda tercinta
Hindryani Ratna Hapsari

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas berkat dan rahmat-Nya jualah penyusunan laporan hasil penelitian (tesis) ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai syarat akhir dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Adapun judul tesis ini adalah: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP."

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pemilihan judul sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian (tesis) ini yaitu:

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing dalam penyusunan tesis yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis.
2. Seluruh tenaga pengajar dan staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Seluruh pimpinan, tenaga pengajar dan staf di lingkungan Universitas Panca Bhakti Pontianak (Kalimantan Barat) dimana penulis mengabdikan diri selama ini.
4. Semua saudara kandung penulis yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam menyelesaikan studi selama ini.
5. Suami Ir. Sofian Hadi yang juga sedang berjuang di Sambas Kalimantan Barat, nanda tercinta Hindryani Ratna Hapsari yang sedang menuntut ilmu di

Yogyakarta, yang selalu memberikan pengertian, motivasi, dorongan dan mendoakan penulis selama studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2000 Kelas SPP Pagi.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Atas berkat bantuan baik spiritual maupun material, bimbingan, dorongan dari beliaulah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga selalu mendapat lindungan dan hidayah dari Allah S.W.T (amin).

Akhir kata penulis mengharap segala kritik dan sahan dari pembaca demi sempurnanya penyusunan tesis ini.

Semarang, September 2002

Penulis,

HENNY DAMARYANTI
NIM : B4A.000038

INTISARI

Korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan fenomena kebijakan legislatif dalam produk perundang-undangan dewasa ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut perundang-undangan yang berlaku saat ini diterapkan dalam kasus TPLH, dan hal-hal yang sepatutnya diformulasikan dalam kebijakan legislatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPLH.

Sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup berikut penerapan dan kendalanya, serta kebijakan legislatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPLH. Oleh karena itu pendekatan utama terhadap masalah ini adalah pendekatan yuridis-normatif, ditunjang dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif.

Dari hasil penelitian, kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku saat ini belum diatur secara lengkap tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi terutama dalam perundang-undangan sektoral. Selama ini ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterapkan terhadap kasus TPLH yang dilakukan korporasi, karena tidak sederhananya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung, dan adanya ketentuan Ps. 50 UUPH maka Ps. 46 dan 47 UUPH tidak dapat berlaku terhadap TPLH di luar UUPH.

Berdasarkan perkembangan dunia internasional, pendapat para sarjana maka secara teoritis korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana (bukan lagi suatu fiksi). Untuk mengatasi kesulitan membuktikan kesalahan korporasi, sudah saatnya doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* diadopsi sebagai pengecualian dan mengalihkan fungsi hukum pidana menjadi upaya yang pertama (*primum remedium*) dalam penegakan hukum lingkungan. Seyogyanya kebijakan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ditindaklanjuti dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional.

Abstract

Corporation as a subject of criminal law is a phenomenon of legislative policy in legislation products, nowadays. Therefore, the writer wants to study about it further by conducting a research about corporation criminal justification to the environment criminal act. The issue which the writer wants to discuss is about determinate of corporation criminal according to the legislation which prevails currently applied in the TPLH case, and the things that should be formulated in the legislative policy about corporation criminal justification in TPLH.

The main target of this research is legislative policy in determining the corporation justification system in the environment legislation together with the application and the obstacle, also the legislative policy about the corporation criminal justification in TPLH. Therefore, the main approach to this issue is normative – juridical approach, supported by empirical-juridical approach. The data that is gained is the analysed qualitatively with explanation analysis descriptively and prescriptive.

From the result of the research , the policy of the corporation criminal justification in the environment legislation which prevails currently has not been arranged completely about who can be justified, when the corporation can be said doing the criminal act, in what case the corporation can be justified and the types of sanctions that can be sentenced to the corporation especially in the sectoral legislation. Until now usually the regulation of corporation criminal justification has not been applied toward TPLH case which is done by the corporation, because of the unsimplicity of the law set and legislation regulation, people professionalisms of the law officers, law consciousness of society, and supporting facility, and the existing regulation Ps. 50 UUPLH therefore TPLH PS 46 and 47 UUPLH an not be prevailed toward TPLH outside the UUPLH.

According to the international world development the scholars' opinion therefore theoretically the corporation is accepted as a subject of criminal law (it is not a fiction anymore). To solve the difficulties of proving the corporation mistake. It is time for strict liability and vicarious liability doctrine is adopted as an exception and shift the criminal law function to be the first effort (primum remedium) in environment law erection. It's better if the policy of corporation criminal justification system is followed-up with operationally regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Hasil Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika/Tahap Pembahasan	20
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Kebijakan Legislatif Di Bidang Lingkungan Hidup	40
C. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	68
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kasus-Kasus TPLH	89

A.a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UUPH	89
A.b. Penerapan Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korporasi Yang Melakukan TPLH	100
B. Kebijakan Legislatif Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam TPLH	126
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan Umum	186
B. Kesimpulan Khusus	188
C. Saran	190
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 1	KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI TERHADAP KORPORASI	99
TABEL 2	SANKSI PIDANA DAN SISTEM ANCAMAN PIDANA DALAM PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Persoalan lingkungan akibat pembangunan dan industrialisasi terlebih lagi pada era perdagangan bebas telah muncul sebagai issue. Issue ini tidak hanya melanda kehidupan negara pernegara, tetapi juga merupakan persoalan internasional (antar bangsa). Bahkan dianggap salah satu issue penting dalam proses globalisasi, yang

merupakan proses saling ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat akibat perkembangan teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern.

Beberapa forum konferensi internasional yang membahas pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup, dapat dikemukakan antara lain :

Konferensi Stockholm yang dilaksanakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 merupakan forum internasional yang membahas persoalan-persoalan penting pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi tersebut merupakan tonggak baru bagi masyarakat internasional yang menghasilkan prinsip-prinsip penting untuk mengatur pembangunan yang berorientasi pada lingkungan.

Konferensi Rio de Janeiro yang merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi yang diadakan dalam rangka pelaksanaan resolusi sidang umum PBB No. 45/211, tanggal 21 Desember 1990 dan keputusan No. 46 tanggal 13 April 1992 dan dikenal dengan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), berhasil mencapai berbagai kesepakatan penting yang kemudian dituangkan dalam berbagai dokumen dan perjanjian internasional. Hasil yang terpenting adalah dikeluarkannya deklarasi Rio de Janeiro tentang *Declaration on Environment and Development* yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya program kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* tahun 1992-1996 menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana sebagai prioritas.¹ Atas dasar hal itu, Kongres

¹ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 21 Februari 1998, hal. 1

ke 9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku yang diselenggarakan di Cairo 29 April 1995 menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama.

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 (TAP MPR Nomor IV Tahun 1999) digariskan bahwa pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi; meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Dengan demikian tidak mengherankan jika dalam pembangunan yang sedang dihadapi sekarang ini berkembang perusahaan-perusahaan atau badan hukum atau korporasi² yang bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi modern maupun industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga yang seluruhnya bergerak di bidang perekonomian.

Lingkungan hidup³ mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang sangat penting. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi, serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus. Di samping itu pembangunan perlu dilaksanakan

² Selanjutnya digunakan istilah "Korporasi". Periksa Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, hal. 20.

³ Lihat Leden Marpaung, 1996, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4-5.

dengan mengindahkan keserasian antara pencapaian sasaran pembangunan sektoral, regional dan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang.

Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama ini interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul gangguan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah tidak serasi atau tidak seimbang lagi. Pada tahap inilah kemudian timbul apa yang disebut dengan permasalahan lingkungan.

Merupakan hal yang umum bahwa masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sering mengabaikan kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Demikian pula halnya dengan korporasi-korporasi yang bergerak di bidang industri di Indonesia, seringkali demi penghematan investasi dan pengurangan biaya produksi justru tidak mempunyai fasilitas pengolah limbah industri, sehingga limbah atau sisa-sisa⁴ dari usaha industri mereka buang secara bebas ke dalam sungai.

Perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioxida dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh

⁴ M.T. Zen, 1981, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107: Sisa-sisa adalah apa saja yang dibuang manusia sebagai yang tidak digunakan lagi seperti, bekas minyak-minyak kotor, udara kotor, air di saluran kota dan sebagainya.

hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat.⁵ Meskipun demikian, sebagian besar negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia tetap mendambakan pembangunan dalam bidang industri guna meningkatkan status serta kesejahteraan bangsa dengan mengacu kepada pembangunan industri yang telah dilaksanakan oleh negara-negara maju lainnya.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu dari sekian banyak sarana yang dapat mengatur serta membatasi manusia dalam melaksanakan segala aktivitasnya adalah norma hukum yang berisi tentang suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), dan kebolehan (*mogen*).

Agar dapat berlaku efektif, maka hukum di dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.⁷ Oleh karena dengan dukungan kekuatan sanksi, hukum mengkoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan bersama yaitu dengan memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya orang bertindak atau diharapkan bertindak.

Seperti telah diketahui bahwa pembangunan industri yang dilakukan oleh korporasi disamping membawa pengaruh positif, juga dapat membawa pengaruh yang negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.⁸ Untuk menjaga supaya pengaruh yang negatif tersebut tidak terjadi atau dapat ditekan seminimal mungkin,

⁵ Emil Salim, 1983, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hal. 3.

⁶ Emil Salim dalam H. Hadi Wuryan, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, IKIP, Semarang, hal. 6 : Ini berarti bahwa kebijaksanaan pembangunan harus memperhitungkan pengaruh tindakan perusahaan kepada lingkungan hidup dan memberikan kemungkinan bagi potensi sumber daya alam dan manusia untuk menumbuhkan diri ke tingkat keseimbangan baru. Lihat pula Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 97.

⁷ Periksa Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 111. Sehingga menurut H.L. Packer dalam Muladi dan Barda Nawawi, A, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 156: "The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and the threats of harm".

⁸ H. Hadi Wuryan, *op cit*, hal. 7

maka digunakan instrumen hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPLH) yang menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.⁹

Dengan adanya ketentuan yang termuat di dalam Pasal 46 UUPLH, maka korporasi yang melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian apabila korporasi melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, yaitu pertama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi, kedua mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu, dan ketiga adalah kedua-duanya.¹⁰

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan di dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut perundang-undangan yang berlaku saat ini diterapkan dalam kasus-kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) ?

⁹ Undang-undang ini merupakan undang-undang payung (*umbrella act*) bagi segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Menurut Hermien Koeswadi, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28 : UU No. 4/1982 ini berfungsi sebagai "*umbrella provisions*", berarti masih diperlukan seperangkat peraturan perundangan lain untuk menunjang keberhasilannya.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal. 100.

2. Hal-hal apa yang sepatutnya diformulasikan dalam kebijakan legislatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPLH?

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dalam penelitian ini, maka permasalahan tersebut di atas perlu dibatasi yaitu :

1. Pertama, penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu kebijakan legislatif dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dengan demikian yang akan diteliti bukan saja UUPH, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain di bidang lingkungan hidup.
2. Kedua, penelitian ini juga dititik beratkan pada putusan pengadilan yang merupakan kebijakan aplikatif dalam mempertanggungjawabkan korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) serta kendala dalam penerapannya.
3. Ketiga, penelitian ini dititik beratkan pada masalah yang menyangkut apakah pertanggungjawaban korporasi di dalam Pasal 46 UUPH juga dapat berlaku untuk semua TPLH yang diatur dalam perundang-undangan lingkungan hidup lain, apakah ketentuan mengenai jenis sanksi dalam UUPH berlaku juga bagi TPLH di luar UUPH, apakah perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pola perumusan sanksi dan sistem pengancaman pidana di dalam perundang-undangan lingkungan hidup lainnya, dan bagaimana sebaiknya pertanggungjawaban korporasi yang melakukan TPLH itu diformulasikan dalam perundang-undangan lingkungan hidup di masa mendatang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian serta beberapa permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai kebijakan legislatif di bidang lingkungan hidup, khususnya tentang formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, serta menjelaskan bagaimana sebaiknya kebijakan tersebut diformulasikan di dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk masa yang akan datang.
2. Untuk mengetahui kebijakan yudikatif dalam mengaplikasikan pertanggungjawaban korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Mengingat banyaknya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis.

Dari segi praktis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup, dan bagi para aparat penegak hukum di dalam rangka mengaplikasikan hukum lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka menunjang usaha melestarikan sumber daya alam.

Manfaat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, serta menambah khasanah kajian di bidang lingkungan hidup.

E. KERANGKA TEORI

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema.¹¹ Sejalan dengan itu maka menurut Sauer ada Trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum (*Unrecht*);
- b. Kesalahan (*Schuld*); dan
- c. Pidana (*Straf*).¹²

Dalam Undang-undang di luar KUHPidana, terdapat tiga persoalan dalam hukum pidana yakni yang menyangkut pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurus seperti manajer maupun direktur korporasi. Ketiga persoalan pokok yang dimaksud adalah¹³ perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana.

Dalam hal menjatuhkan pidana atas tindakan, merupakan tindakan yang diarahkan kepada suatu tujuan. Tujuan (pidana) ini sangat penting, karena yang mengadili juga mengetahui arti dari apa yang dilakukannya itu.

¹¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal. 86.

¹² Sauer dalam Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 62.

¹³ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4

Mempertanggungjawabkan adalah keputusan apa yang dalam keadaan konkret dilakukan terhadap pelaku delik. Dengan demikian pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku delik), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tergantung dari cara/sistem pertanggungjawaban yang diikuti oleh pembuat undang-undang.

Di dalam perkembangan akhir-akhir ini, terutama di dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, korporasi dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara. Dari hasil-hasil penelitian tentang kejahatan korporasi, menunjukkan bahwa pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi dapat digolongkan ke dalam enam jenis¹⁴, yaitu : pelanggaran hukum administratif, pencemaran lingkungan, finansial, perburuhan, manufakturing dan persaingan dagang yang tidak fair.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault Liability or Liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan "*absolute liability*" atau *strict liability*".¹⁵ Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.

Menurut doktrin ini, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens area*).

¹⁴ Clinard, Marshall B. and Peter C. Yeager, 1983, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, hal. 113.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *op cit*, hal. 87.

Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).¹⁶

L.B. Curson mengemukakan, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan :

- a. adalah sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
- b. pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu;
- c. tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹⁷

Sedangkan *vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum terhadap seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹⁸ Pertanggungjawaban ini terjadi misalnya dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Dengan demikian, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Vicarious liability ini oleh Black diartikan sebagai *indirect legal responsibility; for example, the liability of an employer for the acts of an employers, or principal for torts an contracts of an agent*.¹⁹

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1990, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal. 64.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 79 : Persamaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* (unsur kesalahan). Perbedaananya, pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan pada pelakunya, sedang pada *vicarious liability*, pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

¹⁹ Black dalam Hamzah Hatrik, 1996, *op cit*, hal. 115.

Berkenaan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Peter Gillies mengemukakan bahwa korporasi dapat melakukan banyak delik, misalnya : *conspiracy*, *criminal libel*; *contempt of court*; penggelapan pajak; pasar gelap; membantu delik yang menimbulkan kematian akibat berkendara berbahaya (*dangerous driving*). Ada batas-batas delik mana yang dapat dilakukan oleh korporasi. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda, oleh karena itu apabila suatu delik hanya diancam dengan pidana penjara tidaklah mungkin dikenakan kepada korporasi.²⁰ Di Australia, korporasi akan dinyatakan tidak mampu melakukan pembunuhan (*murder*) karena delik ini hanya diancam dengan pidana.

Di Inggris, pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dari korporasi. Korporasi berbuat dengan perantara orang.

Menurut doktrin *vicarious liability*,²¹ seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang (*statutory offences*), dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu

²⁰ Peter Gillies, 1990, *Criminal Law*, terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang, hal. 134.

Barda Nawawi Arief, 1998, *op cit*, hal. 137 : Walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, ada beberapa pengecualian yaitu :

1. dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misal : bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misal : pidana penjara atau pidana mati.

²¹ John C. Coffe. Jr, 1983, *Corporate Criminal Liability*, dalam Sanford H. Kadish : *Encyclopedia of crime and justice* terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang, hal. 130.

kewajiban hukum oleh *occupier* dari pabrik dan atau perbuatan dari pelayan, korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini korporasi hanya bertanggungjawab sejumlah kecil delik, pada dasarnya delik undang-undang yang cukup dengan adanya *strict liability*.

Berbeda dengan Inggris, American Model Penal Code (MPC) menganggap bahwa tujuan dasar dari dipidanya korporasi adalah untuk membangkitkan kehati-hatian managerial dalam mengawasi kepatuhan korporasi pada hukum daripada tujuan memidana atau mencegah korporasi melakukan pelanggaran pada umumnya.

Untuk kejahatan sengaja yang oleh undang-undang untuk memidana korporasi (misal *price-fixing* dan *securities violations*), MPC secara tegas menganut prinsip "*respondeat superior*" dan korporasi bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para agen dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan korporasi.²² MPC membolehkan "pembelaan" : korporasi dapat menghindarkan pertanggungjawaban dengan membuktikan bahwa "*a high managerial agent*" yang mempunyai tanggung jawab pengawasan terhadap pokok masalah yang menjadi perkara, telah melakukan *due diligence* (kehati-hatian yang sepatutnya) untuk mencegah terjadinya delik itu.

Dalam delik-delik *strict liability*, MPC menganggap bahwa pembuat undang-undang bermaksud mempertanggungjawabkan korporasi berdasarkan teori *respondeat superior*, kecuali undang-undang secara tegas menetapkan lain. Oleh karena itu, pembelaan berdasarkan *due diligence* tidak layak digunakan.

²² *Ibid*, hal. 139.

Pertanggungjawaban di atas harus dibedakan dengan pertanggungjawaban berdasarkan teori identifikasi. Konsep ini digambarkan oleh Andrew dengan mengatakan :

*These people are seen not as agent of the company but as its very person, and their guilt of company. It is sometimes called personal liability.*²³

Menurut doktrin identifikasi²⁴, perbuatan dan sikap batin dari orang-orang tertentu yang berhubungan erat dengan korporasi dan pengelolaan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Orang-orang itu dapat disebut sebagai “*senior officer*” dari perusahaan.

Doktrin ini merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Oleh karena itu korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan, sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan. Doktrin identifikasi atau *direct liability doctrine* ini di samping dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi di bidang hukum pidana, pada sisi lain juga dapat membatasi pertanggungjawaban korporasi. Apabila kejahatan dilakukan oleh karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali undang-undang menetapkan dasar pertanggungjawaban yang lain.

Di Inggris, doktrin pertanggungjawaban langsung / *direct liability doctrine* juga menunjuk pada *alter ego / identification doctrine* atau *the primary corporate liability doctrine*. Doktrin ini dapat diatribusikan pada tiga putusan Inggris pada tahun

²³ Andrew dalam Hamzah Hatrik, 1996, *op cit*, hal. 119.

²⁴ Peter Gillies, 1990, *op cit*, hal. 139.

1944. Salah satu diantaranya, kasus D.P.P.V. *Kent abd Sussex Contractors Ltd.* Pengadilan mempertanggungjawabkan korporasi atas delik tentang peraturan pendistribusian/pencatutan bensin yang mensyaratkan bukti adanya unsur “sengaja menipu” (*intent to deceive*).

Mengenai doktrin alter ego ini, MPC mengadopsi/menerima dengan menetapkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukan oleh agen hanya apabila delik itu dilakukan berdasar wewenang yang dibenarkan/disahkan, atau ditolerir (dibiarkan) secara sembrono oleh *the board of directors* atau oleh *a high managerial agent*.

Pada dasarnya segala sanksi pidana dan tindakan dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Di Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment*,²⁵ yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Dalam kerangka langkah-langkah yuridis, sekalipun pada umumnya pendayagunaan hukum perdata dan hukum administrasi merupakan *primum remedium* dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, namun diharapkan dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

²⁵ Muladi, 1998, *op cit*, hal. 18.

1. *The degree of loss to the public.*
2. *The level of complicity by high corporate managers.*
3. *The duration of the violation.*
4. *The frequency of the violation by the corporation.*
5. *Evidence on intent to violate.*
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.*
7. *The degree of notariety engendered by the media.*
8. *Precedent in law.*
9. *The history of serious violation by the corporation.*
10. *Deterrence potential.*
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation.*²⁶

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang tindak pidana dan pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu pendekatan terhadap masalah ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan

²⁶ Clinard and Yeager, dalam Muladi, 2001, *Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa Pasca Sarjana, Undip, Semarang, hal. 21.

pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.²⁷ Dengan pendekatan yang demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pertanggungjawaban sebagai tahap penerapan pidana dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Metode pendekatan dalam rangka peninjauan terhadap kebijakan hukum ini terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yang menurut Sunaryati Hartono²⁸ juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain. Dengan demikian, penelitian ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan-pendekatan yuridis-empiris, pendekatan yuridis-komparatif, dan pendekatan yuridis-historis.

Pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana berikut pertanggungjawabannya di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai sesuatu masalah tertentu.²⁹

Pendekatan yuridis-empiris, historis dan komparatif dipandang perlu untuk pendalaman, di samping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif.³⁰

²⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 61.

²⁸ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indoensia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, hal. 141.

²⁹ *Ibid*, hal. 140.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *op cit*, hal. 62.

Pendekatan yuridis-empiris diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai aplikasi pertanggungjawaban korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang didasarkan pada kebijakan legislatif. Seberapa jauh kebijakan legislatif dapat menunjang tujuan dan mekanisme dalam mempertanggungjawabkan korporasi.

Pendekatan yuridis-komparatif digunakan dalam rangka untuk lebih memahami pertanggungjawaban terhadap korporasi sebagai sanksi di dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis-komparatif dimaksudkan pula untuk melakukan kajian terhadap asas-asas dan norma-norma yang berkaitan dengan upaya dan strategi dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai sanksi hukum pidana, termasuk di dalamnya instrumen-instrumen internasional, yang oleh Muladi dikatakan bahwa, negara-negara anggota PBB tidak dapat dengan begitu saja mengabaikan instrumen-instrumen tersebut, sebab hal ini akan berkaitan erat dengan kesan internasional terhadap negara yang bersangkutan.³¹ Hal ini berarti bahwa keberadaan hukum (pidana) suatu negara juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan internasional.

Di dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis-historis dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan lingkungan hidup, didukung oleh studi yuridis-komparatif sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan pada masa yang akan datang.

2. Metode Pengumpulan Data

³¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 30.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder³², sehingga sesuai dengan metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis-normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang di dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.³³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.³⁴

Pengumpulan Data Empiris

Data empiris dalam penelitian ini juga dikumpulkan dari data primer dan data sekunder.³⁵ Pengumpulan data primer yang berkaitan dengan aplikasi pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan responden hakim sebanyak 2

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

³³ Soerjono Soekanto dan Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, hal. 11-12.

³⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *op cit*, hal. 67.

(dua) orang. Pengumpulan data primer yang berhubungan dengan kebijakan menetapkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa anggota DPR Pusat.

Data empiris yang bersumber pada data sekunder dikumpulkan dari beberapa putusan mengenai TPLH yang telah terjadi.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh suatu pemikiran, bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, melainkan juga berupaya untuk memberikan argumentasi suatu kebijakan yang berkenaan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana di bidang lingkungan hidup itu seharusnya dan sebaiknya ditempuh.³⁶

G. SISTEMATIKA

Berkenaan dengan uraian di atas, selanjutnya pada Bab II Tentang Tinjauan Pustaka akan dibahas konsep dasar guna mencegah perbuatan yang dilarang, khususnya yang berkaitan dengan perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; kebijakan legislatif di bidang lingkungan hidup, serta korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

³⁶ *Ibid*, hal. 68

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian preskriptif adalah apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 10).

Bab III merupakan jawaban dari perumusan masalah yang terdapat dalam Bab I. Bab ini membahas kebijakan legislatif dalam memformulasikan pertanggungjawaban korporasi terhadap TPLH. Selanjutnya bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPLH yang merupakan kebijakan aplikatif beserta kendala penerapannya. Selain itu pada Bab III ini juga akan dibahas kebijakan yang sebaiknya ditempuh dalam memformulasikan pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup untuk masa mendatang.

Bab IV merupakan Penutup, memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dikemukakan saran sesuai dengan permasalahan serta kesimpulan yang diajukan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A.a. Tindak Pidana

Di dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi,¹ perkembangan itu akan diikuti oleh perkembangan lainnya, antara lain di bidang hukum. Perubahan yang terjadi akibat perkembangan itu akan mengakibatkan perubahan nilai. Dalam pengertian yuridis, perubahan nilai menyebabkan perubahan nilai yuridis yang oleh Oemar Seno Adji dijelaskan sebagai berikut:

“Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan ... kriminalisasi perbuatan ... dekriminalisasi.”²

Kriminalisasi³ perbuatan di sini maksudnya adalah suatu proses yang menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana karena belum diatur di dalam undang-undang hukum pidana, kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahkan dapat

¹ Modernisasi diartikan sebagai “proses penyesuaian diri dengan keadaan konstelasi dunia pada waktu ini” (Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal. 27)

² Oemar Seno Adji, 1981, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, hal. 266.

³ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 31 – 32: Dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Lebih lanjut dikatakan oleh Sudarto bahwa dalam hal mengadakan kriminalisasi pembentuk undang-undang harus menyadari daya kemampuan dari hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan (*ibid*, hal. 152).

membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana dan diancam dengan pidana, sehingga perbuatan dimaksud dinyatakan sebagai tindak pidana.

Di dalam hukum pidana dikenal atas *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.” Asas ini dimuat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴ Dengan asas ini diperoleh suatu kepastian hukum, bahwa seseorang dapat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (telah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap kitab undang-undang hukum pidana memuat dua hal yang pokok,⁵ pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-olah negara menyatakan

⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal. 22: Jika diperinci, Pasal 1 ayat (1) berisi dua hal yaitu:

- a. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/ disebutkan dalam peraturan undang-undang,
- b. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 31. Tentang hal ini Muladi mengatakan bahwa dalam konteks hukum pidana material, permasalahan akan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan (Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 50).

Mengenai ketiga masalah ini Packer merumuskannya sebagai “*Offence, guilt and punishment*” (H.L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford California, hal. 17).

kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Sehubungan dengan kriminalisasi suatu perbuatan, Sudarto mengemukakan beberapa kriteria yaitu bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki dengan ukuran bahwa perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban. Selain itu harus pula memperhatikan "*cost benefit principle*", artinya kriminalisasi sesuatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya, jangan sampai aparat penegak hukum "*over belast*" memikul beban yang terlalu berat sehingga peraturan itu tidak efektif lagi.⁶

Berbicara mengenai masalah kebijakan, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana⁷ (*penal policy*) tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan kriminal⁸ (*criminal policy*), yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Mengenai konsep

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, *op cit*, al. 100-101.

Menurut Bassiouni yang dikutip Barda Nawawi Arief (dalam Muladi dan Barda Nawawi. A, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 161-162): Keputusan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada kebijakan yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:

- a. *the proportionality of the means used in relationship to the outcome obtained,*
- b. *the cost analysis of the outcome in relationship to the objectives sought,*
- c. *the appraisal of the objectives sought in relationship to other priorities in the allocation of resources of human power,*
- d. *the social impact of criminalization and decriminalization in terms of its secondary effects.*

⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hal. 28: Kebijakan atau politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel (*ibid*, hal. 23), *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 43.

Menurut G.P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "*a rational total of the responses to crime*" (Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit*, hal.. 163).

rationalitas di bidang politik kriminal, Karl O. Christiansen mengemukakan: "... *the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods.*"⁹

Sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal atau politik kriminal mempunyai tiga pengertian¹⁰ yaitu dalam arti sempit, luas, dan arti yang paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari realisasi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Mengenai tujuan kebijakan kriminal dikemukakan di dalam "*summary report*" dari 34th International Training Course yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo Tahun 1973:

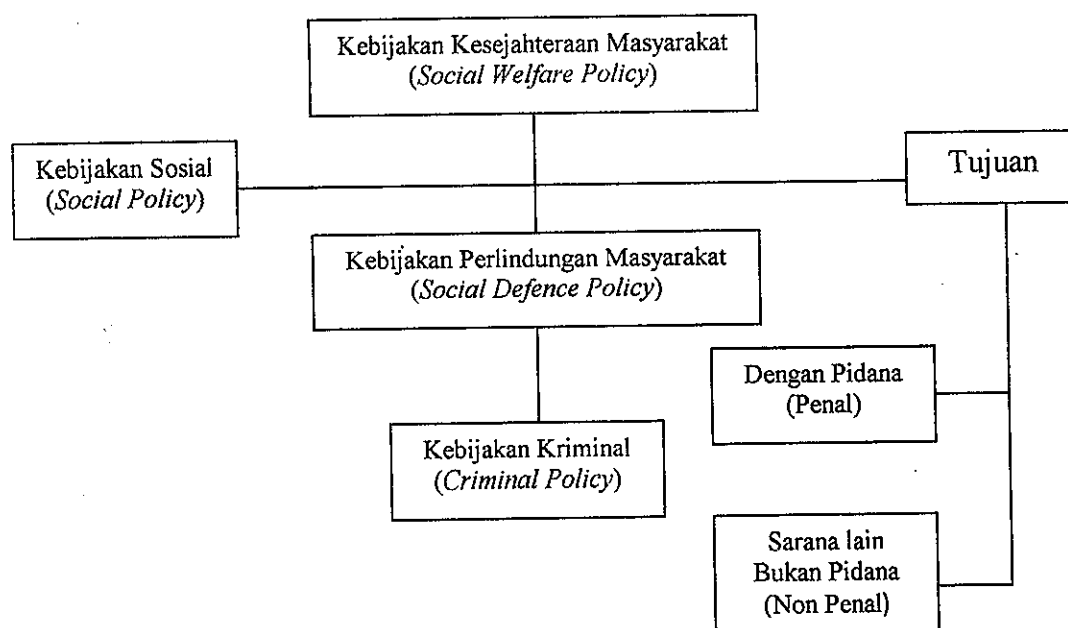
Most of the group members agreed after discution that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, althought not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by term like "happiness of the citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality."¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, op cit, hal. 94.

¹⁰ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 113-114.

¹¹ Summary Report: dari 34th International Training Course, dalam Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 31-32.

Kebijakan kriminal memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan sosial, sebab sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Keterkaitan hubungan itu dapat dilihat pada skema dibawah ini:¹²



Dari skema diatas, tergambar jelas adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial ataupun keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur penal dan non penal dalam upaya mencapai kesejahteraan kehidupan manusia. Dengan demikian keseluruhan kebijakan yang ditempuh di dalam rangka menanggulangi kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op cit, hal. 3.

Mengenai kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), terdapat dua masalah sentral yang menurut Barda Nawawi Arief meliputi masalah penentuan:¹³

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Yang dapat disebut sebagai tindak pidana (delik) adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁴

Menurut ujud atau sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial.¹⁵

Di Inggris, antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dipisahkan dengan pertanggungjawaban (*mens rea*)

¹³ *Ibid*, hal. 32.

¹⁴ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54.

Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundangan pidana dinyatakan sebagai perbuatan terlarang (Roeslan Saleh, 1982, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, hal. 3).

Oleh D. Schaffmeister, *et al*, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 27, dikatakan suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkungan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Oleh Clark Marshall dikatakan: *A crime is any act or omission prohibited by Law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual* (A. Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 89).

¹⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 13.

di lain pihak. Sejalan dengan hal itu, Moeljatno mengatakan¹⁶ tindak pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang) selain melakukan *criminal act*, orang itu harus mempunyai kesalahan.

Pendapat Moeljatno tersebut ternyata telah diikuti oleh Tim Penerjemah KUHP BPHN Departemen Kehakiman, yang menyatakan bahwa¹⁷ "meskipun dipergunakan istilah tindak pidana (*actus reus*), harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana."

Untuk menetapkan sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, merupakan tugas pemerintah dan pembuat undang-undang.¹⁸ Namun tidak berarti semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana dan dapat diberi sanksi pidana. Atau hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan

¹⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, op cit, hal. 57.

¹⁷ Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hal. 114.

Pengertian yang diberikan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional adalah: Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35).

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op cit, hal. 42: untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, dua segi utama dari hukum pidana yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan tindak pidana atau tidak, dan menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, op cit, hal. 5).

tindak pidana.¹⁹ Penentuan ini harus dilakukan dengan rasional dan bijaksana. Selain disesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat, juga dipengaruhi oleh pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu merupakan jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan tersebut.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah salah satu bentuk tindak pidana yang timbul seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Perkembangan di dalam masyarakat dipastikan memberikan pengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kualitas tindak pidana. Sudarto mengatakan,²⁰ dapat dipastikan bahwa kemajuan teknologi mempunyai pengaruh terhadap pola pelaksanaan kejahatan. Cara dilaksanakannya kejahatan lebih "*sophisticated*".

Melihat perkembangan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Kongres ke-6 tentang *Prevention of Crime and The Treatment of offenders* di Caracas tahun 1980 berpendapat bahwa antara pembangunan dan kejahatan terdapat hubungan dengan saling berpengaruh yang melahirkan kriminalisasi sekaligus dekriminalisasi. Oleh karena itu pasal-pasal undang-undang hukum pidana harus diperluas, mencakup tindakan-tindakan disengaja yang merusak kekayaan alam dan kesejahteraan nasional, misalnya pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup.²¹

Pada Kongres ke-7 tahun 1985 yang diselenggarakan di Milano Italia dengan tema Pencegahan Kejahatan untuk Kebebasan, Keadilan, Perdamaian dan Pembangunan, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta perhatian khusus terhadap

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, op cit, hal. 13.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, op cit, hal. 48.

²¹ Kunarto, 1996, *Ikhtisar Implementasi HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta, hal. 23-24.

masalah "industrial crime" khususnya yang berhubungan dengan masalah antara lain eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan (*the exploitation of natural resources and the environment*).²²

Tindak pidana lingkungan hidup (selanjutnya disingkat dengan sebutan TPLH) sering disebut dengan istilah "delik lingkungan" atau "kejahatan lingkungan" (*environmental/ecological crime*), berkaitan erat dan sering merupakan hasil dari kegiatan di bidang bisnis dan industri, sehingga dimasukkan pula sebagai salah satu bentuk dari "crime as business" atau "economic abuses".

Sebagai salah satu bentuk dari *crime as business*, TPLH sering disebut sebagai salah satu bentuk *white-collar crime*. August Bequai di dalam bukunya "*white-collar crime 20th – century crisis*" menyatakan²³: *Crimes against environment constitute a new and expanding area of white-collar crime.*" Pada hakikatnya TPLH berkaitan erat dengan "keseluruhan syarat hidup yang bersifat asasi bagi manusia" (*the totality of mankind's basic natural living conditions*), yang berarti berkaitan erat dengan keseluruhan kondisi struktur sosial (*socio-structural conditions*), maka wajar dikatakan bahwa TPLH merupakan suatu bentuk kejahatan struktural (*structural criminality*).²⁴

²² Kunarto, *Ikhtisar Implementasi HAM Dalam Penegakan Hukum*, *op cit*, hal. 25.
Menurut Sudarto: Karena gejalanya ("*symptom*") sudah jelas, maka kriminalisasi dari perbuatan-perbuatan yang mencemarkan lingkungan hidup itu sudah pada tempatnya (Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *op cit*, hal. 35).

²³ Barda Nawawi Arief, Masalah Hukum, *Majalah FH Undip No. 4-1992*, hal. 21.
Gunther Kaiser dan Isolde Geissler (*ibid*, hal. 21): "*Environmental crime is a special type white-collar crimes.*"

²⁴ *Ibid*, hal. 21

A.b. Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan, pertanggungjawaban jawab dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya).

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, apabila pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian dapat dipidananya seseorang tergantung pada dua hal²⁵, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 31.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, op cit*, hal. 48: Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neoklasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga "*schuldstrafrecht*" (hukum pidana kesalahan), yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada pembuat (*azas nulla poena sine culpa*).

Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dengan "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Maksudnya adalah: sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Dari hal itu diambil suatu ekspresi *actus reus* ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana. *Actus reus* harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya (Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40).

E. Utrecht menyatakan bahwa adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping kelakuan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*), bersalah itu bertanggung jawab pidana.²⁶

Lebih lanjut dikatakan oleh Utrecht, menurut etika tiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tetapi dalam bidang hukum pidana, hanya kelakuan yang dapat menyebabkan hal hakim pidana menjatuhkan hukuman dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.²⁷

Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, ada beberapa pendapat antara lain:²⁸

²⁶ Bachtiar Agus Salim, 1980, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Bandung, hal. 103-104.

Alf Ross (dalam Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 33 mengemukakan pendapatnya sekitar apa yang dimaksud seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya (*on guilt, responsibility, and punishment*).

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, *op cit*, hal. 75.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, *op cit*, hal. 88-89.

- a. Mezger mengatakan: kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana (*Schuld ist der Erbegrieff der Vorraussetungen, die aus der Straftat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*)
- b. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "*Social-ethisch*" dan mengatakan: Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheid rechtsens*)".
- d. Pompe mengatakan: "Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijtbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap pelaku karena telah melakukan tindak pidana (yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan), dan mengandung unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Mengenai kesalahan ini, dahulu orang berpandangan psychologis dalam arti kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psychologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Kemudian pandangan ini ditinggalkan dan orang berpandangan normatif yang menurut Sudarto²⁹, kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap

²⁹ *Ibid*, hal. 90 – 91.

Sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pembedaan itu adalah sistem normatif, demikian dikatakan Alf Ross sebagaimana dikutip Mustofa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, *opcit*, hal. 34.

batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh pembuat. Di dalam pengertian ini sikap batin pembuat ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa pembuat, ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Sejalan dengan hal itu diperoleh suatu penegasan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang, harus dipenuhi beberapa syarat³⁰ yakni:

1. melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. mampu bertanggung jawab;
3. melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaannya; dan
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut hemat penulis, yang penting di dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah pertama, apakah perbuatan seseorang itu telah terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

³⁰ Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, *op cit*, hal. 105.
Sudarto, *Hukum Pidana I*, *op cit*, hal. 44: Untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

undangan tertulis yang berlaku pada saat atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua, apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Mengenai tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, hal ini mengacu kepada setiap peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana di dalamnya, termasuk undang-undang yang ada di luar KUHP.

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia:

- a. mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³¹

Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara syah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana dapat dikenakan secara syah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum tersebut berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, *op cit*, hal. 93.

lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa pembuatnya tidaklah mudah.³²

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan, setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.³³

Konstruksi tersebut berlaku pula dalam hal tindak pidana dilakukan suatu korporasi tanpa spesifikasi atau identitas yang jelas. Kesulitan akan timbul dalam menentukan siapakah pembuatnya, sehingga membawa konsekuensi tentang masalah pertanggungjawabannya.

³² Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit*, hal. 133.

Menurut Mustafa Abdullah, prinsip yang lebih fundamental itu adalah bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut "*moral culpability*". Dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu (Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 22). Sehingga Jerome Hall, *ibid*, hal. 23 mengatakan bahwa yang disebut *moral culpability* itu adalah suatu dasar dari pertanggungan jawab dalam perbuatan pidana. Hall berpendapat bahwa *mens rea* adalah *voluntary doing of morally wrong act forbidden by penal law*.

³³ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit*, hal. 135-136.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi, terdapat sistem-sistem sebagai berikut.³⁴

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi hanyalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan Anggaran Dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang

³⁴ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN, 1985, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, BPHN DepKeh RI, hal. 32-34. Menurut Suprpto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, hal. 83: Korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individu, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Maine menandakan bahwa bukan saja sekarang, korporasi yang berbentuk badan hukum dapat dipidana, melainkan sejak dahulu meskipun dengan nama yang berbeda dan juga dalam sifat serta bentuk dan pengungkapannya, korporasi bilamana dipidana bukanlah suatu hal yang aneh (Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, hal. 33).

yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Mengenai korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu, ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara, maka harus dicari pidana-pidana yang lain sifatnya dengan maksud agar korporasi dapat dipaksa mentaati aturan-aturan hukum.

Semenjak tahun 1976, Belanda menetapkan bahwa juga dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*), suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu dapat dituntut dan dijatuhi pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 51 KUHP Belanda sebagai berikut:³⁵

³⁵ D. Schaffmeister, *et al*, *Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 273.
Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 30:
Tahun 1909 di Amerika menempatkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yaitu putusan "*Supreme Court*" dalam kasus New York Central and Hudson River R.R.V. United States.
Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, hal. 88: Di Inggris "*Companies*" itu bertanggung jawab dalam dua hal ialah secara "*vicarious*" dan di bawah doktrin identifikasi (*Identification doctrine*).

1. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh perorangan dan oleh badan hukum;
2. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, tuntutan pidana dapat dilakukan dan pidana serta tindakan yang tersedia dalam undang-undang dapat dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, atau
 - b. terhadap mereka yang memerintahkan perbuatan serta juga terhadap mereka yang telah secara nyata memimpin lakukan perbuatan yang dilarang tersebut, atau
 - c. terhadap yang disebut dalam butir a dan b sekaligus.

Kegiatan yang dianggap sebagai tindak pidana korporasi, yang menimbulkan keresahan luas dalam masyarakat adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar. Kerugian ini tidak saja yang dapat dihitung dengan uang, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perekonomian yang berlaku. Dua kategori besar dapat diambil sebagai contoh³⁶, yang pertama adalah penipuan terhadap masyarakat (*defrauding the public*), seperti: penentuan harga secara tidak wajar (*fixing prices*) dan berbohong tentang mutu atau khasiat barang (*misrepresenting product*). Sedangkan kategori yang lain adalah membahayakan masyarakat (*endangering the public*), seperti dalam hal pencemaran dan perusakan lingkungan atau membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Semua kegiatan ini harus berhubungan dengan kegiatan perekonomian dan atau berkaitan dengan dunia bisnis.

Berkenaan dengan adanya korporasi yang melakukan TPLH, maka Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional berpendapat bahwa untuk tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, harus dimungkinkan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap:

³⁶ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, hal. 104.

- a. badan hukum sendiri, atau
- b. badan hukum dan pengurusnya, atau
- c. pengurusnya saja.³⁷

Menurut pendapat Muladi³⁸, korporasi dikualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan di samping orang (pengurus), merupakan refleksi mengenai dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

B. KEBIJAKAN LEGISLATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang lebih luas, meliputi dan merupakan perwujudan dari proses kebijakan tiga tahap³⁹ yaitu tahap penetapan kebijakan (tahap formulasi atau legislatif), tahap penerapan kebijakan (tahap aplikasi atau yudikatif), dan tahap pelaksanaan kebijakan (tahap eksekusi).

³⁷ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPH, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, *op cit*, hal. 27 – 28.

³⁸ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.
Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 29 mengutip pendapat A.Z. Abidin: Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

³⁹ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit*, hal. 91.

Marc Ancel menyatakan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu komponen dari "modern criminal science" *Has in fact three essential components: criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, which is the explanation and application of the positive rules whereby society reacts against the phenomenon of crime; finally, penal policy ...*, Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach To Criminal Problem*, Ront Ledge & Kegan Paul, London, hal. 4.

Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, maka tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting, sebab pada tahap inilah dirumuskan konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka tahap penetapan pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.⁴⁰ Pada kesempatan lain, Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.⁴¹

Dengan demikian kebijakan legislatif atau disebut juga sebagai kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, yang dituangkan ke dalam perundang-undangan dan meliputi:

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang,

⁴⁰ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, op cit, hal. 92.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op cit, hal. 257.

- b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya,
- c. perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.⁴²

Berkenaan dengan masalah kebijakan legislatif ini, La-Patra mengemukakan bahwa sebagai bagian dari kebijakan kriminal, "Crime Policy" dikatakan efektif jika mampu mengurangi kejahatan, baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan, maupun mampu melakukan perbaikan terhadap pelakunya.⁴³ Menurut Sahetapy,⁴⁴ timbulnya suatu kejahatan dapat juga berasal dari undang-undang yang kurang baik, dan dapat juga berasal dari pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan dari sikap para penegak hukum itu sendiri.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, Wolf Middendorf mengemukakan bahwa untuk efektifnya peradilan pidana harus memenuhi tiga faktor yang saling berkaitan,⁴⁵ yaitu:

1. Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*);
2. Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan
3. Pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

⁴² Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit*, hal. 198.

⁴³ *Ibid*, hal. 199.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 200.

⁴⁵ *Loc cit*

Menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi: bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial, karena:

- a. *The criminal justice system inflicts suffering.*
- b. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims.*
- c. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system.*
- d. *Criminal justice approach is fundamentally flawed* (Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, hal. 21).

Kebijakan formatif sebagai kebijakan yang paling strategis merupakan proses utama di dalam menentukan ketiga persoalan dasar hukum pidana, khususnya yang menyangkut masalah Pidana yaitu tentang konsep tujuan pemidanaan, untuk mencari dasar pembenaran dari pidana, agar pidana dapat dilaksanakan dengan lebih proporsional.

Kebijakan hukum pidana, merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang integral dengan kebijakan sosial, dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana di dalamnya sekaligus tercakup perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat dan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah ide yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pembukaan yang berisikan tujuan nasional negara Indonesia, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan adalah cara untuk mewujudkannya, dan rencana pembangunan nasional tersusun dalam suatu kebijakan yang dinamakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Adapun kebijakan yang dimaksudkan di dalam penulisan ini adalah kebijakan legislatif, khususnya keputusan memilih alternatif menangani masalah lingkungan hidup⁴⁶ untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

⁴⁶ Adnan Harahap, *et al*, 1997, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta, hal. 28: Fakta pokok yang menjadi masalah global adalah pengembangan teknologi yang sifatnya mencemari lingkungan, mendorong konsumsi kemewahan, dan meraup sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampaknya bagi masa depan.

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Yang dilindungi oleh hukum (pidana) tidak hanya alam, flora dan fauna, tetapi juga masa depan kemanusiaan yang memungkinkan menderita akibat degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu menurut Muladi⁴⁷ muncul istilah *"the environmental laws carry penal sanctions that protect a multitude of interest."*

Kalau dahulu masalah pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan masalah lokal, maka sekarang ini telah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Dengan demikian masalah pengaturannyapun tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi menjadi masalah antar negara bahkan internasional. Hal ini dapat disimpulkan dari Deklarasi Den Haag (*Declaration of the Hague* 1989) yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁸

"Therefore we consider that, faced with of a problem the solution to which has three salient features, namely that it is vital, urgent and global, we are in a situation that calls not only for implementation of existing principles but also for a new approach, through the development of a new principles of international law including new and more effective decision making and enforcement mechanism."

Pembangunan berkelanjutan bukan sekedar konsep belaka, tetapi telah menjadi prinsip dalam hukum internasional. Hal ini dibuktikan dari berbagai

⁴⁷ Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 21 Februari 1998, hal. 14.

⁴⁸ Andi Hamzah, 1997, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, hal. 19. Drupsteen mengemukakan bahwa masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan. Bahwa masalah lingkungan menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan dan perusakan lingkungan (*ibid*, hal. 10).

penerimaan masyarakat internasional yang diekspresikan dalam berbagai pernyataan, baik dalam tataran regional maupun global.

Pada tingkat regional, dalam Konferensi tentang Lingkungan Sumber Daya Alam, dan Saling Ketergantungan antara Utara – Selatan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan dibutuhkan negara-negara utara maupun selatan, dan mensyaratkan agar negara-negara peserta lebih menerapkan gaya hidup yang selaras dengan keterbatasan sumber daya alam.⁴⁹ Deklarasi Beijing tentang Lingkungan dan Pembangunan 1991, menegaskan di dalam prinsip 1 mengenai perlunya pengintegrasian perlindungan lingkungan dengan keharusan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dalam Deklarasi Manila tentang Lingkungan Hidup ASEAN, ditegaskan garis kebijakan untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan dimasukkan dalam pelaksanaan pembangunan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. Sementara itu pertemuan para menteri senior negara-negara Asia Pasifik yang diadakan di Bangkok tahun 1990, mengesahkan laporan *Economic and Social Commission for Asia and The Pacific* (ESCAP) yang menunjuk interaksi lingkungan dan pembangunan.⁵⁰

⁴⁹ Rakhmat Bowo Suharto, 2001, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 77.

Bell, membagi sumbu blok dari sudut "rivalry" yaitu Timur versus Barat, Utara versus Selatan. Dari letak geografisnya, negara-negara dunia ketiga sebagian besar terletak di belahan bumi selatan, sehingga sering disebut negara-negara selatan.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 79.

Menurut Philip Daarden, prinsip-prinsip umum yang dianut pembangunan berkelanjutan meliputi:

- a. *meet basic human needs*;
- b. *reduce injustice and achieve equity*;
- c. *increase self-determination*;
- d. *maintain ecological integrity and diversity*;
- e. *keep option open for future generation*;
- f. *integrate conservation and development* (*ibid*, hal. 77).

Kemudian *World Commission on Environment and Development* (WCED)⁵¹, dalam Deklarasi Tokyo 1987 menyerukan pada semua bangsa di dunia baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam setiap pembangunan mereka. Sementara itu di dalam prinsip 4 The Rio Declaration 1992, ditegaskan: *"In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute as an integral, part of the development process and cannot be considered in isolation from it."*⁵²

Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Kongres ke 9 di Cairo, menyebutkan banyak delik lingkungan saat ini dilakukan oleh industri besar yang ruang lingkup kegiatannya melampaui batas wilayah suatu negara. Untuk mengantisipasi hal ini, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau negara-negara anggotanya untuk menjalin kerja sama di bidang hukum antar negara anggota dan lebih mendayagunakan undang-undang nasional masing-masing negara.⁵³

Dari pertemuan para ahli hukum pidana dan hukum internasional untuk membicarakan penggunaan sanksi pidana bagi perlindungan lingkungan, antara lain

⁵¹ Dikatakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari enam sudut peneropongan, meliputi: keterkaitan (*interdependency*), berkelanjutan (*sustainability*), pemerataan (*equity*), sekuriti dan risiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi serta kerja sama internasional (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 13-14)
WCED ini menghasilkan konsensus, dan dituangkan dalam berbagai dokumen dan perjanjian yaitu: *"The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development, Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest, Agenda 21, The Framework Convention on Climate Change dan The Convention on Biological Diversity"* (*ibid*, hal. 20-31).

⁵² *Ibid*, hal. 548.

⁵³ *Ninth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders*, (Document No. A/CONF.169/L.3), Cairo, egypt, 29 April – 8 May 1995, page 3-4.

menganjurkan bahwa dalam menggunakan hukum pidana terhadap lingkungan.⁵⁴

- a. harus diperhatikan prinsip/asas legalitas;
- b. dimungkinkannya hukum domestik menerapkan asas extraterritorial;
- c. dimungkinkannya "*corporate criminal responsibility*", walaupun ada yang hanya mengakui untuk "*limited circumstances.*"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta kepada para anggotanya untuk:⁵⁵

- a. *To consider enacting environmental protection legislation reflecting the importance of a healthy environment, in order to preserve and protect the environment;*
- b. *To consider enacting penal provisions on the protection of the environment and to consider the protection of endangered species and cultural property under similar provisions;*
- c. *To consider the creation of special bodies in the protection of the environment, such as special prosecutors or specialized investigative bodies, bearing in mind the role such bodies can play in developing skills and raising public awareness;*
- d. *To consider encouraging the inclusions of the role of criminal law in the protection of the environment as a subject in curricula for the study of criminal law and the training of law enforcement and criminal justice personnel.*

⁵⁴ Beberapa hasil *International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment*, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19 – 23 March 1994, disarikan oleh Barda Nawawi Arief, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995, hal. 1.

Th. G. Drupsteen / C.J. Kleijs-Wijn Nobel, 1994, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3: Masalah lingkungan membutuhkan penyelesaian melalui kebijakan internasional dan nasional yang di dalamnya terkandung soal penciptaan dan pelaksanaan aturan hukum. Peraturan hukum itu pada prinsipnya berada di bidang publik karena harus mendasari dan menjadi sarana untuk mewujudkan berbagai kebijakan lingkungan, baik yang ada di latar nasional maupun internasional.

⁵⁵ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, *op cit*, hal. 2 – 3.

Hal-hal tersebut di atas didasarkan pada satu alasan bahwa persoalan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat (*the right to healthy environment*), merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diatur di dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948, kemudian ditegaskan kembali di dalam Deklarasi Stockholm (*United Nation Conference on the Environment*) tahun 1972, dan penegasan secara global terjadi di dalam *The United Nation Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro tahun 1992.

Latar belakang lain yang dapat dikemukakan disini adalah apa yang tercantum di dalam *Guiding principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*, yang menegaskan bahwa:

*"In view of the characteristics of contemporary, post industrial society and the role played by growing industrialization, technology and scientific progress, special protection against criminal negligence should be ensured in matters pertaining to public health, labour conditions, the exploitation of natural resources and the environment and the provision of goods and services to consumers."*⁵⁶

Selanjutnya *The council of Europe Resolution* juga menegaskan perlunya kontribusi hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup. Demikian pula *United Nation General Assembly Resolution* No. 45/121 tahun 1990 yang menerima Resolusi tentang perlindungan lingkungan hidup dengan hukum

⁵⁶ *Ibid*, hal. 4 – 5.

pidana yang diajukan oleh *the Eight UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.⁵⁷

Lebih lanjut rekomendasi dari *the AIDP Preparatory Colloquium on the Application of Criminal Law to Crime Against the Environment* yang diselenggarakan di Ottawa, Canada (2 – 6 November 1992) menegaskan perlunya dipertimbangkan penggunaan hukum pidana untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Pada bulan Maret 1994, di Portland, Oregon, USA, telah diselenggarakan *International Meeting of Experts on Environmental Crime*, khususnya membicarakan *The Use of Criminal Sanction in the Protection of the Environment; internationally, domestically and Regionally*, yang menghasilkan *The Portland draft*.⁵⁸

Perkembangan internasional di atas selalu menyadarkan setiap bangsa, bahwa dalam membicarakan muatan-muatan hukum pidana nasional harus mempertimbangkan elemen-elemen: (1) cita-cita nasional sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Ideologi Bangsa; (2) kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, dan (3) kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

⁵⁷ *Loc cit*

Dalam rangka perlindungan lingkungan ini Yannacone, sebagaimana dipetik oleh Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 327 menyatakan: "Equity also furnishes us with the simplest method of environmental protection, saying to the courts of the land, let no wrong be without a remedy."

Menurut Mas Achmad Santosa, 1997, *HAM dan Lingkungan Hidup*, Seminar Tentang Lingkungan Hidup dan HAM, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal. 4: Kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya mutu lingkungan yang pada gilirannya mengancam hidup manusia. Kemerosotan mutu lingkungan mengancam hak hidup manusia (*right to life*).

⁵⁸ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No.23 Tahun 1997*, *op cit*, hal. 6.

Dalam skala nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences/ordnungswidrigkeiten*) yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut.⁵⁹ Dalam hal ini fungsi perumusan hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administrative untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan tergantung pada hukum lain.

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat, ialah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hal. 18 – 19.

Sejak tahun 1902 "*public welfare offences*" ini oleh James Goldschmidt (sarjana Jerman) disebut sebagai "*administrative penal law*" atau "*verwaltungsstrafrecht*" (Hermin Hadiati Koeswaji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 74).

Oleh Rusli Effendi dikatakan bahwa hal yang langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia, misalnya terganggunya kesehatan karena pencemaran atau keracunan, rusaknya usaha karena erosi dan banjir. Sedang hal yang tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia misalnya merosotnya produktivitas dan difersivitas, akselerasi proses karena eksploitasi dan sebagainya (Rusli Effendi, *et al*, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *op cit*, hal. 67).

⁶⁰ Dikatakan oleh Andi Hamzah: Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi, yang pertama ialah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, yang menghimbau bahkan bila perlu memaksa anggota masyarakat memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua adalah suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan (Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, *op cit*, hal. 10 – 11).

Soedjono, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, hal. 29: Bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan lingkungan hidup beserta segala isinya, merupakan tindakan pengamanan hukum, yang sangat diperlukan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi, melestarikan dan membangun lingkungan hidup, serta perlindungan kehidupan manusia dari kemungkinan gangguan kerusakan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan hukum pidana yang hendak dicapai terhadap TPLH adalah *pertama*, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang dan *kedua*, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Mengingat betapa pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan baik, kedudukannya sebagai tindak pidana ekonomi serta kompleksitas kepentingan yang dilindungi baik yang bersifat antroposentris maupun ekosentris, maka ketentuan khusus (*specific crimes*) perlu dilengkapi dengan tindak pidana lingkungan yang bersifat umum dan mandiri terlepas dari hukum lain, yang dinamakan *generic crimes* atau *core crimes*).⁶¹ Lebih lanjut dikatakan oleh Muladi bahwa dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi.⁶²

⁶¹ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, *op cit*, hal. 19.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pakar internasional mengemukakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan harus ditempuh secara gabungan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi (*ibid*, hal. 1).

M.G. Faure, 1994, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*, *op cit*, hal. 31: Suatu perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana lingkungan agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana membutuhkan pengaturan lebih lanjut di dalam hukum administratif. Hal ini dikarenakan dalam rumusan tindak pidana, suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan suatu persyaratan administratif (misalnya pemberian ijin), dinyatakan sebagai tindak pidana.

⁶² *Loc cit*

Hukum lingkungan yang ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-undang lingkungan hidup, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Undang-undang tersebut bersifat pokok sehingga dikenal sebagai ketentuan hukum yang memayungi ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan (*umbrella act*). Dengan demikian undang-undang tersebut menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada maupun yang akan diadakan.

Secara garis besar, kebijakan legislatif mengenai lingkungan hidup di Indonesia dapat dibagi atas dua macam garis kebijakan. *Pertama*, dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan *kedua* yang terdapat di dalam undang-undang sektoral bidang lingkungan dan tersebar pada beberapa ketentuan sektoral. Atas dasar hal itu, maka perbuatan yang dapat disebut sebagai perbuatan pencemaran maupun perusakan lingkungan, tidak hanya berupa perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 saja, tetapi dapat pula berupa perbuatan melanggar undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai kebijakan legislatif lebih ditekankan pada undang-undang lingkungan hidup yang berlaku setelah tahun 1982, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPH)

Mengenai TPLH dalam undang-undang ini diatur pada beberapa pasal, yaitu Pasal 41 – 44 yo. Pasal 1 angka 12 dan 14. Dari rumusan pasal-pasal tersebut, maka perbuatan yang dianggap sebagai TPLH⁶³ adalah:

1.1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup

Mengenai perbuatan pencemaran lingkungan, Pasal 1 angka 12 merumuskan sebagai berikut:

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Dengan demikian pasal ini memuat unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan hidup:

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia;
- b. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

⁶³ Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, op cit, hal. 39.

Menurut Arief Hidayat, et al, 1998, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Undip, Semarang hal. 53: UUPH ini membedakan dua jenis TPLH, pertama TPLH bersifat mandiri yang pelakunya memang beritikad jahat dan merupakan tindak pidana materiil dimana unsur kausalitas harus dibuktikan. Kedua adalah TPLH yang terkait dengan ijin yang terjadi dengan terlebih dahulu melanggar ketentuan dalam ijin usaha dan atau kegiatan serta termasuk tindak pidana formil sehingga unsur kausalitas tidak perlu dibuktikan.

1.2. Perbuatan perusakan lingkungan hidup

UUPLH merumuskan perbuatan perusakan lingkungan ini di dalam Pasal 1 angka 14, yang berbunyi:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Unsur-unsur perusakan lingkungan hidup yang terkandung di dalam pasal ini adalah:

- a. adanya tindakan;
- b. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan;
- c. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini adalah sesuai Pasal 50 UUPLH yang berbunyi:

“Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.”

Atas dasar Pasal 50 ini, maka peraturan perundang-undangan lain yang mengatur lingkungan hidup meliputi peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dan masih berlaku, serta peraturan yang ada setelah kemerdekaan.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kualifikasi TPLH yang diatur dalam UUPLH terlihat dari rumusan **Pasal 41 ayat (1)** yaitu "...secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup ..."

Jadi ada dua jenis TPLH dalam perumusan pasal di atas, yaitu:

- a. pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja;
- b. perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

TPLH dalam Pasal 41 ayat (1) ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun **dan** denda paling banyak 500 juta rupiah. Menurut ayat (2), ancaman pidana diperberat menjadi 15 tahun penjara **dan** denda 750 juta rupiah apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Kemudian **Pasal 42 ayat (1)** menegaskan sebagai berikut:

"... karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup ..."

TPLH dalam Pasal 42 ayat (1) di atas merupakan tindak pidana karena kealpaan dan diancam pidana penjara paling lama 3 tahun **dan** denda 100 juta rupiah yang

dapat diperberat di dalam ayat (2) menjadi 5 tahun penjara **dan** denda 150 juta rupiah apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Di dalam **Pasal 43 ayat (1)**, dirumuskan unsur-unsur dari TPLH sebagai berikut:

- a.1. melepaskan atau membuat zat/energi/komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, udara atau air permukaan;
2. melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut;
3. menjalankan instalasi yang berbahaya.

b. perbuatan tersebut pada point a dilakukan dengan:

1. melanggar perundang-undangan yang berlaku;
2. sengaja;
3. mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam **ayat (2)**nya adalah sebagai berikut:

- a. sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum nyawa orang lain.

Ancaman untuk TPLH dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) di atas adalah sama, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun **dan** denda 300 juta rupiah. Ancaman ini dapat diperberat menurut ayat (3) yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun **dan** paling banyak 450 juta rupiah, apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Pasal 44 merupakan TPLH karena kealpaan terhadap delik yang dirumuskan dalam Pasal 43. Adapun ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 3 tahun **dan** denda paling banyak 100 juta rupiah (ayat 1), dan di dalam ayat (2) dapat diperberat menjadi pidana penjara 5 tahun **dan** denda 150 juta rupiah, apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 48 UUPH, maka semua TPLH menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dikualifikasikan sebagai “kejahatan”. Satu hal yang menarik dari undang-undang ini adalah, dimasukkannya pasal khusus mengenai “pertanggungjawaban terhadap badan hukum (korporasi), perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lainnya” yang diatur dalam Pasal 45 dan 46. Menurut **Pasal 45**, apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan sebagainya, maka ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga, sedangkan **Pasal 46** pada intinya mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila TPLH dilakukan oleh korporasi.

Hal menarik yang juga diatur oleh undang-undang ini adalah adanya bentuk sanksi berupa “tindakan tata tertib” dalam **Pasal 47**, berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
- b. penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian); dan/atau

- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

2.1. Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan denda maksimum 250 juta rupiah barang siapa melanggar:

- a. Pasal 5 ayat (1) mengenai kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di ZEEI tanpa izin;
- b. Pasal 6, yaitu membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi atau bangunan lain di ZEEI tanpa izin;
- c. Pasal 7, yaitu melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI tanpa persetujuan Pemerintah RI.

2.2. Pasal 16 ayat (3), mereka yang sengaja melakukan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan di dalam ZEEI diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

2.3. Pasal 17, mereka yang merusak/memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana menurut Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan denda maksimum 75 juta rupiah.

2.4. Menurut Pasal 18, tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 dinyatakan sebagai "kejahatan."

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 24 – 28, sebagai berikut:

- 3.1. **Pasal 24 ayat (1)**, dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dengan pidana tambahan pencabutan Ijin Usaha Industri (IUI), barang siapa melanggar:
 - a. Pasal 13 ayat (1): mendirikan perusahaan industri baru atau perluasan tanpa memperoleh IUI.
 - b. Pasal 14 ayat (1): tidak menyampaikan informasi industri secara berkala (mengenai kegiatan dan hasil produksinya) kepada Pemerintah.
- 3.2. **Pasal 24 ayat (2)**, apabila tindak pidana dalam Pasal 24 ayat (1) di atas dilakukan karena kelalaian/kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum 1 juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI.
- 3.3. **Pasal 25**, dipidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum 10 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan disain industri.
- 3.4. **Pasal 26**, dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19 (yaitu melanggar ketentuan pemerintah mengenai standart bahan baku barang hasil industri).

3.5. **Pasal 27 ayat (1)**, diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1). Menurut Pasal 21 ayat (1), perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

3.6. **Pasal 27 ayat (2)**, tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) di atas dipidana dengan pidana kurungan maksimum satu tahun dan/atau denda maksimum satu juta rupiah, apabila dilakukan karena kelalaian.

3.7. **Pasal 28 ayat (1)**, tindak pidana dalam Pasal 24 ayat (1), 25, 26 dan 27 ayat (1) merupakan “kejahatan”, sedangkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dan 27 ayat (2) merupakan “pelanggaran.”

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

4.1. **Pasal 24**, dipidana dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa melanggar Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).

a. Pasal 6 ayat (1) adalah larangan bagi orang/korporasi untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

b. Pasal 7 ayat (1) adalah larangan bagi orang/korporasi untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

- 4.2. **Pasal 25**, larangan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (baik orang maupun korporasi), dipidana:
- a. pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 50 juta rupiah, apabila menggunakan kapal bermotor 30 gros atau lebih;
 - b. pidana penjara maksimum 2 tahun 6 bulan atau denda maksimum 25 juta rupiah, apabila menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 gros ton.
- 4.3. **Pasal 26**, ancaman pidana bagi orang/korporasi yang melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda 5 juta rupiah.
- 4.4. **Pasal 27 ayat (1)**, ancaman pidana denda maksimum 25 juta rupiah terhadap barangsiapa melanggar Pasal 4 (melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang tidak memenuhi ketentuan Menteri).
- 4.5. **Pasal 27 ayat (2)**, ancaman pidana denda maksimum 5 juta kepada barangsiapa melanggar Pasal 20 (melanggar ketetapan Menteri mengenai larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu).
- 4.6. **Pasal 28 ayat (1)**, tindak pidana dalam Pasal 24 dan 25 di atas merupakan “kejahatan”, sedangkan tindak pidana dalam Pasal 26 dan 27 adalah “pelanggaran.”

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi Hayati)

Perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 40 sebagai berikut:

5.1. **Ayat (1)**, sengaja melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 200 juta rupiah.

a. Pasal 19 ayat (1) merupakan larangan bagi setiap orang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

b. Pasal 33 ayat (1) merupakan larangan bagi setiap orang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional

5.2. **Ayat (2)**, sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3) diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah.

5.2.1. Pasal 21 ayat (1), larangan bagi setiap orang untuk:

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

5.2.2. Pasal 21 ayat (2), larangan bagi setiap orang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

5.2.3. Pasal 33 ayat (3), larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Menurut Pasal 29 ayat (1), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA) merupakan “kawasan pelestarian alam” (KPA).

Adapun fungsi KPA menurut pasal 30 adalah:

- c. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- d. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;

- e. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan TN yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata; dan yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya.

- 5.3. **Ayat (3)**, apabila ketentuan ayat (1) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 50 juta rupiah.
- 5.4. **Ayat (4)**, apabila ketentuan ayat (2) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah.
- 5.5. **Ayat (5)**, tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) adalah “kejahatan”, dan tindak pidana dalam ayat (3) dan (4) adalah “pelanggaran”.

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Perbuatan yang dapat dipidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 26 – 29 sebagai berikut:

- 6.1. **Pasal 26**, mengancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun penjara dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah terhadap barangsiapa dengan sengaja:

merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/ atau warna, memugar atau memisahkan benda cagar budaya tanpa ijin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Dalam Pasal 15 ayat (1) ditegaskan: “Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.”

- 6.2. **Pasal 27**, mengancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum 50 juta rupiah, terhadap barangsiapa dengan sengaja:

melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa ijin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 12 ayat (1) menegaskan: “Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa ijin dari Pemerintah.”

- 6.3. **Pasal 28**, mengancam dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan/atau denda maksimum 10 juta rupiah, terhadap barangsiapa dengan sengaja:

- a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

- b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara menggandakan tidak seijin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

6.4. **Pasal 29**, tindak pidana dalam Pasal 26 dan 27 adalah “kejahatan”, dan tindak pidana dalam Pasal 28 adalah “pelanggaran.”

7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Di dalam undang-undang ini, tindak pidana yang berhubungan dengan masalah lingkungan dapat diketahui dalam perumusan pasal-pasal sebagai berikut:

7.1. **Pasal 119 ayat (1)**, mengancam dengan pidana maksimum 5 tahun penjara atau denda 120 juta rupiah, kepada barangsiapa melakukan:

Pembuangan limbah atau bahan lain dari kapal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Di dalam Pasal 65 ayat (1) tersebut dinyatakan: “setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

7.2. **Pasal 119 ayat (2)**, mengancam dengan pidana maksimum 10 tahun penjara atau denda 240 juta rupiah, apabila tindak pidana dalam ayat (1) di atas

mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup.

- 7.3. **Pasal 120**, mengancam dengan pidana maksimum 2 tahun penjara atau denda 48 juta rupiah terhadap:

nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

Pasal 67 ayat (1) dimaksud menegaskan: "Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapalnya"

- 7.4. **Pasal 129**, menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2), dan 120 adalah "kejahatan."

Sangat melegakan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kini tengah dibicarakan⁶⁴, juga telah merumuskan beberapa pasal yang berkenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

1. **Pasal 327 ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun bagi setiap orang yang memasukkan sesuatu ke dalam sumur, pompa air, mata air, kelengkapan air minum umum atau yang dipakai bersama-sama orang lain, sehingga air tersebut membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain.
2. **Pasal 328 ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Kategori IV, apabila tindak pidana tersebut Pasal 327 ayat (1) dilakukan karena kelalaian.

⁶⁴ Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menurut ayat (2), pidana dapat diperberat menjadi pidana penjara 5 tahun atau denda Kategori IV.

3. **Pasal 329 ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun bagi setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan bahan ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, sedangkan diketahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan itu akan membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Menurut ayat (2), pidana dapat diperberat menjadi pidana penjara 15 tahun, apabila tindak pidana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kematian.

4. **Pasal 330 ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Kategori IV, apabila tindak pidana tersebut Pasal 329 ayat (1) dilakukan karena kelalain.

Menurut ayat (2), pidana dapat diperberat menjadi pidana penjara 15 tahun atau denda Kategori IV.

C. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dijatuhkan pidana.⁶⁵ Dengan demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP telah mulai menyimpang dari asas umum yang berlaku dalam KUHP

⁶⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, op cit, hal. 91.

selama ini. A. Pohan⁶⁶, menguraikan penyimpangan-penyimpangan itu sebagai berikut:

- a. korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi (Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan);
- b. variasi dari (a) pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada “mereka yang memberikan perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu);
- c. variasi yang lain dengan merumuskan lebih rinci mereka yang harus bertanggung jawab, yaitu: pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan bersangkutan (Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal); dan
- d. korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika).

⁶⁶ A. Pohan dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, *op cit*, hal. 70.
Periksa Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *op cit*, hal. 117 – 118.

Berkenaan dengan diakuinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka A.L.J. Van Strien mengilustrasikan tiga teori dasar yaitu:

1. Ajaran yang bertendensi “psikologis” dari Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk zedelijk wezen*).
2. Pendekatan yang bertendensi “sosiologis” dari Ter Heide, dimana yang menjadi pokok perhatian bukan manusia tetapi tindakan (Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepas dari manusia – *ontmenselijk strafrecht*).
3. Wawasan dari A.C.’t Hart, dimana pengertian subjek hukum dipandang sebagai pengertian yuridis yang “*contrafaktisch*.”⁶⁷

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sudah tentu timbul konsekwensi khusus tentang pertanggungjawaban pidananya. Apakah kesalahan yang terdapat pada korporasi sebagai konsekwensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi. Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan yaitu bagaimana mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi, dan apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian?

⁶⁷ A.L.J. Van Strien, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*, *op cit*, hal. 229 – 230.

Disini ‘t Hart menyatakan bahwa “Contrafaktitas” hukum berarti bahwa konsep-konsep yuridis tidak boleh dimengerti semata-mata sebagai kenyataan empiris maupun sebagai gagasan ideal yang secara a priori menetapkan suatu norma yang berada diatas kenyataan historis sosiologis. Karena konsep yuridis ini menempati posisi perantara, maka ia tidak dapat dipandang sebagai bagian dari kedua pengertian itu, namun condong sebagai lawan dari keduanya. Bukan saja dalam posisi terisolasi, namun terlebih dalam saling keterkaitannya menurut struktur pengertian dan logikanya sendiri – konsep yuridis, dengan demikian, terhadap berbagai cara interpretasi lain. Dengan cara ini, konsep yuridis memberikan pada individu ruang gerak untuk membela diri atau menentang tidak saja individu lain yang berada dalam wawasan hidup/kenyataan yang berlaku secara dominan tetapi juga terhadap wawasan/pandangan hidup/tentang kenyataan itu sendiri.

Apabila memilih cara pendekatan atas hukum pidana yang bersifat “psikologis” sebagaimana dikemukakan oleh Remmelink, maka hampir tidak mungkin dapat dirumuskan aturan-aturan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menggariskan batas-batas penetapan korporasi sebagai pelaku. Hal ini dikarenakan dengan pendekatan ini persoalan dapat atau tidaknya korporasi dipidana tidak mungkin ditempatkan dalam rangka dogmatika hukum pidana yang berlaku. Terlebih lagi dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah bahwa hukum pidana merupakan soal “kesalahan dan hukuman”, dimana pidana yang dijatuhkan didasarkan pada tindak mempersalahkan secara etis yang harus dibebankan kepada tersangka. Lebih jauh lagi, dalam penjatuhan pidana, peranan kehendak manusia juga memainkan peranan penting. Berkaitan bahwa pembedaan harus didasarkan pada unsur kehendak manusia, menimbulkan masalah jika yang harus dipidana adalah korporasi. Dalam hubungannya dengan hal ini, Remmelink mengemukakan:⁶⁸

“...saya mengalami kesulitan dalam menghadapi soal penetapan dapat dipidananya korporasi di dalam hukum pidana komunal. Saya memandang hukum pidana, bagaimanapun mampu melayani kepentingan masyarakat, terlalu terjalin erat dengan hukum dan karena itu suatu makhluk yang tidak memiliki akal dan hati nurani ..., sehingga tidak dapat dinyatakan bersalah atau dikenakan penghukuman, tidak mungkin dapat memainkan peranan utama di dalamnya.”

Berbeda dengan Remmelink, di dalam karya tulisnya “*Vrijheid, over de zin van de straf*” Ter Heide menyatakan bahwa terdapat suatu kecenderungan dimana

⁶⁸ *Ibid*, hal. 236.

hukum pidana semakin lama semakin dilepaskan dari konteks manusia.⁶⁹ Menurut Ter Heide, yang menjadi pokok soal dari hukum pidana adalah “tindakan”, hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa semakin lama orang semakin condong pada pendekatan fungsional terhadap hukum pidana, dimana yang menjadi pusat perhatian adalah makna sosial dan normatif dari suatu tindakan. Alasan untuk memperlakukan korporasi juga mampu untuk turut berperan serta dalam mengubah situasi kemasyarakatan, yang mengimplikasikan bahwa korporasi dapat dinyatakan bersalah. Atas dasar hal ini, Ter Heide menarik suatu kesimpulan “apabila hukum pidana dilepaskan dari konteks manusia, hal itu mengimplikasikan dapat dipidanya korporasi.”

Selanjutnya ‘t Hart mengemukakan bahwa hukum pidana harus dilihat sebagai suatu bentuk penyaluran pengejawantahan kekuasaan, yang dikarakteristikan oleh aspek-aspek instrumen tujuan rasional dan aspek-aspek pembatas kekuasaan yang kritis, dimana satu dengan yang lain saling terkait dengan erat.⁷⁰ Pandangan yang diberikan oleh ‘t Hart adalah, tidak menutup kemungkinan ditematkannya pembedaan korporasi di dalam sistem hukum pidana. Oleh ‘t Hart, manusia di dalam hukum pidana diartikan sebagai “keberadaan yuridis” dari manusia sebagai subjek hukum, yang menurutnya akan memberikan ruang cukup untuk juga

⁶⁹ *Ibid*, hal. 237.

Ter Heide menyatakan (*ibid*, hal. 241): Di dalam bahasa, korporasi muncul sebagai suatu kesatuan yang dikenal dari etiket sosialnya, yakni nama dengan mana ia diminta pertanggungjawaban, dituntut dalam sidang-sidang peradilan dan juga dinyatakan dapat dipersalahkan. Dilihat dari sudut pandang penamaan, bahkan “manusia” juga hanya merupakan subjek hukum. Dari sudut pandang kedudukan sosial, tidak ditemukan perbedaan mendasar antara keduanya. Karena itu juga dari sudut pandang yuridis tidak perlu ada perbedaan antara “manusia” dan “korporasi.”

⁷⁰ *Ibid*, hal. 238 – 239.

menerima konstruksi person lain selain manusia sebagai subjek hukum di dalam hukum pidana.

Bilamana membandingkan pendekatan-pendekatan Remmelink, Ter Heide dan 't Hart, maka pada pandangan pertama nampak bahwa perbedaan terbesar ada diantara hukum pidana yang "manusiawi" dari Remmelink dengan hukum pidana "yang terlepas dari konteks manusiawi" dari Ter Heide. Persamaan kedua teori ini adalah, masing-masing berpretensi bahwa pendekatan yang dikembangkannya didasarkan pada kenyataan kemasyarakatan. Perbedaannya, pengertian hukum pidana seperti pelaku tindak pidana dalam pandangan Ter Heide telah dilepas dari konteks yuridis. Sebaliknya 't Hart, menolak dengan keras cara pencerminan demikian. Menurutnya dalam pandangan tersebut karakter konstruktif – interpretatif pengertian hukum telah diabaikan, dalam arti tidak diberikan alternatif bagi pandangan-pandangan lain tentang kenyataan. Melalui pendekatan yang dikemukakan oleh 't Hart, masih tersedia ruang bagi alternatif pandangan yang berbeda.⁷¹

Menurut Schaffmeister,⁷² sangat sulit untuk menentukan kapan suatu korporasi terdapat apa yang disebut dengan kesengajaan. Kesengajaan pada korporasi pertama-tama berada, apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan, atau berada dalam keadaan yang nyata dari suatu perusahaan.

⁷¹ *Ibid*, hal. 242.

⁷² Schaffmeister dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 102.

Sudjono D, 1994, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 71: "Sukar kiranya untuk membuktikan adanya "mensrea" atau niat yang jahat dalam delik bisnis, kendatipun bukti catatan-catatan dengan mudah dapat memperlihatkan tindak tanduk yang salah karena ia berada dalam organisasi dan tetap akan dekat dengan skenario delik, ia memperoleh sedikit peluang untuk menentang agar tidak diekspos.

Pada kesempatan yang lain, Schaffmeister mengemukakan bahwa, kesalahan dan kesengajaan dapat timbul dalam kerja sama secara sadar atau tidak sadar oleh mereka yang menjalankan aktivitas korporasi.⁷³ Sementara itu Hulsman mengatakan bahwa peristiwa seperti itu, harus ada keterkaitan tertentu antara tindakan orang-orang itu. Sedangkan Bemmelen dan Remmelink, menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari tiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.⁷⁴

Hal senada dikemukakan pula oleh Suprpto dengan menyatakan jika memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang dengan melalui alat-alatnya, maka dapat dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan apabila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individuil, karena hal itu

⁷³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, *op cit*, hal. 94.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mulai (*ibid*, hal. 93) mengemukakan pendapat bahwa untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan, dapat dilakukan dengan cara melihat, apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekenings constructie*), kesengajaan perorangan (*naturlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

⁷⁴ Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung, hal. 237.

Roeslan Saleh mengemukakan: Tidak semua ketentuan-ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hanya ketentuan-ketentuan khusus yang dinyatakan sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh korporasi (*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, *op cit*, hal. 13).

mengenai badan sebagai suatu kolektivitet, dapat kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dibebankan kepada pengurusnya.⁷⁵

Sedangkan dalam hal kelalaian, Schaffmeister menganggap bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan, dengan catatan bahwa melalui cara memenuhi tugas pemeliharaan, kelalaian lebih banyak dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi.⁷⁶

Dalam ruang lingkup permasalahan diatas, Lawrence W. Sherman menyatakan, cara menentukan perbuatan korporasi yang akan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana:

"It is important to distinguish deviance committed by organizations from deviance committed in organization. Deviance committed by an organization is collective rule-breaking action that helps achieve organization is individual or collective rule-breaking action that does not help to achieve organizational goals or that is harmful to those goals. Sexual exploitation of secretaries, for example is a deviant action committed in context of organizational power hierarchies, but it neither benefits nor directly harms the goals of most organizations."

The distinction between deviance by and in organization depends upon the currently operative goals of an organizations, which can be defines for analytic purposes as the goals imposed by these who run the organization."⁷⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Steven Box mengemukakan lima faktor yang sangat potensial mempengaruhi korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu:

1. Competitors – technological breakthroughs; price structure; marketing techniques; mergers; new or expanding markets;

⁷⁵ Suprpto dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, op cit, hal. 103.

⁷⁶ Ibid, hal. 104.

⁷⁷ Lawrence W. Sherman dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, opcit, hal. 78.

2. Governments – extending regulations to cover more corporate activities either through new laws or tougher enforcement of existing laws;
3. Employees – any collusive activity, but especially those joining trade unions pursuing “militant” wage settlements and making “radical” demands on altering conditions of work employment;
4. Consumers – especially when demand for product is elastic and consequently fickle, or when consumerism is prevalent and making highly visible any dubious corporate practice;
5. Public – especially through a growing “environmentalist” sensitivity to conserving fresh air, clean countryside, and natural resources.⁷⁸

Bilamanakah suatu korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, suatu pendapat rupanya merujuk kepada bahan pustaka hukum pidana Inggris mempergunakan “asas identifikasi.”⁷⁹ Rupanya perbuatan pengurus atau pegawai korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Namun sangat disayangkan tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang asas ini. Pengertian korporasi dan badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan konsep hukum

⁷⁸ Steven Box, 1985, *Power, Crime and Mystification*, London Tavistock Publ, page 35 – 36. Dalam kaitannya dengan hal ini semua dikenal dengan apa yang dinamakan “*corporate violence*” yang oleh Clinard & Yeager dirumuskan sebagai “*behavior producing unreasonable risk of physical harm to consumers, employees, or other persons as a result of deliberate decision making by corporate executives or culpable negligence on their part*” (Clinard & Yeager dalam Muladi, 2001, *Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi*, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa pasca Sarjana, Undip, Semarang, hal. 18 – 19).

Pembicaraan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi umumnya ditujukan pada kerugian bidang ekonomi, sedangkan kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa pada kenyataannya juga sangat serius yang menurut Geis, setiap tahun korporasi bertanggung jawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia, demikian dikatakan oleh I.S. Susanto dalam *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orba*, pada Pidato Pengukuhan Guru Besar FH. Undip, Semarang tahun 1999, hal. 8.

⁷⁹ Selain teori identifikasi, dikenal pula teori imputasi (*imputation theory*) yakni pertanggungjawaban mewakili yang menurut I.S. Susanto, korporasi bertanggung jawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya. Hubungan antara pegawai dan korporasi merupakan hal yang utama, dalam arti pegawai korporasi harus bertindak dalam lingkup dan untuk kepentingan korporasi. Di samping itu tanggung jawab korporasi juga diperluas dengan konsep “pengesahan” (*ratification*) dan “pemberian” (*toleration*) oleh korporasi terhadap tindakan atau pola tindakan yang dilakukan oleh pegawainya (I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fak. Hukum Undip, Semarang, hal. 88).

perdata yang oleh Ali Rido dikatakan⁸⁰ di dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu dan dalam mempertahankan kepentingan itu badan hukum tampil sendiri ke muka dalam proses, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.”

Oleh karena itu seyogyanya pada sejak awalpun dicari pemahaman dari asas tersebut di atas dalam hukum perdata. Pada awalnya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat, apakah suatu korporasi dapat melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi di dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan korporasi yang bersangkutan. Dengan demikian, maka korporasi juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari korporasi itu sendiri. Oleh Mardjono Reksodiputro⁸¹

⁸⁰ Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hal. 6.
Dikatakan lebih lanjut oleh Ali Rido (*ibid*, hal. 33): Dengan telah melakukan pendaftaran dan pengumuman, semua perbuatan hukum pengurus (organ) dalam batas-batas wewenangnya, merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri dengan pertanggungjawaban sendiri pula. Dengan demikian fungsi pendaftaran dan pengumuman itu menghilangkan adanya pertanggungjawaban para pengurus secara pribadi dan mengakibatkan kepada badan hukum itu.

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, opcit, hal. 107.

Urgensi perumusan perbuatan terlarang yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam lingkup aktivitas korporasi yang berskala luas dikemukakan oleh Sunarjati Hartono dalam Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 182.

dikemukakan bahwa cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana Indonesia, gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*physische dader*). Namun dalam literatur ilmu hukum pidana sekarang, di dalam lingkungan sosial-ekonomi seorang pembuat tidak perlu selalu melakukan tindak pidana itu secara fisik. Dalam hal ini harus pula dipergunakan pemahaman tentang “pelaku fungsional” (*functionele dader*).⁸² Dalam pengertian yang terakhir ini, maka perbuatan korporasi harus juga diartikan apabila terjadi pelimpahan pertanggungjawaban. Pelimpahan ini harus diterima sebagai dasar perbuatan korporasi tersebut apabila di dalam lalu-lintas bisnis masyarakat, pelimpahan itu berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Dengan meminjam konstruksi dari hukum perdata diatas, ditambah dengan ajaran mengenai “pelaku fungsional”, seharusnya tidak ada permasalahan lagi bagi penegak hukum untuk mengajukan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan antara pengurus, orang di luar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar, dan mereka yang mewakili korporasi secara lain. Mengenai pengurus

⁸² Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, hal. 138.

dan orang lain yang mewakili sesuai anggaran dasar-dasar korporasi,⁸³ konstruksi hukum di atas dapat dipergunakan. Sedangkan bagi mereka yang mewakili korporasi secara lain, di dalam praktek sering terjadi bahwa pelaku secara fisik adalah orang (dapat manusia atau korporasi lain) yang secara organisatoris tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan korporasi yang dituduhkan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini maka konstruksi hukum perdata mengenai “perwakilan” (*vertegenwoordiging*) dan “pemberian kuasa” (*lastgeving*) juga dapat dipergunakan. Oleh karena itu melalui konstruksi hukum siapa secara nyata memimpin atau memberi perintah (*feitelijke leidinggever en opdrachtgever*), yaitu orang dalam korporasi, maka perbuatan “orang lain” tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang bersangkutan.⁸⁴

Menurut Muladi,⁸⁵ persoalan pertanggungjawaban korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutar korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak

⁸³ Prinsip pertanggungjawaban pengurus menurut kewenangan berdasarkan anggaran dasar ini, identik dengan apa yang disebut sebagai “*intra vires*” dan “*ultra vires*”. Perbuatan yang secara eksplisit tercakup dalam kecakapan bertindak (korporasi) adalah *intra vires*, sedang setiap perbuatan yang dilakukan berada di luar lingkup kecakapan bertindak (di luar maksud dan tujuan korporasi) adalah *ultra vires* yang karenanya tidak sah dan tidak mengikat PT. Primatexco Indonesia (Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 113).

⁸⁴ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, opcit, hal. 109.

⁸⁵ Muladi dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, opcit, hal. 93.

mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi.

Di Amerika Serikat, korporasi dipandang sebagai realitas, sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan pembedaan korporasi ialah *"to deter the corporation from permitting wrongful acts."* Pada umumnya di Amerika Serikat dianut pendapat, bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang menyangkut personal violence seperti melakukan kekerasan terhadap orang lain (*assault and battery*) atau karena kelalaian menyebabkan matinya orang lain (*manslaughter*) dan tindak pidana yang menyangkut *actual malice evil intent* (semacam *dolus premeditatus*).⁸⁶

Korporasi di Australia juga dapat dipidana denda. Hal ini disebabkan, dengan perkembangan struktur perekonomian, kekuasaan korporasi kian bertambah. Teori yang menyatakan, bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak mempunyai *mens rea* sudah ditinggalkan dan diganti dengan peraturan umum, yaitu: *a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporation.*⁸⁷

⁸⁶ Alasan pembedaan korporasi menurut Clark & Marshall sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, *Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi*, Simposium HPE oleh Puslitbang Keajaung RI dan FH Unhas, hal. 18: *"Where conduct is sanctioned by the directors or officers in whom the corporate power are vested, their intent should be considered the intent of the corporation. Such persons are more than agents for a natural principal. They embody and exercise the mental element essential for corporate actions."*

⁸⁷ Terhadap kesulitan pembuktian adanya sikap batin korporasi, Denning L.J. (*ibid*, hal. 19) menyatakan: *"... there must be person who represent the direct mind and will of the company and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such ... In the criminal law, in case of where the law requires a guilty mind as a condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors or the managers will render the company itself guilty."*

Dengan demikian pemidanaan korporasi adalah masalah kebijaksanaan, yaitu apakah sanksi pidana diperhitungkan untuk menakuti dan mencegah korporasi dari hal membiarkan dilakukannya tindak pidana. Di Australia, korporasi disamping pengurus dan pegawai-pegawainya, dapat dipertanggungjawabkan pidana dan perdata terhadap kejahatan umum, disamping itu juga kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan (*dolus dan culpa*) korporasi dialihkan kepada pengurus atau pegawainya yang bertindak dalam hubungan hukum dengan korporasi.

Hal lain yang juga masih dapat dipermasalahkan adalah, apakah alasan penghapusan pidana (atau kesalahan) dapat diajukan oleh korporasi? Apakah alasan penghapusan pidana (kesalahan) yang dapat diajukan oleh pengurus, pegawai atau kuasa yang sebenarnya melakukan perbuatan itu untuk korporasi, dapat pula diajukan oleh korporasi dalam pembelaannya? Mengenai pertanyaan pertama jawabannya adalah positif, juga bagi korporasi harus berlaku asas "tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan." Pengertian kesalahan pada korporasi, jangan dibayangkan serupa dengan keadaan batin (*psyche*) manusia. Untuk korporasi pengertian kesalahan harus dilihat dari dicelanya perbuatan tertentu, karena korporasi mempunyai kemungkinan (dalam situasi perbuatan tertentu) untuk bertindak lain (tindakan alternatif) sedangkan tindakan alternatif tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk dilakukan oleh korporasi (dalam situasi perbuatan bersangkutan). Karena tidak dipilihnya tindakan alternatif tersebut, maka korporasi dapat dicela atau disalahkan. Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua dapat diterima pendapat, bahwa alasan penghapusan pidana (kesalahan) harus dicari pada korporasi sendiri dan bukan

melalui pengurus, pegawai, atau kuasa yang sebenarnya bertindak. Dengan demikian apabila pelaku manusia (yang mewakili korporasi) tersebut dapat mengajukan alasan penghapusan pidana (kesalahan), maka belum tentu hal itu dapat diajukan oleh korporasi sebagai pembelaannya.⁸⁸

Mengenai hal ini Van Bemmelen⁸⁹ mengatakan bahwa dasar penghapusan pidana yang pasti bagi para pengurus dan sebagainya tidak diperlukan lagi, karena manusia alamiah terhadap tingkah laku yang dilaksanakan oleh korporasi, hanya dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, apabila ia memerintahkan melakukan perbuatan itu, atau merupakan pemimpin dalam melaksanakan perbuatan itu.

Menurut Van Strien, korporasi dapat memiliki kesalahan (dalam arti mampu untuk dipersalahkan). Kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai "kondisi kejiwaan manusia." Dasar dari penetapan dapat dipersalahkannya korporasi adalah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki oleh korporasi.⁹⁰

Lebih lanjut menurut Van Strien, pendapat tersebut memunculkan gagasan bahwa

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, *opcit*, hal. 110.

⁸⁹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, *op cit*, hal. 237.

Dalam hal ini Muladi menegaskan bahwa alasan-alasan penghapusan pidana juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini tidak hanya terbatas pada *afwezigheid van alle schuld (avas)*, melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa (*overmacht*). Sedangkan menurut Pohan, sesuai dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*) alasan peniadaan pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam konteks ini mungkin terjadi pada diri seseorang terdapat alasan peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya pada korporasi, meskipun perbuatan orang tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi (dikutip oleh Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, *op cit*, hal. 102).

⁹⁰ Kesalahan oleh Van Strien, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*, *op cit*, hal. 246, diartikan suatu keadaan dimana dalam situasi tertentu masih dimungkinkan bertindak secara lain dan bahwa dalam situasi tersebut secara wajar dapat diharapkan bahwa alternatif tindak tertentu masih mungkin untuk diambil.

juga korporasi dapat memiliki “kesalahan” dan oleh sebab itu prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” juga dapat diterapkan pada korporasi.⁹³

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offences* yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Atas dasar hal itu maka Friedmann mengatakan bahwa dalam *public welfare offences*, untuk dapat memidana korporasi jangan terlalu ditekankan pada segi – unsur kesalahan. Sudah cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perumusan perbuatan yang melawan hukum. Oleh Friedmann selanjutnya dikatakan:⁹²

“It is socially entirely desirable that the corporation ... should be the carrier of responsibility rather than the individual, although the person immediately responsible may ... be subject to concurrent liability ... On the balance of social interest, the ... tendency of modern statutes is to impose strict liability for violation of public welfare laws is therefore justifiable.”

Dalam konteks ini untuk Indonesiapun dimungkinkan bila korporasi dituduh berbuat suatu delik yang termasuk dalam kategori *public welfare offences*, atas delik yang bersangkutan harus selalu diterapkan ajaran “*feit materiel*” dimana tidak diperlukan adanya unsur kesalahan (ajaran *strict liability*). Sejalan dengan pendapat

⁹³ *Ibid*, hal. 247.

⁹² W. Friedmann, 1973, *Law in a Changing Society*, Columbia University Press, New York, Page 203.

Friedmann diatas, Barda Nawawi Arief⁹³ mengemukakan pendapat bahwa secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran "*strict liability*" atau "*vicarious liability*". Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi.

Arti penting mengenai ajaran *strict liability* ini dikemukakan oleh James E. Krier dalam tulisannya mengenai *Environmental Litigation and the Burden of Proof*, bahwa doktrin tanggung jawab mutlak merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan yang berbahaya, untuk itu dapat diberlakukan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.⁹⁴

Dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana untuk mengendalikan bahaya potensial yakni berbagai bentuk tindak pidana korporasi, maka wajar apabila adagium *Universitas Delinquere Non Potest* tidak lagi dianut dalam KUHP Nasional yang akan datang. Demikian pula adalah wajar jika dalam tindak pidana tertentu

⁹³ Barda Nawawi Arief, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal. 117.

Menurut Rudiger Lummert yang dikutip Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 46: Dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke konsep "resiko". Sebab perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah resiko yang terjadi setiap hari ...

⁹⁴ James E. Krier dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, op cit, hal. 189.

Pendapat mengenai ajaran ini dikemukakan pula oleh Roeslan Saleh bahwa di dalam praktek pertanggungjawaban pidana lenyap, apabila ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka tingkatan keadaan mental yang menjadi syarat peniadaan pengenaan pidana, sehingga lahir kelompok kejahatan, yang pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.

(khususnya tindak pidana korporasi), asas kesalahan tidak berlaku murni. Artinya, disamping asas kesalahan, dianut pula prinsip *strict liability* dan *vicarious liability*, oleh Roeslan Saleh dikatakan bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tetapi apa yang disebut *vicarious liability*, maka orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa yang dipandang bertanggung jawab sebagai pembuat.

Undang-undang dapat menentukan *vicarious liability*, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan.
2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan.⁹⁵

Atas dasar hal tersebut, maka pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana, dapat digunakan prinsip *vicarious liability*. Artinya, korporasi

⁹⁵ *Ibid*, hal. 116.

Menurut Mardjono, yang penting dalam bangunan hukum tanggung jawab yang dialihkan ini adalah bahwa tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik (dan tidak perlu pula ada kewajiban hukum), karena yang menentukan adalah adanya kewajiban hukum (yang dilanggar) pada korporasi (Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, *opcit*, hal. 2).

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat. Misalnya, suatu korporasi dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan berdasarkan fakta pembuangan limbah industri yang mengandung bahan kimia beracun ke dalam aliran sungai. Asas ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).

Karena kerugian-kerugian baik fisik, sosial maupun ekonomi dari tindak pidana korporasi, maka sangat beralasan untuk mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (*criminal policy*) guna penanggulangan tindak pidana korporasi. Kebijakan tersebut harus menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis yang berupa penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hal hukum pidana yang dipilih, Muladi menyatakan sanksi-sanksi yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut (sepanjang hukum positif memungkinkan): (1) denda; (2) pidana bersyarat/pidana pengawasan; (3) pidana kerja sosial; (4) pengumuman keputusan hakim; (5) ganti rugi dan (6) pelbagai sistem tindakan tata tertib.⁹⁶

⁹⁶ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, *opcit*, hal. 21.

Barda Nawawi Arief, 1998, dalam buku *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, mengutip pendapat Jeremy Bentham secara lebih singkat menyatakan bahwa jangan pidana dikenakan/digunakan apabila "*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*." Demikian pula Herbert L. Packer mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*).

Pertanggungjawaban korporasi di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 juga dikenal, walaupun dari segi teknik *legislative drafting* kurang. Hal ini nampak dari pencantumannya yang hanya ditempatkan dalam penjelasan Pasal 5 Undang-undang tersebut. Disamping itu pengaturannyapun terlalu sederhana, sehingga di dalam penerapannya seringkali menimbulkan pelbagai penafsiran. Atas dasar pengalaman pengaturan hukum positif, dan pemikiran yang berkembang serta memperhatikan pula kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
- b. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).
- c. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*).
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
- e. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.

- f. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
- g. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- h. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengandalkan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid*, hal. 17 – 18.

Masih menurut Muladi yang dikemukakan pada harian Wawasan, Selasa, 28 Agustus 2001, bahwa peraturan perundangan tentang kejahatan korporasi sebenarnya sudah cukup memadai, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah *political will* yang secara komprehensif akan melakukan penegakan hukum. Yang tidak kalah penting adalah penertiban etika bisnis dan adanya tekanan masyarakat dengan berbagai bentuknya seperti LSM ataupun yang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. PENERAPAN KETENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KASUS-KASUS TPLH

A.a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UUPH

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, karena pada tahap ini dirumuskan konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya yaitu tahap aplikatif dan tahap eksekutif. Demikian pula dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPLH tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang dituangkan dalam perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup pada saat ini, berorientasi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) yang merupakan undang-undang induk (*kader wet* atau *umbrella act*) serta perundang-undangan lingkungan hidup sektoral.

Apabila dilihat, rumusan TPLH di dalam UUPH selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian orang.¹ Namun apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 sub 24 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan, dan / atau kelompok orang, dan / atau badan hukum. Hal ini dipertegas

¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal. 114.

lebih lanjut di dalam Bab IX tentang ketentuan pidana yang dituangkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH yaitu mengenai pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dengan adanya Pasal 45 dan Pasal 46 tersebut, maka orang dan korporasi (badan hukum dsb) dapat menjadi subjek TPLH dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun bunyi Pasal 45 adalah sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini (Bab IX: penulis) dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.”

Selanjutnya Pasal 46 berbunyi:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 tersebut di atas, maka pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:

1. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;
2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu (penulis: pengurus), atau;
3. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

Di dalam beberapa perundang-undangan sektoral dapat dijumpai perumusan secara eksplisit maupun secara implisit, bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Secara eksplisit², perumusan dimaksud terdapat antara lain dalam:

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, yang menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan / atau alat yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.”

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan:

“Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya.”

² *Ibid*, hal. 115.

Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) mempertegas bahwa:

“Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki ijin usaha perikanan.”

Adapun perumusan secara implisit yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yaitu:

Pasal 1 butir ke-7 yang berbunyi:

“Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.”

Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) berbunyi:

“Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.”

Atas dasar ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 butir ke-7 tersebut di atas, maka perusahaan industri dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Mengenai kapankah korporasi itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, pada umumnya pembuat undang-undang merumuskannya dengan kalimat sebagai berikut: “Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka ... dan seterusnya. Perumusan semacam ini dapat dilihat misalnya di dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun patut disayangkan

bahwa undang-undang tersebut tidak menyatakan kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana itu.

Perumusan di atas sangat berbeda apabila kita melihat Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyebutkan:

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, ... jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum ...”

Selanjutnya di dalam Pasal 46 ayat (2) UUPLH, dirumuskan sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.”

Dari bunyi kedua pasal undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, apabila ada orang / orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan lingkungan korporasi itu melakukan sesuatu yang menurut undang-undang tersebut merupakan tindak pidana.

Apabila melihat rumusan dalam perundang-undangan sektoral seperti Undang-undang ZEEI, Undang-undang Perindustrian, Undang-undang Perikanan, Undang-undang Konservasi Hayati, Undang-undang Benda Cagar Budaya maupun

Undang-undang Pelayaran, tidak terdapat suatu ketentuan rinci yang mengatur tentang penentuan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.

Setelah korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi tersebut. Sebab meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi atau tidak dapat ditentukan, maka korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Dari sudut kesalahan atau sikap batin pelaku, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun perundang-undangan lingkungan hidup sektoral, sebagian besar mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan / kelalaian. Beberapa undang-undang yang tidak mencantumkan unsur tersebut adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dengan dicantumkannya unsur sengaja maupun kealpaan, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan beberapa perundang-undangan sektoral menganut prinsip *Liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.

Permasalahan selanjutnya adalah siapakah yang mewakili korporasi tersebut di dalam persidangan, apabila korporasi dituntut / diajukan untuk

mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dalam UUPLH, hal ini dapat dilihat pengaturannya yaitu Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (3) berbunyi:

“Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.”

Pasal 46 ayat (4) berbunyi:

“Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.”

Dari bunyi pasal di atas, yang mewakili korporasi di persidangan adalah:

1. Pengurus;
2. Salah seorang dari pengurus, apabila terdapat lebih dari seorang pengurus;
atau
3. Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu.

Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku TPLH, UUPLH mengenal dua jenis sanksi yaitu:

1. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa penjara dan denda, tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan. Tidak terdapatnya pidana kurungan dalam UUPLH menurut

Barda Nawawi Arief³, semua TPLH menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dikualifikasikan sebagai kejahatan.

2. Sanksi tindakan tata tertib

Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada orang maupun korporasi sebagai TPLH adalah:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan / atau
- b. penutupan perusahaan (seluruhnya / sebagian); dan / atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan / atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan / atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan, paling lama 3 (tiga) tahun.

Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak menyebutkan adanya pidana tambahan, namun bentuk tindakan berupa “perampasan keuntungan” dan “penutupan perusahaan” (Pasal 47 sub a dan b) pada hakikatnya dapat dikelompokkan ke dalam pidana tambahan. Perampasan keuntungan dapat dikategorikan sebagai perampasan barang yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP. Demikian pula penutupan perusahaan dapat dikategorikan sebagai pencabutan hak. Hal ini dikarenakan penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya pencabutan hak / ijin berusaha.⁴

³ *Ibid*, hal. 119.

⁴ *Ibid*, hal. 120.

Apabila dipelajari, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tidak merumuskan secara tegas adanya pemberian ganti rugi sebagai salah satu jenis sanksi. Namun melihat ketentuan Pasal 47 sub c, d dan e dapat dikatakan merupakan bentuk pemberian “restitusi” kepada korban.⁵

Mengenai pola jenis sanksi di dalam perundang-undangan lingkungan hidup sektoral, dapat dikemukakan bahwa:

1. Beberapa perundang-undangan lingkungan hidup sektoral mengikuti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH), yaitu menggunakan satu jenis sanksi berupa pidana pokok antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (pidana denda), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (pidana penjara atau denda), dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (penjara atau denda).
2. Selain pidana pokok, dalam beberapa perundang-undangan sektoral ada pula yang mencantumkan pidana tambahan yaitu:
 - a. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, berupa **perampasan** hasil kegiatan, kapal dan / atau alat perlengkapan lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).
 - b. Pasal 24 dan 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, berupa **pencabutan** Ijin Usaha Industri (IUI).

⁵ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 201-203.

- c. Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, berupa **perampasan** benda-benda yang digunakan dan dihasilkan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 24, 25, 26 dan Pasal 27.

Sehubungan dengan kebijakan sanksi pidana yang berbentuk pidana tambahan di atas, Barda Nawawi Arief mengatakan: dirasakan janggal adanya pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha industri untuk delik-delik dalam Pasal 24 ayat (1) jo 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 itu. Hal ini dikarenakan deliknya sendiri dilakukan tanpa ijin, sehingga ijin apa yang harus dicabut? Lebih lanjut dikatakan, sekiranya memang demikian kebijakan pembuat undang-undang dalam mengoperasionalkan pidana pencabutan ijin usaha, sangat disayangkan kebijakan seperti itu tidak dituangkan secara konsisten dalam perundang-undangan lain. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ada ketentuan, bahwa tiap orang / badan hukum yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki ijin usaha (Pasal 10 ayat 1). Akan tetapi di dalam delik yang bersifat administratif seperti pengelolaan sumber daya ikan yang tidak memenuhi ketentuan Menteri (Pasal 27 ayat1 jo. Pasal 4) dan pelanggaran ketetapan Menteri mengenai larangan pengeluaran / pemasukan jenis ikan tertentu (Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 20), sama sekali tidak ada pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha perikanan.

Untuk memudahkan pemahaman, di bawah ini disajikan dalam bentuk tabel mengenai kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup pada saat ini yang berhubungan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tabel 1

**KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP
SAAT INI TERHADAP KORPORASI**

No	SUBSTANSI	UU NO. 23 TH. 1997 (UUPLH)	PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL
1.	Subjek yang dipertanggungjawabkan	- Pasal 46 a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, b. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, c. Kedua-duanya	- Tidak ada penegasan.
2.	Kapan korporasi melakukan tindak pidana:	- Pasal 46 Apabila ada orang atau orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan dalam lingkungan badan hukum itu melakukan tindak pidana.	- Tidak ada penegasan.
3.	Pertanggungjawaban korporasi	Menganut prinsip <i>Liability based on fault</i> (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan)	Sama, kecuali Undang-undang No. 9 Th. 1985 (Perikanan dan Undang-undang No. 5 Th. 1983 (ZEEI))
4.	Sanksi yang dijatuhkan	- 2 jenis sanksi, yaitu: a. Sanksi pidana: Pidana pokok berupa - penjara - denda b. Tindakan tata tertib: 1 Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tind-pid; dan /atau 2 Penutupan perusahaan (seluruhnya / sebagian); dan /atau 3 Perbaikan akibat tindakan pidana; dan/atau 4 Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau	- Pola jenis sanksi mangacu Undang-undang No. 4 Th. 1982, hanya 1 jenis sanksi berupa pidana pokok (UU ZEEI: denda, UU Perindustrian: penjara atau denda). Pidana tambahan: a. UU ZEEI: Perampasan hasil kegiatan, kapal dan /atau alat perlengkapan lain yang digunakan untuk melakukan tind-pid.

No	SUBSTANSI	UU NO. 23 TH. 1997 (UUPH)	PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL
		5 Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 6 Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.	b. UU Perindustrian: Pencabutan Ijin Usaha Industri c. UU Perikanan: Perampasan benda-benda yang digunakan dan dihasilkan dari delik-delik yang diatur pasal 24 s.d. 27.

A.b. Penerapan Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korporasi Yang Melakukan TPLH

Penurunan kualitas lingkungan yang merupakan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup makin menjadi pusat perhatian, bukan karena hanya orang-perorangan yang melakukannya, lebih memprihatinkan lagi perusahaan-perusahaan besar ternyata telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan secara besar-besaran.

Kenyataan membuktikan bahwa tindakan pencemaran dan perusakan akibat limbah industri (yang sering diungkap media massa), hampir semuanya bersumber pada belum berfungsinya instalasi pengolahan limbah secara efektif. Selain itu juga adanya tendensi pihak pengusaha yang kurang bersungguh-sungguh untuk membiayai pengolahan limbahnya secara tuntas, maupun menanggulangi akibat pencemaran atau kerusakan yang terjadi, sehingga resiko biaya penanggulangan tetap menjadi beban masyarakat dan atau pemerintah.

Lemahnya pemantauan dan pengawasan terhadap industri atau kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, menyebabkan sulitnya penegakan hukum lingkungan oleh aparat administrasi berjalan dengan efektif.⁶ Lemahnya penegakan hukum administrasi ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lainnya, yaitu penegakan hukum pidana. Berdasarkan laporan ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*) sebuah organisasi non-pemerintah bidang hukum lingkungan⁷, penanganan terhadap kasus lingkungan yang tidak terselesaikan menunjukkan persentase cukup besar yaitu 51 persen. Menurut pengamatan ICEL, banyak kasus yang mendapat sanksi administratif, tetapi penyelesaian kasusnya masih belum jelas. Usaha penyelesaian kasus lingkungan yang menggunakan jalur perdata hanya lima persen dari jumlah yang ada, sedangkan jalur pidana hanya tiga persen. Memang dalam kenyataannya kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh korporasi jarang sekali terdengar memasuki wilayah kerja pengadilan.

Memperhatikan laporan dari ICEL di atas, memberikan suatu gambaran yang negatif bagi penegakan hukum lingkungan, yaitu tidak sebandingnya kasus lingkungan yang sampai ke pengadilan dengan banyaknya kasus lingkungan yang terjadi. Kondisi semacam ini menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum lingkungan tersebut, sedangkan perlindungan terhadap

⁶ Masalah ini dikemukakan dalam sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rapat paripurna terbuka DPR pada tanggal 22 Agustus 1997, sebagai berikut: "Pelaksanaan undang-undang akan terkait dengan penegakan hukum, oleh karena itu peran aparat pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan menjadi penting."

⁷ Arief Hidayat, *et al*, 1998, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal. 43-44.

lingkungan hidup telah diatur secara konkret di dalam ketentuan yang memiliki sanksi hukum.

Pembahasan berikut ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan yang berlaku saat ini diaplikasikan terhadap korporasi yang telah melakukan TPLH, beserta kendala-kendala dalam penerapannya. Sehubungan dengan terbatasnya waktu, tenaga serta biaya, maka penulis akan menganalisis dua kasus, yaitu:

1. Kasus limbah Singapura (PN. Tanjung Pinang, 1990).
2. Kasus pembakaran hutan (PN. Bangkinang Pekanbaru, 2001. Kasus ini merupakan kasus pembakaran lahan di Indonesia yang pertama kali dijatuhi pidana dengan pasal tindak pidana korporasi).

Ad 1. Kasus limbah Singapura⁸

Kasus Posisi:

- a. Perusahaan Transmedia Asia Limited di Singapura diketahui telah membuang limbah industri sabun di Simpang Busung-Tanjung Uban-Pulau Bintan-Riau.
- b. Limbah industri beracun tersebut ditempatkan dalam karung-karung plastik berbentuk gumpalan busa berwarna hitam.
- c. Limbah tersebut meleleh jika terkena air, sehingga ditanam di lubang bekas galian pasir di kawasan PT. Artha Sapala di Tanjung Uban.
- d. Limbah industri dibawa dengan tongkang dan diperkirakan sudah ratusan ton limbah ditanam pada bekas galian pasir yang luasnya berhektar-hektar dengan kedalaman antara satu sampai dengan lima meter.

⁸ Siti Sundari Rangkuti – Th. G. Drupsteen, 1992, *Kasus-Kasus Hukum Lingkungan (Cases on Environmental Law)*, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, hal. 149-153.

- e. Tersangka dalam kasus ini adalah, dua orang warga negara Singapura yang bertindak sebagai Menejer Operasi/Penasehat PT. Transmedia Asia Ltd, dua orang WNI bertindak sebagai Kepala Cabang PT. Artha Sapala, Jakarta serta seorang nakhoda tugboat Atlas.

Perusahaan ini didakwa telah melakukan tindak pidana, berupa:

- a. Menyelundupkan limbah industri ke wilayah perairan Indonesia.
- b. Membuang limbah tanpa ijin/dokumen yang sah.
- c. Membuang limbah yang mengandung racun sehingga terjadi pencemaran lingkungan hidup.

Dalam proses pemeriksaan perkara, perbuatan para terdakwa melanggar:

- a. Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang bunyinya:
 - Ayat (1): diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan / atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1). Menurut Pasal 21 ayat (1), perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
 - Ayat (2): tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) di atas dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 tahun dan / atau denda maksimum 1 juta rupiah, apabila dilakukan karena kelalaian.

- b. Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang berbunyi: barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau **undang-undang lain** diancam pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 100 juta rupiah.
- c. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- d. Tindak pidana imigrasi (PP Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing) dan tindak pidana penyelundupan.
- e. Berturut-turut secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memasukkan barang dari Singapura ke Simpang Busung - Tanjung Uban - Riau tanpa ijin prosedur pabean, yang ternyata limbah industri dari Singapura sebanyak 150 ton pada tanggal 21, 28 dan 31 Mei 1989.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan:

- a. Hasil pemeriksaan dan penelitian laboratorium, limbah yang dibuang dari Singapura ke Tanjung Uban - Riau mengandung racun dan bahan berbahaya seperti Antimon (BS), Tembaga (CU), Seng (Zn), Sulfida (S), Hidroksida (OH), Sulfat (SO₄), DAN Clorida (CL).
- b. Kasus dijadikan dua berkas perkara, yaitu penyelundupan limbah industri dari Singapura dan pencemarannya.

Putusan hakim dalam kasus ini adalah:

Untuk kasus penyelundupan:

- a. Dua warga negara Singapura dihukum masing-masing 6 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan.
- b. Barang bukti alat angkut berupa dua tugboat Atlas 9 dan 11 serta sebuah ponton TM 22 dikembalikan kepada pemiliknya Transmedia Asia Ltd. Singapura.

Untuk kasus pencemaran lingkungan:

- a. Dua warga negara Singapura tersebut dipersalahkan telah melanggar Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 jo. Kep. 02/MENKLH/I/1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Kedua terdakwa dituntut masing-masing 1 tahun penjara, dalam masa percobaan 2 tahun.
- c. Barang bukti berupa 150 ton limbah dari lokasi diangkut kembali ke sumber asalnya di Singapura dalam waktu dua bulan.
- d. Alat kendaraan yang digunakan dalam kegiatan penambahan pasir di lokasi dikembalikan kepada Transmedia Asia Ltd.
- e. Direktur utama PT. Artha Sapala harus bertanggung jawab selaku pemegang hak pengelolaan lokasi atas limbah industri yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup seperti tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 dan diperkuat lagi dengan pengaduan korban pencemaran seperti diisyaratkan oleh Pasal 20 undang-undang yang sama.

Analisis terhadap putusan hakim:

Dari kasus tersebut diatas, ada beberapa hal yang nampak di dalam proses pemeriksaan di pengadilan, yaitu:

1. Peraturan yang tumpang tindih
2. Peraturan yang tidak jelas
3. Ketidakperdulian para terdakwa terhadap program pemerintah dalam melestarikan lingkungan.

Ad 1. Di dalam kasus ini terlihat banyak sekali peraturan yang diterapkan dan yang dilanggar para terdakwa. Di samping itu terlihat pula adanya tumpang tindih peraturan yang menimbulkan perbedaan dalam membaca dan menafsirkan isi peraturan sehingga tidak hanya menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini, tetapi juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Mengamati surat tuduhan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa sekaligus melakukan pelanggaran terhadap beberapa peraturan, yaitu:

- a. Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984.
- b. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.
- c. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954, dan
- e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ad 2. Tidak jelasnya isi peraturan ikut pula menjadi kendala di dalam penegakan hukum lingkungan, hal ini menyangkut antara lain lingkup dan sifat kerusakan yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Kerugian yang

disebabkan oleh pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ini dapat meliputi kerusakan langsung (*direct damages*), kerusakan ekologis, biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran, termasuk pemulihan lingkungan. Kendala lain yang dapat ditunjukkan adalah tidak adanya keseragaman dari para ahli tentang akibat biologis dari beberapa jenis pencemaran seperti minyak di laut, limbah yang bersifat racun dan sebagainya. Ketidakjelasan ini ditambah dengan kenyataan bahwa rumusan tindak pidana yang ada di dalam Pasal 22 UULH kurang jelas dan serba meliputi untuk segala jenis pencemaran dan perusakan lingkungan. Di dalam UULH ini (Pasal 5), korporasi dimungkinkan menjadi subjek TPLH. Namun tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, turut pula berperan UULH ini menjadi tidak efektif dalam penerapannya.

- Ad 3. Dari kasus ini terlihat bagaimana tingkat kesadaran hukum yang dimiliki para terdakwa sebagai pengusaha terhadap upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan pemerintah. Sebagai pengusaha, tidak seharusnya mereka memikirkan keuntungan semata-mata tanpa mengindahkan kelestarian di tempat pembuangan limbah yaitu lubang bekas galian pasir di kawasan PT. Artha Sapala. Terdakwa bahkan masih terus melakukan kegiatannya, meskipun ijin operasi perusahaan telah dihentikan oleh Pemerintah Daerah sejak 6 Desember 1989, bahkan pengusaha tersebut tetap mempekerjakan buruh di lokasi tersebut.

Selain itu para pengusaha juga tidak menyadari bahwa limbah yang dibuang dari Singapura ke Tanjung Uban - Riau mengandung racun dan bahan

berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan seperti radang tenggorokan, radang paru-paru, pembuluh darah pecah, liver rusak, bahkan dapat mengakibatkan kematian tidak saja bagi para buruhnya, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pembuangan limbah tersebut. Menurut hemat penulis, faktor inilah yang dapat menjadi "hal yang memberatkan" dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa.

Namun melihat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap para terdakwa pada 31 Oktober 1990, yaitu:

1. Untuk kasus penyelundupan adalah 6 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan bagi kedua warga negara Singapura;
2. Untuk kasus pencemaran adalah 1 tahun penjara dalam masa percobaan 2 tahun bagi kedua warga negara Singapura serta pertanggungjawaban direktur utama PT. Artha Sapala selaku pemegang hak pengelolaan lokasi atas limbah industri;

maka penulis berpendapat, bahwa pidana tersebut masih belum tepat dan belum proporsional. Karena hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap korporasinya yaitu PT. Artha Sapala. Di samping itu sebagai orang yang melakukan usahanya langsung berhubungan dengan pemanfaatan lahan/tanah, sudah sewajarnya berkewajiban untuk memulihkan aspek daya guna dan hasil guna tanah tersebut. Namun oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Artha Sapala, tanah bekas galian pasir justru sengaja digunakan sebagai pembuangan limbah yang nyata-nyata mengandung racun yang membahayakan bagi kesehatan karena PT ini memperoleh royalti sebesar 1,20 dolar Singapura untuk tiap meter kubik limbah.

Karena kesengajaannya, terdakwa tidak saja telah merugikan alam akibat rusak dan tercemarnya lingkungan (lahan bekas galian pasir dan pembuangan limbah), tetapi juga tidak mengindahkan hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UULH, terutama dalam kaitannya dengan fungsi lahan bagi hajat hidup orang banyak.

Hak semua orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak saja diakui di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tetapi juga mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun kepada dua warga negara Singapura dan mempertanggungjawabkan direktur utama PT. Artha Sapala, menurut hemat penulis terlalu ringan karena para terdakwa jelas melakukan tindak pidana yang memiliki kualifikasi kejahatan di dalam Pasal 22 ayat (1) UULH yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja.
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup.

Selanjutnya Pasal 1 butir 7 UULH, tercemarnya lingkungan:

1. masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan (di dalam penjelasan Pasal 1 butir 7 ini komponen lainnya mencakup informasi) dan atau;

⁹ Di dalam draft resolution dari Kongres PBB ke 9 tentang "*The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offender*" di Cairo, tanggal 29 April – 8 Mei 1995, page 3 disebutkan: *The right to enjoy an adequate environment and the duty to preserve the environment should be established in all legislations at the national level.*"

2. berubahnya tatanan lingkungan (penjelasan Pasal 1 butir 7, tatanan lingkungan adalah susunan komponen lingkungan secara alamiah atau hasil upaya manusia);
3. unsur (a) dan (b) itu dilakukan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam;
4. mengakibatkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sudah selayaknya hakim berani menjatuhkan pidana terhadap korporasi tersebut berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 5 UULH, dan pidana yang lebih berat kepada dua warga negara Singapura tersebut, juga pidana yang sama terhadap direktur utama (pengurus) PT. Artha Sapala dan mengkumulasikan dengan pidana denda yang tinggi kepada para terdakwa, karena perusahaan tersebut (PT. Artha Sapala) masih menjalankan usaha dan mempekerjakan buruhnya sedangkan ijin operasi perusahaan telah dihentikan. Kenyataan ini mengindikasikan adanya kesengajaan dari para pengurus perusahaan itu untuk melakukan pelanggaran. Bahkan terdakwa tidak melakukan pemulihan atas lahan bekas galian pasir, tetapi justru digunakan untuk membuang limbah sehingga menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung, dan mengakibatkan lahan bekas tersebut tidak atau kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Apabila ditinjau dari sudut penggunaan kebijakan (hukum) pidana sebagai sarana preventif, putusan hakim yang terlalu ringan akan membuat calon-calon pelaku potensial pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang lain tidak akan

takut untuk melakukan hal serupa. Ditinjau dari sudut tujuan represif, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ini tidak akan membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan di kemudian hari. Selain itu rasa hormat kepada lembaga peradilan dapat menjadi berkurang. Dampak yang terbesar bagi penegakan hukum lingkungan adalah menimbulkan rasa jera untuk menarik pelaku pencemaran maupun perusak lingkungan melalui penyelesaian secara pidana.

Ad 2. Kasus Pembakaran Hutan¹⁰

Terdakwa dalam kasus ini adalah warga negara Malaysia keturunan India. Yang bersangkutan adalah General Manager dari PT. Adei Plantation yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Nilo, Kecamatan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pada tanggal 1 Oktober 2001, hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Pekanbaru menyatakan bahwa yang bersangkutan (Mr. Gobi) terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Adapun kasus posisinya sebagai berikut:

- a. PT. Adei Plantation akan membuka lahan yang selanjutnya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 2.000 hektar di Nilo, Kecamatan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau.
- b. Untuk membuka lahan tersebut, PT. Adei Plantation (melalui anak buahnya) melakukan pembakaran yang mencapai luas 2.970 hektar, sehingga menimbulkan

¹⁰ Sahardjo @indo.net.id

asap dan kabut yang kemudian menjalar ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.

- c. Adanya pembakaran lahan itu mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, dikumpulkan data dan informasi sebagai berikut:

- a. Tanah gambut menunjukkan permukaan yang datar.
- b. Dengan data melalui satelit diketahui bahwa lahan yang terbakar mencapai luas 2.970 hektar.
- c. Pembakaran kayu di hutan memberikan indikasi bahwa api menjalar ke bawah dengan intensitas tinggi dan kedalaman 1 centimeter lebih. Dengan adanya pembakaran menyebabkan kayu-kayu dengan diameter 30 – 40 centimeter dan masih hidup menjadi ikut terbakar.
- d. Areal yang terbakar dapat dilihat dengan adanya asap dan kabut, sedangkan kedalaman penetrasi panas rata-rata 10 centimeter dapat diperlihatkan dari perubahan warna gambut.

Oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut dengan pidana penjara 4 tahun karena melanggar Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH), yang berbunyi:

- Ayat (1): barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan *perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan*, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

- Ayat (2): jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *mengakibatkan* orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah.

Di dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan:

- a. Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Indonesia di dunia internasional, karena pencemaran asap yang berasal dari pembakaran lahan telah mengganggu penduduk negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.
- b. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa bersalah selama persidangan berlangsung.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang atas kasus ini adalah:

- a. Warga negara Malaysia tersebut dipersalahkan telah melanggar Pasal 41 UUPH, yaitu dengan sengaja melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kepada yang bersangkutan juga dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang yang sama, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.
- c. Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah.

Atas putusan hakim tersebut di atas, terdakwa menyatakan banding namun belum diketahui hasilnya, sehingga putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Disamping itu Bapedal Pusat (yang hadir bersama-sama dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada saat vonis dijatuhkan) juga tengah menyiapkan berkas gugatan, karena dalam kasus ini negara telah dirugikan

lebih dari 508 milyar rupiah dan kerugian ini belum termasuk kerugian nonmaterial.

Inipun juga belum diketahui hasilnya.

Analisis terhadap putusan hakim:

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangkinang, Riau ini sangat menarik, karena merupakan kasus pertama mengenai pembakaran lahan di Indonesia yang dijatuhi pidana dengan pasal tindak pidana korporasi.

Penulis berpendapat, putusan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 250 juta terhadap Mr. Gobi selaku General Manager PT. Adei Plantation sangat tepat dan rasional. Hal ini merupakan preseden baik bagi penegakan hukum lingkungan, karena pengusaha-pengusaha lain (yang memiliki potensi untuk melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan) akan berpikir kembali untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan karena khawatir mendapatkan pidana yang serupa. Sebab selama ini pidana lebih sering dikenakan kepada pelaku langsung seperti buruh atau karyawan yang berada di lapangan dan berupa pidana denda.

Sebagai General Manager, Mr. Gobi seharusnya aktif memantau keadaan di lapangan dan tidak hanya menerima laporan dari anak buahnya. Apalagi pembakaran ini tidak terjadi sekali, tetapi berulang kali dan selalu terjadi pada malam hari. Sebagai warga negara Malaysia, negara yang selalu memprotes Indonesia mengenai masalah asap, Mr. Gobi sudah selayaknya mengetahui bahwa metode pembukaan lahan dengan pembakaraan dilarang pemerintah. Namun yang bersangkutan justru memanfaatkan kevakuman tindakan aparat hukum dan pengawasan dari pihak yang

berkompeten terhadap kawasan hutan, sehingga areal yang dibakar mencapai luas 2.970 hektar, melebihi luas yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit yang hanya 2.000 hektar dan menyebabkan kayu-kayu yang masih hidup dengan diameter 30 – 40 centimeter ikut terbakar.

Dalam kasus pembakaran ini terlihat seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang dimiliki terdakwa yang hanya mengejar keuntungan bagi perusahaan belaka. Karena berdasar data yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium, kebakaran di perkebunan kelapa sawit milik PT. Adei Plantation disebabkan penyiapan lahan untuk perkebunan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai target penanaman dengan biaya produksi rendah. Tanpa pembakaran, penyiapan lahan untuk perkebunan perusahaan akan membayar 8 sampai dengan 10 miliar untuk setiap hektar, tetapi dengan metode pembakaran perusahaan cukup mengeluarkan biaya 700 ribu sampai dengan 1 miliar setiap hektarnya.

Selain mengejar keuntungan bagi perusahaan, Gobi juga tidak menyadari bahwa selama pembakaran, gas yang akan dilepaskan ke udara berupa amonium (CH_4), amoniak (NH_3), karbon monoksida (CO), senyawa nitrat dan nitrit (NO_x), partikel-partikel serta debu dapat mengganggu kesehatan terutama paru-paru karena menghirup udara yang mengandung racun. Selain itu asap dan kabut yang ditinggalkan juga menghalangi pandangan, sehingga membahayakan para pengguna jalan dan pesawat terbang yang melintas di atasnya.

Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sangat “tepat dan rasional”, hal ini dikaitkan dengan Pasal 41 ayat

(1) UUPLH yang merumuskan: "... dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan (cetak miring dari penulis) ...", merupakan tindak pidana materiil yang perumusannya dititikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilarang.¹¹ Dari sudut kesalahan pelaku, kasus PT. Adei Plantation ini dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dimaksud, yaitu:

"Dengan sengaja melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup," berupa:

1. gas yang mengandung racun disertai partikel-partikel dan debu yang mengganggu kesehatan.
2. asap dan kabutnya yang membahayakan pengguna jalan baik darat, laut maupun udara.
3. asap dan kabut juga menjalar ke negara Malaysia dan Singapura sehingga merusak citra Indonesia dimata dunia Internasional.
4. kayu-kayu yang masih hidup ikut terbakar, dan membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula.

Selain melanggar Pasal 41 ayat (1) UUPLH, terdakwa juga dikenai Pasal 46 undang-undang yang sama perihal pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbunyi:

¹¹ Muladi mengemukakan bahwa sifat dari *generic crimes* adalah independent (otonom), perumusannya merupakan delik materiil, dalam hal mana akibat merupakan unsur yang hakiki. Dalam hal ini teori kausalitas sangat penting (Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 21 Februari 1998, hal. 21-22).

Ayat (1): jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Dari bunyi Pasal 46 ayat (1) tersebut, hakim sesungguhnya diberikan wewenang untuk juga menjatuhkan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib yang lebih ditujukan kepada korporasinya, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 47 yaitu:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Namun memperhatikan putusan hakim di atas, sangat disayangkan pidana tambahan ini tidak dicantumkan, bahkan jaksa dalam tuntutanpun tidak mencantumkan jenis pidana tambahan ini. Menurut hemat penulis, untuk menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari serta mencegah pelaku potensial lain melakukan tindakan yang sama, hakim harus berani mencantumkan pidana tambahan ini dalam putusannya.

Supaya pidana tambahan ini tidak berdampak negatif bagi seluruh karyawan maupun buruh, hakim dapat saja memerintahkan korporasi tersebut (melalui pengurusnya) untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana dengan cara memulihkan kondisi lingkungan seperti semula, sekaligus menempatkan korporasi tersebut di bawah pengampunan selama waktu tertentu. Tindakan ini menurut penulis perlu dilakukan, untuk memantau seberapa jauh perbaikan akibat tindak pidana itu telah dilaksanakan oleh korporasi yang bersangkutan.

Bagaimanapun juga putusan hakim di atas layak dijadikan contoh, karena merupakan preseden yang baik bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam ppidanaan.¹² Bagi para hakim yang menangani kasus-kasus lingkungan serupa, hendaknya memegang teguh asas peradilan yang baik yaitu “cepat, tepat, cermat, dengan biaya ringan dan sederhana.” Semakin lama proses suatu perkara di pengadilan (khususnya kasus lingkungan), semakin banyak pula kerugian yang ditimbulkan, tidak saja dari segi biaya tetapi juga dari sudut kemanfaatan dan dari segi keadilan yang diharapkan.

Melihat kembali putusan hakim dalam mengadili perkara pidana lingkungan ini, seyogyanya setiap hakim memperhatikan tiga hal dalam memberikan putusannya yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang selalu dihadapi setiap masyarakat, walaupun kemudian setiap masyarakat dengan

¹² Tujuan ppidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah, *pertama* untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. *Kedua*, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup (*ibid*, hal. 14-15).

karakteristiknya masing-masing memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Satu hal yang pasti, persoalan penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, aparat penegak hukumnya, fasilitasnya, serta masyarakat yang diaturnya. Apabila terjadi kepincangan pada salah satu unsur, akan mengakibatkan seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.¹³

Dilihat dari minimnya jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi dibawa ke pengadilan, jelas merupakan gambaran negatif bagi penegakan hukum lingkungan jika dibandingkan dengan banyaknya kasus lingkungan yang terjadi, dan hampir setiap saat diangkat ke permukaan melalui berbagai media massa. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ternyata ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan tersebut, antara lain:

1. Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan.

Materi hukum merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum. Dalam posisi yang demikian, maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Hukum lingkungan yang ada pada saat ini (UUPLH) ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebar. Ketentuan-ketentuan pidana lingkungan dalam berbagai produk perundang-undangan. Selain itu perubahan yang ada di dalam UUPLH hanya terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ("undang-undang payung") tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari

¹³ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

undang-undang payung itu sendiri di masa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan inilah yang menyebabkan kesimpangsiuran penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan terutama yang dilakukan oleh korporasi.

Ketidaksederhanaan perangkat peraturan perundangan di bidang lingkungan, dapat dikemukakan antara lain ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPH yang menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan *dilarang* melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun rumusan pasal ini memakai kata "*dilarang*", namun jika terjadi pelanggaran baku mutu lingkungan (BML) maupun kriteria baku kerusakan lingkungan (KBKL) tidak ada sanksi pidananya.

Di samping itu peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansial masih ada yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan perseorangan maupun korporasi, ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar oleh terpidana, tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bagi korporasi yang melakukan TPLH, merupakan kendala dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administrasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tidak diatur dalam UUPH, yang dikemukakan adalah hak untuk berperan

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (3). Selain itu bagian "Penjelasan" pasal yang seharusnya menjelaskan secara rinci, ternyata lebih banyak mencantumkan "cukup jelas" sehingga men.bingungkan pada proses penegakan hukum.

2. Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan.

Kuantitas dalam arti tercukupinya personil aparat penegak hukum, kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan.

Di dalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif maupun represif, masih kekurangan aparat PPNS pada instansi teknis terkait (Bapedal misalnya), sehingga mereka hanya menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan. Dalam hal terjadi pelanggaran yang beraspek pidana, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu masih dirasakan keterbatasan jumlah penyidik POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki kecakapan dan keterampilan teknis dalam penanganan kasus-kasus lingkungan, disamping adanya kelemahan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kelemahan di bidang implementasi ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas profesionalisme para pelaksana dan penegak hukum yang belum memadai. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa pencemaran (khususnya) dan kerusakan lingkungan biasanya terkait pada suatu zat (kimia) tertentu, bukan

merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.

Selain hal tersebut di atas, kurang berhasilnya penegakan hukum lingkungan juga dapat diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Artinya semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah pengaruh imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Memperhatikan praktek peradilan saat ini, masih sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Selengkap apapun peraturan perundang-undangan dan seterusnya apapun para penegak hukumnya, hanya akan menjadi benda mati apabila tidak diimbangi dengan moral dan integritas yang tinggi dari para penegak hukumnya.

3. Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum.

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum lingkungan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum lingkungan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan, sementara di sisi lain mereka hanya memikirkan keuntungan besar bagi korporasi (seperti PT. Artha Sapala dan PT. Adei Plantation). Sebenarnya para pengusaha tersebut mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan akibat yang akan timbul dari aktivitasnya, karena pengelolaan limbah maupun pembukaan lahan

perkebunan memerlukan teknologi tinggi dan dukungan para ahli di bidangnya, maka pekerjaan itu menjadi mahal dan akan mengurangi tingkat provit. Untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh, maka mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang lebih sederhana dengan biaya rendah.

Selain kesadaran hukum masyarakat, kelengkapan sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini akan berakibat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diragukan, dan mungkin dibantah oleh pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan dengan cara mengajukan hasil pemeriksaan di lapangan atau laboratorium yang berbeda, untuk menguntungkan diri dan korporasi. Seperti yang terjadi pada PT. Adei Plantation, pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari selalu dipadamkan pagi harinya oleh karyawannya di lapangan. Dari sejumlah saksi yang dihadirkan selama persidangan, termasuk saksi ahli mantan Menteri Kehakiman Muladi, tak seorangpun dapat membuktikan bahwa Gobi adalah pelaku maupun yang menyuruh membakar lahan. Keadaan demikian tentu saja merugikan ditinjau dari sudut kepentingan pembuktian, dan akan menimbulkan keraguan pada hakim tentang terpenuhi tidaknya unsur tercemar rusaknya lingkungan hidup sebagaimana dituduhkan jaksa kepada terdakwa. Kita tentunya tidak menginginkan karena keadaan ragu-ragu, hakim kemudian menerapkan asas *in Dubio Proreo* sehingga menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa, seperti yang pernah terjadi dalam penanganan kasus Sidoardjo beberapa tahun yang lalu. Di sinilah dituntut

kesiapan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI sebagai penyidik dalam perkara pidana untuk menemukan dan mengajukan alat bukti, yang dapat meyakinkan hakim atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup khususnya oleh korporasi.

Mengenai kendala penegakan hukum lingkungan ini, penulis berpendapat bahwa POLRI (sebagai penyidik) disibukkan dengan masalah penanggulangan tindak pidana konvensional, selama ini perkara yang mendapat prioritas untuk diselesaikan adalah tindak pidana korupsi, subversi disamping tindak pidana ekonomi (penyelundupan). Dengan demikian kedudukan hukum pidana di dalam penegakan hukum lingkungan hanya sebagai anak tiri, artinya jika terjadi kasus lingkungan cukup diselesaikan dengan musyawarah antara pemerintah setempat dengan korporasi melalui pengurusnya. Kemungkinan ini terjadi, karena kasus lingkungan memiliki dampak yang cukup luas pada proyek atau rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian membuktikan bahwa di Indonesia, tindak pidana yang dipandang serius dan membahayakan negara ialah korupsi, subversi dan tindak pidana ekonomi (penyelundupan).

Meskipun ada beberapa kendala di dalam penerapannya, apabila dikaji lebih lanjut pengaturan UUPH sudah diusahakan untuk mengadopsi dan mengadaptasi pada kecenderungan-kecenderungan internasional yang terjadi. Hal ini nampak dari beberapa hal penting yang diatur dalam UUPH tersebut, antara lain:

1. Keberadaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 40).
2. Pengaturan mengenai "*generic crimes*" yang bersifat tindak pidana materiil dalam Pasal 41, 42 dan 43, serta "*specific crimes*" yang bersifat tindak pidana formil dalam Pasal 44.
3. Dimuatnya ketentuan mengenai tindak pidana korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45, 46 dan 47.
4. Pengaturan mengenai sanksi berupa tindakan tata tertib dalam Pasal 47 yang merupakan suatu kemajuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH).
5. Apabila ketentuan pidana hanya diatur satu pasal dalam UULH yaitu Pasal 22, maka UUPLH mengaturnya dalam sembilan pasal yaitu Pasal 40 sampai dengan Pasal 48.

Dengan dimuatnya beberapa hal baru seperti tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tuntutan internasional untuk meningkatkan peran hukum pidana guna menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup telah ditanggapi secara proporsional melalui UUPLH. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut keterampilan penegak hukum lingkungan menguasainya untuk mengantisipasi jika terjadi dampak negatif dalam perjalanannya. Kemampuan teknis yang terbatas, dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pengadilan maupun pelaksanaan penegakan hukum administrasi. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan penegakan hukum

terkait, baik dari segi personil maupun sarana atau fasilitas pendukung yang mereka miliki. Dalam hal ini POLRI sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam menemukan dan mengajukan alat bukti tentang telah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu POLRI harus dapat menemukan alat-alat bukti dengan cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang.

B. KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TPLH

Sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah upaya rasional masyarakat di dalam melindungi masyarakat dari kejahatan.¹⁴ Oleh karena itu kebijakan hukum pidana (berikut sanksi pidananya) yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal juga harus bersifat rasional, demikian pula aplikasinya di dalam masyarakat.

Berkenaan dengan penerapan kebijakan hukum pidana di dalam masyarakat, Sudarto mengatakan bahwa dalam perwujudan dan bekerjanya hukum pidana di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga fase¹⁵, yaitu:

- a. fase pengancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pembentuk undang-undang.
- b. penjatuan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (korporasi).

¹⁴ Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach To Criminal Problem*, Rout Ledge & Kegan Paul, London, hal. 209.

¹⁵ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal. 62.

- c. pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi, biasanya berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan bisnis. Sejalan dengan pesatnya aktivitas ekonomi, bentuk-bentuk tindak pidana korporasipun semakin beraneka ragam. Yusuf Shofie memberikan contoh bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, antara lain penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau *automatic teller machine*, penyalahgunaan ijin perdagangan untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan (seperti kasus PT. Suti Kelola dan Firma Meredien Indonesia), penjualan saham palsu, penjualan rumah fiktif, obat yang tidak berfaedah atau berbahaya bagi konsumen, pencemaran lingkungan, dan sebagainya.¹⁶

Tindak pidana semacam ini sangat sulit diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum. Sulit diketahui karena dilakukan secara rahasia, bahkan sering korbannya tidak mengetahui kerugian yang dialaminya. Selain itu juga sulitnya mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut. Kesulitan dalam penegakan hukum akibat dari tindak pidana korporasi ini menurut Mardjono¹⁷ pertama, korporasi (sebagai pelaku kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha

¹⁶ Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 255.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, hal. 68.

perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. Lebih lanjut Mardjono mengatakan, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini bagi individu, terlihat hanyalah puncak gunung es saja. Contohnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya untuk saat ini tetapi masih akan dirasakan di kemudian hari.

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional (salah satunya adalah *International Meeting Of Experts On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994) yang menempatkan korporasi sebagai subjek TPLH, maka lembaga legislatif telah menempatkan korporasi sebagai subjek TPLH dan menuangkannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH).

Berdasarkan pertemuan para pakar internasional, dikemukakan bahwa nilai atau kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum pidana ialah lingkungan itu sendiri baik yang berupa *natural environment* maupun *cultural environment*. Selanjutnya dikemukakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan harus ditempuh secara gabungan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, dan dalam menggunakan hukum pidana dalam TPLH dimungkinkan adanya *corporate criminal responsibility*.¹⁸

¹⁸ Beberapa Hasil *International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994, disarikan oleh Barda Nawawi Arief, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995, hal. 1.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi (*Legal entity liability*), dalam pertemuan tersebut ditentukan sebagai berikut:¹⁹

1. Delik-delik yang dirumuskan dalam *generic crimes* dan *specific crimes* dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang individu maupun korporasi, dengan ketentuan bahwa delik itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi (korporasi itu).
2. Pertanggungjawaban korporasi terjadi apabila:
 - a. ada kesalahan manajemen dari korporasi itu dan telah terjadi *generic crimes*; atau
 - b. ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh korporasi itu.
3. Pertanggungjawaban korporasi dikenakan juga pada pertanggungjawaban perseorangan dari manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dari korporasi itu.
4. Pertanggungjawaban korporasi diterapkan tanpa memperhatikan apakah orang atau individu yang melakukan perbuatan atas nama korporasi itu telah diidentifikasi, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak.
5. Semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada korporasi.

Pada awal pembahasan Bab ini telah dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPH, pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:

1. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;

¹⁹ *Ibid*, hal. 6 – 7.

2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau
3. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

Apabila diuraikan, ketentuan Pasal 46 UUPH tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Satu hal yang perlu diperhatikan di dalam membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, adalah sistem perumusan yang menyatakan bahwa korporasi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Motivasi dari adanya sistem pertanggungjawaban korporasi ini, didasarkan kepada perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Ditetapkannya pengurus saja yang dapat dipidana ternyata tidak cukup, karena kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara akibat tindak pidana ekonomi dan tindak pidana lingkungan hidup, adalah lebih besar apabila dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan hal tersebut Roeslan Saleh mengatakan, dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Dengan kata lain "*deterent effect*" nya tidak dapat diharapkan dengan baik

apabila hanya pengurus saja yang dipidana.²⁰ Lebih lanjut Roeslan Saleh mengatakan, bahwa ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

Hal senada dikemukakan pula oleh Schaffmeister, dengan dasar arrest hukum perdata "*Kleuterschool Babel*" (Taman kanak-kanak Babel) dipertahankan bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada korporasi, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan dari korporasi.²¹

Dalam kondisi-kondisi bagaimana suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi, Nico Keijzer memberikan beberapa contoh sebagai berikut:²²

²⁰ Roeslan Saleh, 1982, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, hal. 17.

Berkenaan dengan TPLH, Van Strien mengatakan, norma-norma ketelitian atau kecermatan tertentu yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan juga akan sangat berperan dalam menetapkan batas-batas atau syarat penetapan korporasi sebagai pelaku delik. Faktor lain yang juga penting dalam penetapan korporasi sebagai pelaku adalah sifat, struktur dan bidang kerja korporasi. Semakin luas batas yang ditarik dari penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, semakin cepat korporasi dapat diperlakukan sebagai terdakwa (Van Strien, 1994, *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 295.

²¹ Schaffmeister, *et al*, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 279.

²² Nico Keijzer, 1997, *Fraud By Corporations*, terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang, hal. 126-127.

a. American Model Penal Code (MPC):

1. *If a legislative purpose to impose liability on corporations plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment; or*
(Apabila maksud pembuat undang-undang untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang melakukan atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan atau tugas atau pekerjaannya); atau
2. *If the offence consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporations by law; or*
(Apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian atau pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh undang-undang); atau
3. *If the commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of the directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.*
(Apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan atau disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan atau ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak atas nama korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas atau pekerjaannya).

b. Dutch Case Law (Yurisprudensi Belanda):

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara khusus ditujukan bagi korporasi.
2. Apabila korporasi berkewajiban mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi gagal berbuat demikian.
3. Apabila tindak pidana itu berhubungan dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan.

Namun demikian ada beberapa batasan yang menyebabkan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang oleh Peter Gillies diuraikan sebagai berikut:²³

- a. apabila "*a responsible officer*" dari perusahaan, tidak dapat dipandang sebagai melakukan delik dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melakukan perbuatan untuk korporasi;
- b. apabila sifat atau hakiki perbuatan tidak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mampu dilakukan oleh perusahaan, misal perkosaan (*rape*), penyerangan seksual (*sexual assault*), sumpah palsu (*perjury*), dan bigami (karena perusahaan tidak dapat menikah).

Menurut Peter Gillies, ada batas-batas tindak pidana mana yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Tentang hal ini diberikannya contoh bahwa di Inggris, korporasi pernah

²³ Petter Gillies, 1990, *Criminal Law*, terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang, hal. 135.

dihukum sebagai pembantu (*accessory*) untuk tindak pidana yang menyebabkan kematian karena “*dangerous driving*” (Robert Millar (*contractors*) Ltd., 1970). Dengan melihat faktanya, dapat diperdebatkan bahwa perusahaan dapat dihukum sebagai “*a principal*”. Faktanya ialah, korporasi memiliki lori/truk dan mempekerjakan sopir. Lori/truk itu keluar dari jalan raya, ketika salah satu bannya dalam kondisi tidak sempurna/rusak dan berbahaya. Ban itu kemudian pecah, dan terjadilah tabrakan fatal.

Perundang-undangan di Inggris sekarang ini mengakui bahwa perbuatan dan sikap batin dari orang-orang tertentu yang berhubungan erat dengan korporasi dan dengan pengelolaan urusan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Orang-orang itu dapat disebut sebagai “*senior officers*” dari korporasi. Doktrin yang disebut sebagai “*Direct Corporate Liability*” atau “*The Identification Doctrine*” ini merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Oleh karena korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi, sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi korporasi. Lebih spesifik dikatakan, bahwa tindak pidana dan kesalahan atau sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.²⁴

²⁴ *Ibid*, hal. 139.

Sehubungan dengan kasus Robert Millar (*contractors*) Ltd. diatas, maka dapat dikemukakan bahwa dasar pertanggungjawaban yang diterapkan pada korporasi yang bersangkutan adalah doktrin *Direct Corporate Liability* atau *The Identification Doctrine*.

Di samping itu, doktrin pertanggungjawaban langsung (*direct liability doctrine*) juga menunjuk pada "*alter ego/identification doctrine*" atau "*the primary corporate liability doctrine*", yang diatribusikan pada tiga putusan Inggris pada tahun 1944 yaitu:²⁵

a. Kasus *D.P.P.V. Kent and Sussex Contractors Ltd.* (1944)

Dalam kasus ini, pengadilan mempertanggungjawabkan korporasi atas tindak pidana tentang peraturan pendistribusian bensin yang mensyaratkan bukti adanya unsur "sengaja menipu" ("*intent to deceive*"). Kesengajaan itu ada pada "*transport manager*". Hakim Viscount Caldecote mempertimbangkan, bahwa sikap batin jahat dari manajer itu dapat diatribusikan kepada korporasi dan diperlakukan sebagai sikap batin jahat dari korporasi dengan menyatakan: "walaupun para direktur dan pimpinan umum korporasi adalah para agen, mereka lebih dari itu. Suatu korporasi mampu berbuat, berbicara, maupun berpikir seperti yang diperbuat, dibicarakan atau dipikirkan oleh para manajernya."

²⁵ *Ibid*, hal. 140 – 141.

b. Kasus *I.C.R. Haulage Ltd.* (1944)

Pengadilan banding dalam kasus ini memperkuat penghukuman kepada pembanding korporasi, direktur manajer dan orang-orang lain, atas perbuatan melakukan “konspirasi untuk penipuan” (“*conspiracy to defraud*”). Pengadilan mengemukakan, bukti-bukti membenarkan penemuan bahwa perbuatan-perbuatan dari direktur manajer merupakan perbuatan dari korporasi, dan penipuan dari orang itu merupakan penipuan dari korporasi. Dalam hal-hal khusus, tindak pidana dari agen, termasuk sikap batinnya, kesengajaan, pengetahuan atau keyakinannya merupakan perbuatan dari korporasi, harus bergantung (antara lain) pada kedudukan dari pejabat atau agen itu.

c. Kasus *Moore V.I. Bresler Ltd.* (1944)

Putusan pengadilan dalam kasus ini mengemukakan hal serupa. Kasusnya adalah penyembunyian (*submission*) pengembalian pajak perdagangan (*purchase tax*) yang dilakukan dengan “sengaja menipu” (“*intent to deceive*”). Sekretaris dan manajer penjualan dari sebuah korporasi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dengan kesengajaan yang demikian. Hakim Viscount Caldecote mengemukakan: “Kedua orang ini merupakan pejabat/staf penting dari korporasi, dan oleh karena itu perbuatan mereka adalah perbuatan korporasi.”

Putusan-putusan lain yang juga memandang bahwa pejabat senior dari suatu korporasi dipandang sebagai korporasi, dan perbuatannya dipandang

sebagai perbuatan korporasi adalah perkara *H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd. V.T.J. Graham & Sons Ltd.* (1957) dan perkara *Tesco Supermarkets Ltd. V. Natrass* (1972). Di samping itu doktrin "*direct liability*" juga diakui oleh pengadilan-pengadilan Australia, antara lain dalam kasus *Universal Telecast-ers (Qld) Ltd. V. Guthrie* (1977).

2. Pertanggungjawaban pidana pengurus

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

Mengenai hal ini Roëslan Saleh²⁶ mengatakan, tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Menurut A.Z. Abidin²⁷, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tetapi pengurus yang bertanggung jawab adalah berdasarkan kepada anggapan, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia secara fisik

²⁶ Roëslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, *op cit*, hal. 16.

²⁷ A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 63. Menurut Schaffmeister, seorang pemimpin yang bertindak sendiri, walaupun mungkin menurut kebiasaan berbicara ditafsirkan sebaliknya, dapat juga dianggap telah memimpin perbuatan yang terlarang yang telah dilakukan oleh korporasi (Schaffmeister, *Hukum Pidana*, *op cit*, hal. 287).

dalam keadaan nyata dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Dengan demikian tidak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pengawas atau pengurus ini Nico Keijzer memandang tidak hanya atas nama pribadi, tetapi juga dari sudut peranannya di dalam korporasi²⁸, yaitu:

a. American Model Penal Code (MPC):

Dalam hal kewajiban melakukan sesuatu dibebankan oleh undang-undang kepada korporasi ..., setiap agen korporasi yang mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan kewajiban itu bertanggung jawab untuk pelanggaran atau pengabaian secara sembrono atas kewajiban itu, sama seperti apabila kewajiban itu dibebankan secara langsung kepadanya oleh undang-undang.

b. Yurisprudensi Belanda menetapkan, pengurus dapat dipidana apabila:

1. ia tahu, bahwa pelanggaran itu sedang terjadi, dan
2. ia dapat dan seharusnya campur tangan, tetapi gagal berbuat demikian.

Dalam hal seseorang dapat dipandang mengetahui bahwa perbuatan itu telah terjadi, cukup apabila ada *dolus eventualis*, cukup ia menyadari hakikat dari perbuatan itu. Sedangkan tindakan yang seharusnya diambil oleh pengurus, tidak cukup bahwa ia telah memerintahkan tindak pidana itu

²⁸ Nico Keijzer, *Froud By Corporations*, *opcit*, hal. 127-128.

dihentikan, karena ia juga harus mengontrol bahwa perintahnya telah dipatuhi secara tepat; untuk mempertanggungjawabkan pengurus, tidak disyaratkan bahwa korporasi masih tetap ada; tidak disyaratkan bahwa pengurus atau pengawas itu adalah pegawai dari korporasi itu.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pengurus, Peter Gillies²⁹ mengemukakan suatu doktrin yaitu *vicarious liability* dengan mengatakan, bahwa pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah "*employment principle*".

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Oleh Peter Gillies diberikan contoh, bahwa di Australia tidak ada keraguan "*the vicar's criminal act*" (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan "*the vicar's guilty mind*" (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *viarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Sedangkan di Inggris, "*a guilty mind*" hanya dapat dihubungkan dengan majikan apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang. Hal ini nampak pada dua putusan Inggris sebelum tahun 1944, yaitu perkara *Mousell Bros Ltd. V. London* dan kasus *North-Western Railway* (1917).

Bertolak dari "*employment principal*" dalam hubungannya dengan *vicarious liability*, dapat dibuat suatu proposisi bahwa "suatu perusahaan dapat

²⁹ Peter Gillies, *Criminal Law*, *opcit*, hal. 135-137.

bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya.

Mengenai doktrin *vicarious liability* ini, John C. Coffee mengemukakan beberapa kritik mengenai ide pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:³⁰

- a. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*), karena pembenarannya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
- b. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
- c. *Vicarious liability* menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
- d. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.

³⁰ John C. Coffee, 1983, *Corporate Criminal Liability*, dalam Sanford H. Kadish: *Encyclopedia of crime and justice* terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang, hal. 160-161.

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (kedua-duanya)

Dasar dari pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan perkembangan korporasi itu sendiri, ternyata untuk beberapa tindak pidana ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Sebagai contoh adalah tindak pidana ekonomi, tidak mustahil denda yang dijatuhkan sebagai pidana kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Oleh karena dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan mustahil dapat memenjarakan korporasi, maka harus dicari jenis pidana lain supaya korporasi mentaati ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut Loebby Loqman mengemukakan pendapat³¹, apabila suatu korporasi melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kemungkinan pertama adalah manusianya, kemungkinan kedua korporasinya dan kemungkinan ketiga kedua-duanya.

Menurut Mardjono Reksodiputro³², hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa

³¹ Loebby Loqman dalam Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, hal. 14.

³² *Ibid*, hal. 15.

denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum), dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat pula semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari kedua doktrin di atas (doktrin "*identification*" dan doktrin "*vicarious liability*"), yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, dan dikenal dengan istilah "*Companies offence*", "*situational offence*", atau "*strict liability offences*"³³. Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu tindak pidana bagi:

- a. korporasi yang menjalankan usaha tanpa ijin;
- b. korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;
- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengayoman masyarakat terhadap tindak pidana korporasi, John C. Coffee mengatakan bahwa:

1. hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan atau menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bahan Kuliah Umum FH Unswagati, Cirebon, 17 Juni 2002, hal. 15.

2. hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata, dengan pidana restitusi lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana, apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.³⁴

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ini menurut penulis, penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasinya sendiri adalah perlu. Hal ini disebabkan kerugian yang diakibatkan oleh macam tindak pidana ini sangat besar baik untuk individu, masyarakat maupun negara, dan dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia, seyogyanya hal tersebut tidak dilupakan. Pilihan digunakannya pidana denda terhadap korporasi bukanlah tanpa alasan. Dari sudut pandang ekonomi, pidana denda tersebut sangat menarik, karena langsung ditujukan pada hasrat untuk mencari atau memperoleh keuntungan calon pelaku. Di samping itu merupakan pidana dengan biaya murah, sedangkan dari sudut ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana kita ketahui, UUPLH memuat beberapa ketentuan baru yang merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982. Hal ini sebenarnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan

³⁴ John C. Coffee, *Corporate Criminal Liability*, *opcit*, hal. 163.

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan generasi mendatang.

Materi yang diatur dalam undang-undang tentang lingkungan hidup mencakup hal yang sangat luas, dan tidak mungkin tercakup di dalam satu ketentuan undang-undang. Oleh karena itu ditempuh pengaturan secara pokok yang hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsipnya saja, karena dengan cara demikian UUPH merupakan “ketentuan payung” (*umbrella act, umbrella provision*).

Namun jika diperhatikan kembali mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 46 UUPH ternyata masih menjadi permasalahan, apakah ketentuan Pasal 46 tersebut juga dapat berlaku bagi semua TPLH yang diatur di luar UUPH. Berkenaan dengan hal ini Barda Nawawi Arief mengemukakan³⁵, bahwa di dalam UUPH tidak terlihat rambu-rambu ketentuan yang menyatakan Pasal 46 ini dapat berlaku umum untuk semua TPLH di luar UUPH. Bahkan di dalam ketentuan penutup Pasal 50 ditegaskan bahwa semua perundang-undangan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Atas dasar ketentuan Pasal 50 tersebut, dapat dijelaskan bahwa sistem hukum lingkungan berdasarkan UUPH adalah pertama, undang-undang ini tetap mengakui berlakunya ketentuan hukum yang dimuat dalam setiap perundang-undangan pada masing-masing sektor, misalnya sektor perindustrian, kehutanan, pertambangan dan energi, pengairan dan sebagainya, selama ketentuan hukum tersebut belum dicabut

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, opcit, hal. 116.

atau diganti dengan ketentuan hukum baru berdasarkan UUPH. Kedua, ketentuan hukum sektoral yang mengatur aspek lingkungan hidup harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan asas dan kaidah hukum menurut UUPH. Ketiga, UUPH memuat konsep pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat menyeluruh. Oleh sebab itu UUPH menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini sudah berlaku.

Apabila melihat hal tersebut di atas, maka ketentuan itu jelas tidak sejalan dengan ide UUPH sebagai “undang-undang payung”. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pembuatan atau perumusan ketentuan UUPH tidak saja dilihat dan menjadi masalah bagi pencari keadilan, namun juga dirasakan oleh aparat penegak hukum. Menurut hemat penulis, implementasi dari undang-undang tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang lingkungan, sudah waktunya para pakar hukum pidana meneliti dan membereskan permasalahan ini.

UUPH yang mulai berlaku pada tanggal 17 September 1997, dewasa ini memasuki usia lima tahun. Harapan bahwa undang-undang ini mampu menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH), ternyata semakin jauh dari kenyataan. Para konseptor UUPH juga tidak berupaya mempromosikan produknya, bahkan mengakui tentang tidak efektifnya UUPH tersebut. Jangka

waktu pemberlakuan undang-undang tersebut menurut Muladi³⁶, menunjukkan bahwa pengaturan TPLH yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana, yakni perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib (*treatment*).

Mengingat kiprah peranan korporasi makin besar dalam pembangunan di bidang ekonomi, maka wajar apabila perhatian khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana. Sebab bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aktivitas korporasi yang termasuk dalam ruang lingkungan *public welfare offences* telah menjadi realitas.

Berkenaan dengan penggunaan sarana hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan TPLH, hakim pada Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan pendapat bahwa korporasi dan pengusaha dapat dijatuhi pidana. Adapun alasan yang dikemukakan adalah, TPLH yang dilakukan oleh korporasi bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas. Sedangkan bentuk pidana yang lebih tepat dijatuhkan pada korporasi berupa pidana denda, dan bagi pengusaha diterapkan pidana penjara. Selanjutnya ditambahkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai *ultimum remedium*, apabila upaya-upaya yang lain (seperti pemberian ganti rugi, perbaikan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sebagainya) telah dapat

³⁶ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, *opcit*, hal. 191.

menyelesaikan permasalahan yang timbul. Apabila pidana denda dijatuhkan terhadap korporasi, sebaiknya diperhitungkan sampai seberapa jauh pengaruh yang diharapkan, yaitu untuk mencegah terjadinya TPLH oleh korporasi yang lain. Segi lain yang perlu dipertimbangkan, apabila korporasi yang bersangkutan dikenakan tindakan penghentian kegiatan (baik untuk sementara maupun untuk selamanya) adalah pengaruh tindakan tersebut terhadap karyawan. Karyawan korporasi mulai tingkat menengah ke bawah, merupakan kelompok utama yang paling terkena oleh sanksi tersebut jika dibandingkan dengan pengusahanya. Namun dalam prakteknya hakim mengatakan hingga saat ini tidak ada atau belum ada sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi atas kasus-kasus TPLH.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah penulis uraikan di atas serta pendapat para hakim mengenai pemberian sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan TPLH, dan memperhatikan perkembangan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana, penulis berpendapat bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka seyogyanya diatur secara lengkap dan terperinci hal-hal yang berhubungan dengan sistem pidanaan atau pertanggungjawaban pidana korporasi dalam setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif.

Kelangkaan pidanaan korporasi sejak dulu, kini, bahkan mungkin pada masa mendatang, tidak hanya disebabkan oleh penegak hukum, tetapi disebabkan pula oleh ketidakjelasan mengenai rumusan “kapan suatu korporasi dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana atau dilakukan atas nama korporasi.”

Ketidakjelasan rumusan undang-undang berpengaruh besar terhadap fungsionalisasi hukum pidana terhadap upaya penanggulangan perbuatan tercela korporasi.

Mengenai kapan korporasi dapat dikatakan melakukan TPLH, Pasal 46 ayat

(2) UUPLH mengatur sebagai berikut:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila ada orang atau orang-orang berdasarkan hubungan kerja dan dalam lingkungan korporasi itu melakukan sesuatu perbuatan yang menurut undang-undang tersebut merupakan tindak pidana.

Dalam kaitan ini perlu dikemukakan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang memberikan contoh Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang seolah-olah menjelaskan kapan suatu korporasi itu dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan perumusan yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu tindak pidana ... dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, ... jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum,

Dengan adanya kata-kata “dilakukan juga” jelas bahwa perumusan tersebut hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh korporasi, tetapi dianggap telah dilakukan juga oleh korporasi. Jadi perumusan tersebut tidak menjelaskan pengertian kapan korporasi itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana.³⁷ Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut:

“suatu tindak pidana ... dilakukan oleh korporasi atau atas nama korporasi, apabila ... (misalnya: dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada korporasi yang bersangkutan).

Apabila melihat penjelasan Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi: Ayat (2) menentukan dalam hal-hal mana suatu tindak pidana ekonomi **dianggap** dilakukan oleh badan hukum ... dan seterusnya.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya, ternyata belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh korporasi. Hanya dikatakan batasan atau ukurannya yang disebutkan, yaitu:

- a. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
- b. berdasarkan bertindak dalam lingkungan korporasi.³⁸

³⁷ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi A., 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 134-135.

³⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, hal. 74 – 75.

Dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja”, Suprpto menyatakan, bahwa ini adalah suatu fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu. Selanjutnya Suprpto mengatakan, keganjilan lebih menonjol, bilamana dipergunakan dasar “hubungan lain” yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commissie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut.³⁹

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UUPH maka korporasi, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dapat melakukan tindak pidana, hanya saja tidak dinyatakan secara rinci kapan korporasi tersebut dikatakan melakukan tindak pidana. Menurut hemat penulis untuk menentukan kapan korporasi dapat melakukan TPLH, hal itu dilihat dari perumusan Pasal 1 angka 12 dan angka 14 UUPH mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Secara yuridis yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup dalam undang-undang ini adalah, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan-kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 12 UUPH).

³⁹ *Ibid.*

Selanjutnya perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 14 UUPH).

Apabila kita bandingkan dengan beberapa perbuatan yang dapat disebut sebagai TPLH sebagaimana diatur di dalam UUPH di atas, beberapa materi dari standar minimal Internasional telah tercakup di dalamnya. Adapun standar minimal tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. dengan sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran udara ("air"), tanah, kumpulan/sumber air alam ("water bodies") atau ruang angkasa; atau dengan sengaja merusak unsur-unsur/komponen lingkungan yang sangat penting;
- b. dengan sengaja memasukkan benda/zat tanpa wewenang ("unauthorized") ke dalam udara, tanah, sumber/kumpulan air alam atau ruang angkasa yang menyebabkan kerusakan berat bagi orang, binatang atau tanaman;
- c. dengan sengaja membuang, mengeksport atau mengimpor limbah berbahaya dengan melanggar ketentuan internasional, nasional maupun tanpa izin yang diperlukan ("necessary permit");
- d. dengan sengaja:
 1. mengoperasikan instalasi yang berbahaya, atau
 2. memperdagangkan, mengeksport atau mengimpor bahan-bahan radioaktif tertentu atau bahan-bahan kimia atau biologis tertentu lainnya yang berbahaya,

⁴⁰ Beberapa Hasil *International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment*, *opcit*, hal. 4.

dengan melanggar ketentuan internasional, larangan-larangan nasional atau tanpa ijin yang diperlukan, yang menyebabkan pencemaran udara, tanah, kumpulan/sumber air alam atau ruang angkasa atau menyebabkan kerusakan berat bagi orang, binatang atau tanaman.

Apabila diperhatikan formulasi TPLH yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 14 di atas, ternyata tidak jauh berbeda bahkan dapat dikatakan sama dengan perumusan di dalam UULH Nomor 4 Tahun 1982. Oleh karena itu sama halnya dengan UULH, beberapa kalangan menilai bahwa perumusan tersebut di atas kurang tepat. Diantaranya Siahaan yang memberikan penilaian bahwa perumusan tersebut agak lemah⁴¹, karena hanya mengatur masalah lingkungan hidup yang “over aktif” saja, yaitu hanya mengkaitkan pada pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga kurang menjangkau luas kepentingan hidup yang lain.

Berkenaan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief mengemukakan, kapankah dikatakan ada “perubahan lingkungan”, “menurunnya kualitas lingkungan sampai derajat tertentu”, atau “lingkungan menjadi kurang/tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya atau dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan?” Untuk membuktikan hal itu jelas diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang jelas.⁴² Di samping itu ada yang menilai bahwa perumusan Pasal 1 angka 12 (istilah “komponen lainnya”) terlalu luas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

⁴¹ Siahaan, N.H.T, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, hal. 206.

⁴² Barda Nawawi Arief dalam Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, opcit, hal. 40.

Memang disadari untuk merumuskan TPLH yang terperinci dan menyangkut segi-segi ini tidak mudah. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri⁴³, materi mengenai bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi dari ruang angkasa sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati dan sumber daya buatan. Bidang yang demikian luas tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa.

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Mardjono, bahwa merumuskan delik lingkungan bukanlah mudah, tapi perumusan yang terpaksa bersifat umum, kurang tegas dan terinci akan mengandung bahaya, bahwa ketentuan pidana yang perumusannya bersifat umum itu akan dapat menghilangkan makna asas legalitas.⁴⁴

Asas legalitas memberikan syarat bahwa perilaku yang diharuskan ataupun dilarang yang atas pelanggaran diancam dengan suatu pidana harus memiliki kadar ketetapan atau kekekalan tertentu, karena tanpa itu kepastian hukum yang merupakan tujuan utama asas legalitas tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu perumusan mengenai TPLH di dalam UUPLH, seyogyanya bermanfaat dan dapat memberikan kewenangan bagi hakim untuk menyesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam suatu lingkungan hidup di suatu tempat, dan daerah tertentu serta perkembangan teknologi (dapat menjadi tantangan bagi hakim untuk menciptakan

⁴³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 67.

⁴⁴ Dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 326.

yurisprudensi dalam menangani kasus-kasus TPLH, khususnya yang dilakukan oleh korporasi).

Di dalam merumuskan tindak pidana dalam perundang-undangan lingkungan, Muladi berpendapat⁴⁵ hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen yakni elemen material (*material element*) yang mencakup (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada. Sedangkan elemen mental (*mental element*) mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, *recklessness* (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Lebih lanjut dikemukakan oleh Muladi, bahwa pembagian seperti ini biasa dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon, sedangkan Indonesia yang lebih banyak dipengaruhi sistem hukum Kontinental membedakan kategori-kategori kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Pendapat yang dikemukakan oleh Muladi di atas sejalan dengan salah satu rancangan resolusi yang dihasilkan dalam Kongres Hukum Pidana ke 25, yang mengangkat masalah tindak pidana lingkungan yang diadakan di Brazil tahun 1994. Di dalam rancangan resolusi ini dicantumkan bahwa unsur materiil minimum dalam ketentuan mengenai lingkungan yang dapat dijatuhi sanksi pidana adalah:

1. suatu perilaku (komisi maupun omisi) yang menyebabkan kerugian serius terhadap lingkungan;

⁴⁵ Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, *op cit*, hal. 20 – 21.

2. suatu perilaku (omisi maupun komisi) yang bertentangan dengan standar lingkungan yang ada, yang menyebabkan ancaman nyata dan konkrit terhadap lingkungan.

Untuk menghindari adanya misinterpretasi hukum, “kerugian yang serius ini menurut Harkristuti Harkrisnowo⁴⁶ perlu mendapat penjabaran lebih lanjut dalam peraturan nasional. Namun resolusi tersebut menghimbau agar ketentuan perundangan nasional dengan tegas menetapkan perbedaan antara:

1. sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggaran standar administratif; dan
2. sanksi pidana yang dijatuhkan untuk mencegah dan memidana perilaku yang telah menyebabkan kerugian serius terhadap lingkungan hidup.

Penggunaan sanksi pidana seperti yang selama ini ada, menurut Barda Nawawi Arief umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan/kebebasan atau harta benda manusia. Sumber utama dari pencemaran/ perusakan lingkungan adalah manusia itu sendiri, sedangkan hakikat pencemaran/ perusakan lingkungan adalah adanya “ketidaksamaan” atau “ketidakseimbangan” dalam lingkungan hidup manusia itu sendiri. Adapun faktor menonjol yang dapat mengguncangkan atau mengganggu keseimbangan itu adalah perkembangan teknologi dan ledakan penduduk. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan, terhadap faktor yang menonjol ini jelas sanksi pidana tidak dapat berbuat banyak. Oleh karena itu yang penting adalah memilih dan menetapkan pidana apa yang paling tepat.⁴⁷

⁴⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Peran SPP Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan*, Makalah Seminar Nasional, Medan 7-8 Januari 1997, hal. 7.

⁴⁷ Dalam Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, opcit, hal. 131-132.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴⁸

- a. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Untuk memenuhi tujuan itu, perlu disediakan pelbagai alternatif yang dapat dipilih oleh hakim dalam menentukan jenis-jenis pidana yang pantas diterapkan kepada pelaku dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya, pelakunya, kesan masyarakat terhadap kejahatan, berat ringannya korban/kerugian dan proyeksi efektivitas ppidanaan.

Sebagaimana diketahui dari pertemuan para pakar internasional di Portland, Oregon, USA pada 19-23 Maret 1944 bahwa semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara dapat dikenakan kepada korporasi. Sedangkan sanksi untuk TPLH dapat berupa:⁴⁹

1. penjara (*imprisonment*);
2. sanksi bernilai uang (*monetary sanctions*):
 - a. mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh terpidana sebagai hasil dari kejahatannya;

⁴⁸ *Ibid*, hal. 165.

⁴⁹ Beberapa Hasil *International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment*, *opcit*, hal. 6-10.

- b. mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang disebabkan oleh terpidana;
 - c. denda.
3. pidana tambahan, berupa:
- a. larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
 - b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan ijin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
 - c. perampasan kekayaan (*property/asset*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid (jujur/dapat dipercaya/beritikad baik);
 - d. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
 - e. memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi/membatalkan petugas dari jabatannya;
 - f. memerintahkan terpidana melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
 - g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat/kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin perbuatan baik terpidana, dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan kejahatan lingkungan lainnya;

- h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- j. memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk mengungkap/memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya;
- k. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*).

Mengenai pertanggungjawaban korporasi ini, John C. Coffee mengungkapkan⁵⁰ beberapa kritik telah meragukan apakah korporasi itu sendiri dapat dicegah dengan pidana. Namun suatu evaluasi memberikan kesimpulan lain bahwa korporasi cenderung menerima sangat sedikit denda dibandingkan dengan ukuran/besarnya korporasi, penghasilannya ataupun keuntungan yang diharapkan diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu adalah sulit untuk menegaskan bahwa korporasi tidaklah perlu dipidana dan bahwa mereka tidak perlu dicegah.

Di dalam "Criminal Law" Peter Gillies mengatakan⁵¹, bahwa korporasi dapat melakukan banyak tindak pidana dengan batasan-batasan tertentu. Salah satu

⁵⁰ John C. Coffee, *Corporate Criminal Liability*, *opcit*, hal. 162.

⁵¹ Peter Gillies, *Criminal Law*, *opcit*, hal. 134.

pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Lebih lanjut dikatakan, secara normal pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah pidana denda. Oleh karena itu apabila suatu tindak pidana hanya diancam pidana penjara tidaklah mungkin dikenakan kepada perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat suatu masalah dimana pidana bagi korporasi cenderung dikenakan pada orang/pihak yang tidak bersalah, tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada pegawai, kreditor, masyarakat sekitar dan juga bagi konsumen yang mungkin mengganti kerugian korporasi apabila denda dilihat sebagai biaya bisnis. Masalah ini menyarankan keinginan untuk meminimalkan ppidanaan bagi korporasi. Sejumlah usulan misalnya penggunaan denda yang wajar (*an equaty fine*) yang dipungut/ditarik dalam saham umum akan mencegah kebangkrutan korporasi dan meniadakan kerugian bagi bukan pemegang saham, sementara juga menekan perubahan pengawasan korporasi agar mengaktifkan manajemen. Hal yang sama, pidana berupa pengawasan korporasi (*corporate probation*) telah direkomendasikan yaitu penggunaan sanksi publisitas (*a publicity sanction*) dan sanksi berupa pelayanan masyarakat (*community service*). Selanjutnya usul-usul tersebut menyarankan bahwa masalah pertanggungjawaban korporasi dapat dan seharusnya dipecah/dipisahkan dari bentuk ppidanaan korporasi yang optimal. Sebaliknya pertanggungjawaban korporasi mempermudah ppidanaan terhadap terdakwa individual.⁵²

⁵² John C. Coffee, *Corporate Criminal Liability*, *opcit*, 162-163.

Memperhatikan kembali Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, maka jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan tindak pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda. Dari jenis pidana pokok tersebut, hanya pidana denda yang paling tepat dan sesuai diterapkan terhadap korporasi yang melakukan TPLH. Selain pidana denda, beberapa sanksi berupa tindakan tata tertib yang pada hakikatnya merupakan jenis pidana tambahan di dalam KUHP sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 UUPLH, sesungguhnya dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya dijadikan pidana tambahan yang dijatuhkan secara mandiri. Menurut hemat penulis, apabila pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana pokok untuk orang (dalam hal ini pengurus korporasi), maka pidana pokok untuk korporasi yang identik dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa "perampasan keuntungan" (Pasal 47 sub a) yang diperoleh dari tindak pidananya atau aktivitas usaha korporasi, maupun "penutupan perusahaan" (Pasal 47 sub b) baik untuk sebagian atau seluruhnya.

Di samping itu, dapat dipermasalahkan pula apakah Pasal 47 tersebut dapat diberlakukan terhadap TPLH di luar UUPLH? Mengenai hal ini Barda Nawawi Arief mengemukakan⁵³, apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dimaksudkan sebagai "undang-undang payung" sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, seyogyanya sanksi berupa tindakan tata tertibpun berlaku untuk semua TPLH yang diatur dalam perundang-undangan sektoral. Namun ketentuan di dalam UUPLH tersebut tidak ada rambu-rambu yang menyatakan, bahwa sanksi tindakan

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, opcit, hal. 121.

tata tertib itu dapat diberlakukan juga untuk semua TPLH di luar UUPLH. Bahkan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 50 UUPLH menegaskan, bahwa **“pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.”** (cetak tebal penulis). Oleh karena itu dikatakan lebih lanjut oleh Barda Nawawi Arief, sepanjang perundang-undangan lingkungan sektoral belum diganti sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, maka ketentuan mengenai sanksi tindakan tata tertib belum dapat diterapkan untuk semua TPLH di luar UUPLH.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai pidana denda untuk korporasi. Di dalam Pasal 45 UUPLH ditentukan, apabila tindak pidana dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Namun patut disayangkan pembuat undang-undang tidak membuat suatu ketentuan yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan pidana denda ini apabila tidak dibayar oleh korporasi yang bersangkutan, bahkan di dalam penjelasannyapun dikatakan “cukup jelas.” Apabila pidana jenis ini diaplikasikan ke dalam kasus-kasus konkrit, sudah barang tentu menimbulkan permasalahan. Menurut hemat penulis, seyogyanya ada ketentuan khusus tentang pelaksanaan apabila korporasi tidak melaksanakan kewajiban membayar pidana denda. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi

Arief⁵⁴, ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan tidak dapat diterapkan untuk korporasi.

Sebagai bahan perbandingan mengenai pemanfaatan sanksi pidana dalam masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dapat dilihat upaya-upaya yang telah dilakukan di Amerika Serikat, antara lain:

a. *The independent use of the criminal sanction;*

Penggunaan sanksi pidana yang secara langsung melarang kegiatan pencemaran lingkungan, yakni dengan merumuskan bahwa melakukan kegiatan yang terus-menerus mencemarkan air, udara, dan tanah merupakan suatu tindak pidana;

b. *The dependent-direct use of the criminal sanction;*

Pemanfaatan sanksi pidana terbatas, yakni dengan menetapkan ambang batas zat polutan yang dapat dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya. Pelanggaran terhadap ambang batas inilah yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

c. *The dependent-indirect approach of the criminal sanction;*

Pendekatan ini mereservasi sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 171.

J.C. Oudijk mengemukakan pendapat, bahwa kita tidak mungkin hanya mengandalkan pidana denda. Terlebih lagi, semakin sedikit uang yang dimiliki terpidana, semakin kecil pengaruh peningkatan denda maksimum yang diancamkan terhadapnya. Di samping itu denda maksimum hanya dapat ditingkatkan sampai batas maksimum tertentu. Karena itu jenis-jenis pidana lain tetap harus didayagunakan sebagai pidana tambahan (*Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, opcit, hal. 407).

d. *The preventive use of the criminal sanction;*

Hukum yang digunakan dalam hal ini menentukan langkah-langkah preventif dan protektif apa saja yang harus dilakukan oleh suatu korporasi untuk melindungi lingkungan (misalnya menyaring limbah cair, menempatkan saringan udara sebelum asap dikeluarkan dan sebagainya).

Apabila langkah-langkah ini tidak dilakukan, maka sanksi pidana akan dijatuhkan.⁵⁵

Sedangkan Belanda, negara yang pa'ing maju dalam hal pengelolaan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak 1979 telah memiliki undang-undang payung untuk lingkungan yang dinamai *Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene* (Undang-undang Ketentuan Umum Kesehatan Lingkungan) Stb. 442 yang beberapa kali diubah dan terakhir pada 1990 Stb. 45. Undang-undang ini dilengkapi dengan perundang-undangan sektoral yang dimuat dalam *Wet of de Economische Delicten* (UUTPE). Karena umumnya undang-undang tersebut dimasukkan ke dalam UUTPE, dengan sendirinya sanksinya lebih bervariasi, mengandung pidana tambahan lebih banyak, sanksi tata tertib, dan wewenang jaksa yang lebih luas. Oleh sebab itu penyelesaian perkara lingkungan di Belanda melalui instrumen hukum pidana jauh lebih mudah dan lebih lancar daripada Indonesia yang tidak memasukkan tindak pidana lingkungan ke dalam UUTPE. Selain itu Belanda juga menambahkan rumusan tindak pidana lingkungan ke dalam KUHP pada 1989, yaitu Pasal 173a dan 173b (dalam Rancangan KUHP Baru Tahun 2000, Indonesia

⁵⁵ Harkristuti Harkrisnowo dalam Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, opcit, hal. 57-58.

juga memiliki saduran kedua pasal tersebut dan menempatkannya dalam Pasal 327, 328, 329 dan Pasal 330).

Beberapa keuntungan yang diperoleh apabila perundang-undangan lingkungan hidup dimasukkan ke dalam UUTPE, menurut penulis adalah:

1. jenis pidana dan tindakan tata tertib yang dapat diterapkan, tersedia lebih banyak sehingga jaksa dan hakim mempunyai banyak pilihan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan berat serta sifat pelanggaran.
2. Penyidik maupun jaksa memiliki wewenang yang lebih luas, antara lain penerapan tindakan tata tertib sementara sehingga penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat diatasi dengan cepat.
3. Dalam UUTPE dikenal lembaga penyelesaian di luar pengadilan, sehingga proses lebih cepat dan biaya ringan serta menguntungkan kedua belah pihak (penegak hukum dan pelanggar).
4. Instrumen administratif, perdata dan pidana yang ada di dalam UUTPE sesuai dengan hukum lingkungan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tindak pidana utama yang diatur adalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun maksimum ancaman pidana untuk:

- a. tindak pidana sengaja (*dolus*): 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, yang dapat diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat (Pasal 41);

- b. tindak pidana kelalaian (*culpa*): 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, yang dapat diperberat menjadi 5 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat (Pasal 42).

Apabila diperhatikan jumlah/lamanya sanksi pidana dalam UUPLH di atas lebih berat dari undang-undang lama (UULH), yang memuat maksimum ancaman pidana sebagai berikut:

- a. tindak pidana sengaja: 10 tahun penjara dan/atau denda 100 juta rupiah (Pasal 22 ayat 1);
- b. tindak pidana kelalaian: 1 tahun kurungan dan/atau denda 1 juta rupiah (Pasal 22 ayat 2).

Berdasarkan perumusan dari kedua undang-undang di atas dapat diketahui, bahwa UUPLH menganut sistem perumusan **kumulatif**, sedangkan UULH menganut sistem perumusan **kumulatif-alternatif**.

Dalam kaitannya dengan fungsi *umbrella act*/undang-undang payung dari UUPLH, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel mengenai jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan berat ringannya sanksi pidana (*strafmaat*) dari peraturan perundang-undangan sektoral di bidang lingkungan hidup.

Tabel 2

Sanksi Pidana dan Sistem Ancaman Pidana
Dalam Peraturan yang Berkaitan dengan
Lingkungan Hidup di Indonesia

No	UU PAYUNG DAN UU SEKTORAL LINGK. HIDUP	JENIS TP/ KETENT. YG DILANGGAR	JENIS & JUMLAH ANCAMAN PIDANA				SISTEM ANCAMAN PIDANA
			Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	
1.	UU No. 23/1997 (UUPH)	*Kejahatan:				Ps.47	
		- Ps. 41 (1)	10 th	-	500 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
		- Ps. 41 (2)	15 th	-	750 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
		- Ps. 42 (1)	3 th	-	100 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
2.	UU No. 5/1983 (ZEEI)	- Ps. 42 (2)	5 th	-	150 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
		*Kejahatan:					
		- Ps. 16 (1) jo. Ps. 5 (1), Ps. 6, Ps. 7.	-	-	225 jt	Perampasan sarana & hasil kejahatan	Tunggal
		- Ps. 16 (3)	10 th	-	100 jt	-	Kumulatif- alternatif
3.	UU No.5/1985 (UU PERINDUSTRIAN)	- Ps. 17 jo. Ps. 16 (1)	-	-	75 jt	-	Tunggal
		*Kejahatan:					
		- Ps. 24 (1) jo. Ps. 13 (1) dan Ps. 14 (1)	5 th	-	25 jt	pencabutan ijin usaha industri	alternatif
		- Ps. 25 jo. Ps. 17	2 th	-	10 jt	-	alternatif

No	UU PAYUNG DAN UU SEKTORAL LINGK. HIDUP	JENIS TP/ KEJENIT. YG DILANGGAR	JENIS & JUMLAH ANCAMAN PIDANA				SISTEM ANCAMAN PIDANA
			Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	
4.	UU No.9/1995 (UU Perikanan)	- Ps. 26 jo. Ps. 19	5 th	-	25 jt	Pencabutan ijin usaha industri	Alternatif
		- Ps.27 (1) jo. Ps.21 (1)	10 th	-	100 jt	-	Kumulatif-alternatif
		*Pelanggaran:					
		- Ps.24 (2) jo. Ps.13 (1) dan Ps.14 (1)	-	1 th	1 jt	Pencabutan ijin usaha industri	Alternatif
		- Ps.27 (2) jo. Ps.21 (1)	-	1 th	1 jt	-	Kumulatif-alternatif
		*Kejahatan:					
		- Ps.24 jo. Ps.6 (1) dan Ps.7 (1)	10 th	-	100 jt	Ps.29: perampasan benda yg digunakan untuk & dihasilkan dari TP seperti dimaksud Ps.24 s.d. Ps.27	Kumulatif-alternatif
		- Ps.25 jo. Ps.10, menggunakan kapal > 30 ton, menggunakan kapal < 30 ton	5 th	-	50 jt		Alternatif
			2,5 th	-	25 jt		Alternatif
		*Pelanggaran:					
5.	UU No.5/1990 (UU Konservasi)	- Ps.26 jo. Ps.10	-	6 bl	5 jt	-	Alternatif
		- Ps.27 (1) jo. Ps.4	-	-	25 jt	-	Tunggal
		- Ps. 27 (2) jo. Ps.20.	-	-	5 jt	-	Tunggal
		*Kejahatan:					
		- Ps.40 (1) jo. Ps.19 (1) dan Ps.33 (1)	10 th	-	200 jt	-	Kumulatif
		- Ps.40 (2) jo. Ps.21 (1 & 2) dan Ps.33 (3)	5 th	-	100 jt	-	Kumulatif
		*Pelanggaran:					
		- Ps.40 (3) jo. Ps.19 (1) dan Ps.33 (1)	-	1 th	100 jt	-	Kumulatif
6.	UU no.5/1992 (UU Benda Cagar Budaya)	- Ps.40 (4) jo. Ps. 21 (1 & 2) dan Ps.33 (3)	-	1 th	50 jt	-	Kumulatif
		*Kejahatan:					
		- Ps. 26	10 th	-	100 jt	-	Kumulatif-alternatif
		- Ps. 27	5 th	-	50 jt	-	Kumulatif-alternatif

No	UU PAYUNG DAN UU SEKTORAL LINGK. HIDUP	JENIS TP/ KETENT. YG DILANGGAR	JENIS & JUMLAH ANCAMAN PIDANA				SISTEM ANCAMAN PIDANA
			Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	
7.	UU No.21/1992 (UU Pelayaran)	* Pelanggaran: - Ps. 28	-	1 th	10 jt	-	Kumulatif- alternatif
		* Kejahatan: - Ps. 119 (1)	5 th	-	120 jt	-	Alternatif
		- Ps. 119 (2)	10 th	-	240 jt	-	Alternatif
		- Ps. 120	2 th	-	48 jt	-	alternatif

Memperhatikan perundang-undangan lingkungan sektoral sebagaimana diuraikan pada tabel 2 di atas dapat diketahui, bahwa maksimum ancaman pidananya kebanyakan masih berorientasi pada undang-undang lama (UULH) walaupun ada beberapa penyimpangan untuk maksimum ancaman pidana denda. Di samping itu sistem perumusan ancaman pidana dalam beberapa perundang-undangan lingkungan sektoral juga sesuai dengan UULH yang menggunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan kumulatif dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan sistem perumusan alternatif terdapat dalam Pasal 119 dan 120 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang fungsinya menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, seharusnya sejak dini lembaga legislatif melakukan peninjauan kembali terhadap keseluruhan pola maksimum dan sistem pengancaman pidana di dalam perundang-undangan sektoral. Hal ini penting dilakukan supaya fungsi aturan payung dari UUPLH terhadap keseluruhan kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan. Selain

itu, semakin jelas dan tegasnya perumusan suatu pasal, akan sangat membantu penegak hukum lingkungan di dalam menafsirkan dan menerapkannya di lapangan.

Adanya keanekaragaman jenis, besarnya sanksi pidana, serta perbedaan kualitas tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat di dalam beberapa kebijakan sektoral di bidang lingkungan khususnya bila dilihat dari fungsi UUPLH sebagai undang-undang payung, dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti adanya ketidakjelasan aturan mana yang akan diaplikasikan ke dalam suatu keadaan konkrit, tetapi juga sanksi apa yang akan diterapkan, sehingga dapat saja terjadi terhadap kasus yang sama diterapkan ketentuan pidana yang berbeda ancaman pidananya. Namun Barda Nawawi Arief mengingatkan hal yang perlu dicatat⁵⁶, sistem perumusan kumulatif dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mempunyai kelemahan yang bersifat imperatif. Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih, dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi, bukan sebagai yang “memberi perintah” atau yang “bertindak sebagai pemimpin.”

Menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan ketidakserasian undang-undang, di dalam ilmu hukum terdapat beberapa adagium sebagai berikut:

a. *Lex specialis derogat legi generali*

Menurut adagium ini, ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Misalnya terjadi pertentangan antara KUHP (ketentuan-ketentuan yang bersifat umum) dengan

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, opcit, hal. 123.

ketentuan hukum lingkungan, menurut adagium ini ketentuan hukum lingkungan yang harus diberlakukan.

b. *Lex superior derogat legi inferior*

Menurut adagium ini, ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya dalam pengaturan aspek tertentu yang berhubungan dengan lingkungan diatur dalam UUPH maupun dalam Peraturan Pemerintah, maka UUPH mengesampingkan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.

c. *Lex posterior derogat legi priori*

Menurut adagium ini, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan berlakunya undang-undang terdahulu. Misalnya mengenai perlindungan satwa liar diatur dalam *Dierensbeschermingsordonantie* Stb. 1931 Nomor 134, kemudian diatur kembali di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa liar tersebut, maka yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Apabila di dalam penegakan hukum lingkungan terjadi konflik hukum karena tidak serasinya undang-undang payung dengan perundang-undangan lingkungan sektoral, dan untuk mewujudkan sistem hukum lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung antara berbagai kebijakan di bidang lingkungan, maka penyelesaian secara yuridis sebagai pegangan bagi para petugas di bidang penegakan hukum dapat menggunakan salah satu adagium-adagium tersebut sebagai

jalan keluarnya. Untuk itu Harun M. Husein mengemukakan pendapat⁵⁷, harus dipilih adagium yang benar-benar tepat dan serasi dengan asas pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana *social engineering*, hukum sebagai sarana pengawal dan pengaman terlanjutkannya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berbicara masalah perubahan rumusan tindak pidana lingkungan, maka ini menyangkut masalah pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana sendiri meliputi pembaharuan di bidang perbuatannya, dan pembaharuan di bidang sanksinya, yang pada prinsipnya tidak terlepas dari tujuan penanggulangan tindak pidana (lingkungan).

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, saat ini telah ada Konsep KUHP Baru untuk menggantikan KUHP (WvS) yang sekarang berlaku dan juga telah mengatur tindak pidana lingkungan hidup di dalamnya (Bab VIII Konsep 1999-2000). Kebijakan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Konsep KUHP ini tidak jauh berbeda dengan tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan yang terdapat di dalam WvS. Perbedaan yang nampak adalah, Konsep lebih bersifat melengkapi perumusan tindak pidana pencemaran yang ada dalam Pasal 202 dan 203 WvS, yaitu mengenai pencemaran tanah, udara, dan air permukaan.

⁵⁷ Harun M. Husein, 1992, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 59-60.

Dari sudut penegakan hukum lingkungan, perluasan ruang lingkup tindak pidana pencemaran dalam Konsep KUHP Baru merupakan hal yang sangat menguntungkan. Jangkauan hukum pidana lingkungan terhadap objek lingkungan yang harus dilindungi menjadi semakin luas. Dengan demikian ruang gerak bagi para pelaku TPLH-pun semakin sempit. Untuk menghindari kesulitan dalam memperoleh alat-alat bukti yang diperlukan dan menghindari kandasnya upaya menarik pelaku TPLH, jaksa dan hakim dapat menggunakan ketentuan pasal-pasal di dalam Konsep KUHP Baru jika kelak telah berlaku, secara bersamaan dengan peraturan di bidang lingkungan sepanjang undang-undang lingkungan hidup tidak menentukan lain.

Pada hakikatnya undang-undang adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai, diperlukan suatu kebijakan yang berfungsi sebagai pegangan bagi hakim yang seharusnya telah ditetapkan terlebih dahulu yaitu pada tahap penetapan pidana oleh lembaga legislatif mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

WvS yang berlaku saat ini tidak memberikan ketentuan tersebut, demikian pula UUPLH, sedangkan tujuan pemidanaan maupun pedoman pemidanaan merupakan hal yang esensial bagi hakim di dalam memberikan putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pentingnya tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut telah dipikirkan oleh Tim Pembentuk KUHP Baru, yaitu sebagai fungsi pengendali/kontrol sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Pentingnya tujuan dan pedoman pemidanaan dimasukkan ke dalam rancangan Konsep KUHP Baru didasarkan kepada:⁵⁸

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
2. Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap “aplikasi” oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap “eksekusi” oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif). Agar di antara ada keterjalinan sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan maka diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.
3. Sistem pemidanaan yang bertolak dari faham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol.

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku TPLH yang merupakan kebijakan aplikatif pada bab ini, penulis melihat bahwa hakim terkesan ragu-ragu dalam memberikan putusannya, sehingga cenderung menjatuhkan

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 152-153.

vonis yang menguntungkan terdakwa. Keragu-raguan hakim ini didukung oleh fakta bahwa sejumlah saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan (PT. Adei Plantation), tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa yaitu sebagai pelaku pembakaran lahan. Dihubungkan dengan tujuan pemidanaan terlepas apakah hakim memahami atau tidak adanya kecenderungan pemidanaan seperti yang dirumuskan oleh Tim Perancang Konsep KUHP, jika hakim memberikan putusan yang demikian maka tujuan perlindungan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan terabaikan, karena menurut penulis, putusan hakim tersebut lebih berpihak kepada pelaku TPLH daripada kepentingan masyarakat dan sumber daya alam itu sendiri.

Untuk mengatasi keragu-raguan ini, sebenarnya hakim dapat mengatasinya dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada bab percobaan dari WvS, yaitu yang terdapat dalam Pasal 53. Dalam pasal tersebut ditentukan syarat adanya permulaan pelaksanaan, yang mana pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendak dari dalam pelaku sendiri. Sehingga putusan hakim yang mengadili perkara TPLH dengan menggunakan UUPLH dapat berbunyi, melanggar Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jo. Pasal 53 KUHP (WvS). Penggunaan ketentuan Pasal 53 WvS ini dimungkinkan dengan adanya ketentuan yang terdapat pada Pasal 103 WvS. Dengan demikian ketentuan Pasal 103 ini dapat dijadikan jembatan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif.

Mengenai tujuan pemidanaan, Pasal 50 Konsep KUHP menyebutkan adanya 4 macam tujuan yang kesemuanya menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku dengan kepentingan masyarakat. Adapun tujuan pemidanaan dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini dipertegas di dalam Penjelasan Konsep KUHP tersebut yang mengatakan, sekalipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Apabila dikaji lebih lanjut, tujuan pembedaan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP itu tidak saja penting bagi hakim ketika akan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan pidana pada tahap penetapan pidana. Dengan mempertimbangkan tujuan pembedaan, tentunya pembuat kebijakan dapat lebih tepat dalam memilih dan menentukan sarana berupa jenis pidana tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan dibuatnya suatu kebijakan. Di samping itu, adanya perumusan tujuan pembedaan ini dapat pula membantu aparat pelaksana pembedaan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian keterjalinan yang erat sebagai suatu proses dari ketiga tahap penegakan hukum (pidana) dapat pula terwujud dengan adanya tujuan pembedaan ini.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) tidak disebutkan secara tegas tujuan diadakannya kebijakan hukum pidana beserta sanksinya. Namun dengan mempelajari tujuan dan asas-asas yang terkandung di dalamnya (yaitu asas legalitas, asas pembangunan yang berkelanjutan, asas pencegahan, dan asas pengendalian), maka tujuan dirumuskannya sanksi pidana dalam UUPLH tersebut adalah sama dengan tujuan diundangkannya UUPLH dimaksud, yaitu melindungi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan cara mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jika terjadi tindak pidana lingkungan hidup dan menurut hakim terdakwa memang terbukti tidak mengindahkan kelestarian alam dan lingkungan, maka hakim tidak akan ragu-ragu menjatuhkan pidananya.

Agar putusan yang dijatuhkan benar-benar adil dan bermanfaat, selain memperhatikan tujuan pemidanaan, hakim juga perlu memperhatikan pedoman pemidanaan sebagai bahan pertimbangan. Tujuan diadakannya pedoman pemidanaan ini adalah:⁵⁹

1. Untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut dari suatu sistem perumusan ancaman pidana, baik perumusan tunggal maupun perumusan alternatif. Dengan adanya pedoman pemidanaan ini dimungkinkan:
 - a. Suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau kumulatif.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 118-119.

- b. Suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem kumulatif.
2. Sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatarbelakangi disusunnya konsep (KUHP). Ide-ide ini antara lain:
- a. Prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana (menurut Barda Nawawi Arief ini sering terlupakan).
 - b. Ide individualisasi pidana.
 - c. Ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat *non custodial* atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan limitatif).
 - d. Ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang bersifat “pidana” (*straf/punishment*) dengan jenis sanksi yang lebih bersifat “tindakan” (*maatregel/treatment*), walaupun disadari adanya kekaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi ini.
 - e. Ide untuk menghindari eksekusi dari pidana pendek.
3. Pedoman pemidanaan ini penting bagi hakim dalam kaitannya dengan kedudukan dan peranan korban, sebagai faktor yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidana, baik sebagai pihak yang perlu mendapat perlindungan, maupun sebagai faktor yang dapat memperberat atau memperingan pidana terhadap pelaku.

Pedoman pemidanaan ini ada tiga macam bentuk, yaitu:

1. Pedoman pemidanaan yang bersifat umum, bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
2. Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus, untuk memberi pengarahan kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
3. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pemidanaan yang bersifat umum diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Konsep, berupa daftar atau *check-list* dari hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, namun tidak bersifat limitatif, dalam arti masih dimungkinkan bagi hakim untuk memberikan pertimbangan lainnya ketika akan memberikan putusannya, yaitu:

- a. kesalahan pembuat;
- b. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- f. sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan atau
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dengan adanya pedoman pemidanaan ini, apabila sebelumnya tidak terdapat keseragaman tentang faktor-faktor apa yang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim ketika akan memberikan putusannya, maka adanya kriteria minimal yang diberikan oleh Konsep, diharapkan akan ada pula keseragaman pedoman bagi semua hakim di Indonesia pada tahap penjatuhan pidana.

Mengenai sistem perumusan ancaman pidana yang ditetapkan di dalam konsep adalah sebagai berikut:

- a. sistem tunggal;
- b. sistem alternatif; dan
- c. sistem kumulatif-alternatif.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, pedoman pemidanaan ini sebenarnya dapat pula digunakan oleh hakim dalam memutus TPLH. Daftar atau *check-list* dapat membantu mempermudah hakim dalam menetapkan ukuran berat ringannya pidana. Apabila hakim ragu-ragu dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku TPLH, maka pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam Konsep KUHP tersebut dapat pula dijadikan pedoman.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam UUPH adalah sistem kumulatif, sedangkan perundang-undangan sektoral di bidang lingkungan menganut ketiga sistem yang juga terdapat di dalam Konsep KUHP Baru (diuraikan dalam tabel 2). Menurut Konsep KUHP, sistem gabungan hanya dikenakan secara khusus untuk tindak pidana yang dapat menimbulkan keuntungan ekonomis/keuangan yang cukup tinggi, pidana penjara

dapat dialternatifkan dan dikumulatikan dengan pidana denda (sistem alternatif-kumulatif), sedangkan denda yang dikumulatikan adalah denda dengan Kategori V (maksimal 30 juta rupiah).

Mengenai sistem perumusan alternatif, Konsep memberikan kesempatan kepada hakim untuk memilih jenis pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda. Namun di dalam melakukan pilihan, hakim diingatkan untuk:

- a. selalu berorientasi pada “tujuan pemidanaan”;
- b. lebih mengutamakan pidana yang lebih ringan, bila pidana yang lebih ringan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan;
- c. walaupun diancam dengan pidana alternatif, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif dengan catatan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (maksimum penjara ditambah maksimum denda).

Di dalam perundang-undangan lingkungan sektoral, sistem perumusan tunggal antara lain dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengancam dengan pidana denda sebesar 225 juta bagi pelanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan 7 undang-undang ini.

Sistem perumusan tunggal ini menurut Barda Nawawi Arief memiliki beberapa kelemahan⁶⁰, yaitu:

1. Mempunyai sifat sangat kaku, absolut dan imperatif. Ketentuan ini sama sekali tidak memberi kesempatan bagi hakim menerapkan pidana yang

⁶⁰ *Ibid*, hal. 156-157.

dianggap paling sesuai untuk terdakwa, pemidanaan yang berorientasi pada orang berkurang, khususnya dalam menentukan jenis pidana.

2. Sistem ini merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana, sehingga sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana.
3. Dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, sistem ini menunjukkan adanya kontradiksi ide dimana konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi, dan individualisasi pidana.
4. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan hakim dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini kurang menunjang kecenderungan saat ini di banyak negara (berdasarkan kongres-kongres internasional) untuk mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana pentingnya tujuan maupun pedoman pemidanaan, wajar apabila Tim Perumus KUHP Baru memasukkan kedua hal tersebut di dalam Rancangan Konsep KUHP Baru. Adanya perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan ini tidak hanya penting bagi penerapan KUHP itu sendiri sebagai induk dari seluruh kebijakan pidana materiil, tetapi dapat pula menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan di bidang hukum (pidana) lainnya, termasuk kebijakan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan

putusan dalam menyelesaikan TPLH hakim harus memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat dalam KUHP.

Untuk menampung aspirasi akibat adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana, Tim Perumus Rancangan KUHP Baru telah menerima doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 Buku I Konsep KUHP 1999/2000.

- (1) Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Dalam hal tertentu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang
- (3) Untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Pembenaran perumusan konsep "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" tersebut dapat dikaji atas dasar tujuan hukum pidana dan pemidanaan yang bersifat integratif dalam kerangka perlindungan sosial (*social defence*). Tujuan hukum pidana dan pidana yang bersifat integratif adalah: (1) pencegahan umum dan pencegahan khusus; (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; dan (4) pengimbalan atau pengimbangan.⁶¹

Pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan dalam hukum pidana, bukan hal yang mudah apabila dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan korporasi. Demikian pula membuktikan kesalahan korporasi dalam TPLH. Untuk memudahkan pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan untuk korporasi dalam TPLH, kiranya pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan

⁶¹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 81-87.

menyimpang dari asas kesalahan dimaksud dengan menganut doktrin "*strict liability*" dan doktrin "*vicarious liability*". Karena dengan perkembangan teknologi dan kecanggihannya, tidaklah mudah mendapatkan bukti yang memadai tentang kesalahan dari para pengurus korporasi. Bahkan dengan pesatnya kemajuan industri semakin pula membawa resiko besar, karena rumitnya hubungan sebab-akibat. Sementara dampak dari industrialisasi dan perkembangan iptek yang amat cepat itu, pihak korban sudah sangat menderita dan tidak mempunyai pilihan yang lebih baik terutama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memadai.

Dengan menganut konsep *strict liability* dan *vicarious liability* di samping asas pidana tanpa kesalahan, diharapkan kesulitan pembuktian unsur kesalahan dalam TPLH yang dilakukan oleh korporasi dapat dipecahkan, artinya penggunaan *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) hanya diutamakan dalam menghadapi tindak pidana oleh korporasi.

Urgensi penggunaan kedua doktrin di atas untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam TPLH, menurut hemat penulis didasarkan pada:

1. profit yang akan diperoleh korporasi melalui TPLH merupakan keuntungan yang cukup besar bagi korporasi yang diimbangi oleh kerugian-kerugian pada individu atau masyarakat, lingkungan hidup maupun negara.
2. pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan dalam hukum pidana, bukan pekerjaan yang mudah bila dihadapkan pada kasus-kasus TPLH yang dilakukan oleh korporasi.

3. pembedanaan berdasarkan kedua doktrin tersebut di atas tidak berarti korporasi (pelaku TPLH) tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan tetap ada, yaitu gagal mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan aktivitas di masyarakat.
4. pembedanaan korporasi berdasarkan strict liability dan vicarious liability bukan atas dasar kesalahan subjektif, tetapi atas dasar perlindungan kepentingan sosial yang mengalami gangguan keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi.

Sebagaimana diketahui, kedudukan kebijakan hukum pidana dalam UUPLH hanyalah merupakan mata rantai yang terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini berarti, jika upaya lain masih dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, maka upaya lain melalui hukum pidana tidak lagi digunakan.

Namun mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi hukum pidana dalam fungsinya sebagai *social defence* (perlindungan sosial atau pengayoman masyarakat), maka untuk meningkatkan fungsionalisasi hukum pidana terhadap TPLH yang dilakukan oleh korporasi, penulis berpendapat sebagai *shock therapy* sudah masanya menempatkan kedudukan kebijakan hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah, hukum pidana memiliki upaya pemaksa yang bersifat menderitakan/nestapa bagi siapa saja yang dikenakan sanksi tersebut, dan tidak dimiliki oleh bidang-bidang hukum lainnya. Selanjutnya dari laporan ICEL (Indonesia Center for Environmental Law) diketahui, bahwa penanganan kasus lingkungan melalui proses peradilan pidana

Tabel 2

Sanksi Pidana dan Sistem Ancaman Pidana
Dalam Peraturan yang Berkaitan dengan
Lingkungan Hidup di Indonesia

No	UU PAYUNG DAN UU SEKTORAL LINGK. HIDUP	JENIS TP/ KETENT. YG DILANGGAR	JENIS & JUMLAH ANGAMAN PIDANA				SISTEM ANCAMAN PIDANA
			Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	
1.	UU No. 23/1997 (UUPH)	*Kejahatan:				Ps.47	
		- Ps. 41 (1)	10 th	-	500 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
		- Ps. 41 (2)	15 th	-	750 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
		- Ps. 42 (1)	3 th	-	100 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
2.	UU No. 5/1983 (ZEEI)	- Ps. 42 (2)	5 th	-	150 jt	Tindakan tt. Tertib	Kumulatif
		*Kejahatan:					
		- Ps. 16 (1) jo. Ps. 5 (1), Ps. 6, Ps. 7.	-	-	225 jt	Perampasan sarana & hasil kejahatan	Tunggal
		- Ps. 16 (3)	10 th	-	100 jt	-	Kumulatif- alternatif
3.	UU No.5/1985 (UU PERINDUSTRIAN)	- Ps. 17 jo. Ps. 16 (1)	-	-	75 jt	-	Tunggal
		*Kejahatan:					
		- Ps. 24 (1) jo. Ps. 13 (1) dan Ps. 14 (1)	5 th	-	25 jt	pencabutan ijin usaha industri	alternatif
		- Ps. 25 jo. Ps. 17	2 th	-	10 jt	-	alternatif

No	UU PAYUNG DAN UU SEKTORAL LINGK. HIDUP	JENIS TP/ KETENT. YG DILANGGAR	JENIS & JUMLAH ANCAMAN PIDANA				SISTEM ANCAMAN PIDANA
			Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	
4.	UU No.9/1995 (UU Perikanan)	- Ps. 26 jo. Ps. 19	5 th	-	25 jt	Pencabutan ijin usaha industri	Alternatif
		- Ps.27 (1) jo. Ps.21 (1)	10 th	-	100 jt	-	Kumulatif- alternatif
		*Pelanggaran:					
		- Ps.24 (2) jo. Ps.13 (1) dan Ps.14 (1)	-	1 th	1 jt	Pencabutan ijin usaha industri	Alternatif
		- Ps.27 (2) jo. Ps.21 (1)	-	1 th	1 jt	-	Kumulatif- alternatif
		*Kejahatan:					
		- Ps.24 jo. Ps.6 (1) dan Ps.7 (1)	10 th	-	100 jt	Ps.29: perampasan benda yg digunakan untuk & dihasilkan dari TP seperti dimaksud Ps.24 s.d. Ps.27	Kumulatif- alternatif
		- Ps.25 jo. Ps.10, menggunakan kapal > 30 ton, menggunakan kapal < 30 ton	5 th	-	50 jt		Alternatif
			2,5 th	-	25 jt		Alternatif
		*Pelanggaran:					
5.	UU No.5/1990 (UU Konservasi)	- Ps.26 jo. Ps.10	-	6 bl	5 jt	-	Alternatif
		- Ps.27 (1) jo. Ps.4	-	-	25 jt	-	Tunggal
		- Ps. 27 (2) jo. Ps.20.	-	-	5 jt	-	Tunggal
		*Kejahatan:					
		- Ps.40 (1) jo. Ps.19 (1) dan Ps.33 (1)	10 th	-	200 jt	-	Kumulatif
		- Ps.40 (2) jo. Ps.21 (1 & 2) dan Ps.33 (3)	5 th	-	100 jt	-	Kumulatif
		*Pelanggaran:					
		- Ps.40 (3) jo. Ps.19 (1) dan Ps.33 (1)	-	1 th	100 jt	-	Kumulatif
6.	UU no.5/1992 (UU Benda Cagar Budaya)	- Ps.40 (4) jo. Ps. 21 (1 & 2) dan Ps.33 (3)	-	1 th	50 jt	-	Kumulatif
		*Kejahatan:					
		- Ps. 26	10 th	-	100 jt	-	Kumulatif- alternatif
		- Ps. 27	5 th	-	50 jt	-	Kumulatif- alternatif

No	UU PAYUNG DAN UU SEKTORAL LINGK. HIDUP	JENIS TP/ KETENT. YG DILANGGAR	JENIS & JUMLAH ANCAMAN PIDANA				SISTEM ANCAMAN PIDANA
			Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	
7.	UU No.21/1992 (UU Pelayaran)	* Pelanggaran: - Ps. 28	-	1 th	10 jt	-	Kumulatif- alternatif
		* Kejahatan: - Ps. 119 (1)	5 th	-	120 jt	-	Alternatif
		- Ps. 119 (2)	10 th	-	240 jt	-	Alternatif
		- Ps. 120	2 th	-	48 jt	-	alternatif

Memperhatikan perundang-undangan lingkungan sektoral sebagaimana diuraikan pada tabel 2 di atas dapat diketahui, bahwa maksimum ancaman pidananya kebanyakan masih berorientasi pada undang-undang lama (UULH) walaupun ada beberapa penyimpangan untuk maksimum ancaman pidana denda. Di samping itu sistem perumusan ancaman pidana dalam beberapa perundang-undangan lingkungan sektoral juga sesuai dengan UULH yang menggunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan kumulatif dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan sistem perumusan alternatif terdapat dalam Pasal 119 dan 120 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang fungsinya menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, seharusnya sejak dini lembaga legislatif melakukan peninjauan kembali terhadap keseluruhan pola maksimum dan sistem pengancaman pidana di dalam perundang-undangan sektoral. Hal ini penting dilakukan supaya fungsi aturan payung dari UUPLH terhadap keseluruhan kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan. Selain

itu, semakin jelas dan tegasnya perumusan suatu pasal, akan sangat membantu penegak hukum lingkungan di dalam menafsirkan dan menerapkannya di lapangan.

Adanya keanekaragaman jenis, besarnya sanksi pidana, serta perbedaan kualitas tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat di dalam beberapa kebijakan sektoral di bidang lingkungan khususnya bila dilihat dari fungsi UUPLH sebagai undang-undang payung, dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti adanya ketidakjelasan aturan mana yang akan diaplikasikan ke dalam suatu keadaan konkrit, tetapi juga sanksi apa yang akan diterapkan, sehingga dapat saja terjadi terhadap kasus yang sama diterapkan ketentuan pidana yang berbeda ancaman pidananya. Namun Barda Nawawi Arief mengingatkan hal yang perlu dicatat⁵⁶, sistem perumusan kumulatif dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mempunyai kelemahan yang bersifat imperatif. Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih, dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi, bukan sebagai yang “memberi perintah” atau yang “bertindak sebagai pemimpin.”

Menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan ketidakserasian undang-undang, di dalam ilmu hukum terdapat beberapa adagium sebagai berikut:

a. *Lex specialis derogat legi generali*

Menurut adagium ini, ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Misalnya terjadi pertentangan antara KUHP (ketentuan-ketentuan yang bersifat umum) dengan

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, opcit, hal. 123.

ketentuan hukum lingkungan, menurut adagium ini ketentuan hukum lingkungan yang harus diberlakukan.

b. *Lex superior derogat legi inferior*

Menurut adagium ini, ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya dalam pengaturan aspek tertentu yang berhubungan dengan lingkungan diatur dalam UUPH maupun dalam Peraturan Pemerintah, maka UUPH mengesampingkan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.

c. *Lex posterior derogat legi priori*

Menurut adagium ini, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan berlakunya undang-undang terdahulu. Misalnya mengenai perlindungan satwa liar diatur dalam *Dierensbeschermingsordonantie* Stb. 1931 Nomor 134, kemudian diatur kembali di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa liar tersebut, maka yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Apabila di dalam penegakan hukum lingkungan terjadi konflik hukum karena tidak serasinya undang-undang payung dengan perundang-undangan lingkungan sektoral, dan untuk mewujudkan sistem hukum lingkungan sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung antara berbagai kebijakan di bidang lingkungan, maka penyelesaian secara yuridis sebagai pegangan bagi para petugas di bidang penegakan hukum dapat menggunakan salah satu adagium-adagium tersebut sebagai

jalan keluarnya. Untuk itu Harun M. Husein mengemukakan pendapat⁵⁷, harus dipilih adagium yang benar-benar tepat dan serasi dengan asas pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana *social engineering*, hukum sebagai sarana pengawal dan pengaman terlanjutkannya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berbicara masalah perubahan rumusan tindak pidana lingkungan, maka ini menyangkut masalah pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana sendiri meliputi pembaharuan di bidang perbuatannya, dan pembaharuan di bidang sanksinya, yang pada prinsipnya tidak terlepas dari tujuan penanggulangan tindak pidana (lingkungan).

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, saat ini telah ada Konsep KUHP Baru untuk menggantikan KUHP (WvS) yang sekarang berlaku dan juga telah mengatur tindak pidana lingkungan hidup di dalamnya (Bab VIII Konsep 1999-2000). Kebijakan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Konsep KUHP ini tidak jauh berbeda dengan tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan yang terdapat di dalam WvS. Perbedaan yang nampak adalah, Konsep lebih bersifat melengkapi perumusan tindak pidana pencemaran yang ada dalam Pasal 202 dan 203 WvS, yaitu mengenai pencemaran tanah, udara, dan air permukaan.

⁵⁷ Harun M. Husein, 1992, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 59-60.

Dari sudut penegakan hukum lingkungan, perluasan ruang lingkup tindak pidana pencemaran dalam Konsep KUHP Baru merupakan hal yang sangat menguntungkan. Jangkauan hukum pidana lingkungan terhadap objek lingkungan yang harus dilindungi menjadi semakin luas. Dengan demikian ruang gerak bagi para pelaku TPLH-pun semakin sempit. Untuk menghindari kesulitan dalam memperoleh alat-alat bukti yang diperlukan dan menghindari kandasnya upaya menarik pelaku TPLH, jaksa dan hakim dapat menggunakan ketentuan pasal-pasal di dalam Konsep KUHP Baru jika kelak telah berlaku, secara bersamaan dengan peraturan di bidang lingkungan sepanjang undang-undang lingkungan hidup tidak menentukan lain.

Pada hakikatnya undang-undang adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai, diperlukan suatu kebijakan yang berfungsi sebagai pegangan bagi hakim yang seharusnya telah ditetapkan terlebih dahulu yaitu pada tahap penetapan pidana oleh lembaga legislatif mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

WvS yang berlaku saat ini tidak memberikan ketentuan tersebut, demikian pula UUPLH, sedangkan tujuan pemidanaan maupun pedoman pemidanaan merupakan hal yang esensial bagi hakim di dalam memberikan putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pentingnya tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut telah dipikirkan oleh Tim Pembentuk KUHP Baru, yaitu sebagai fungsi pengendali/kontrol sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Pentingnya tujuan dan pedoman pemidanaan dimasukkan ke dalam rancangan Konsep KUHP Baru didasarkan kepada:⁵⁸

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
2. Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap “aplikasi” oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap “eksekusi” oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif). Agar di antara ada keterjalinan sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan maka diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.
3. Sistem pemidanaan yang bertolak dari faham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol.

Ketika membahas pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku TPLH yang merupakan kebijakan aplikatif pada bab ini, penulis melihat bahwa hakim terkesan ragu-ragu dalam memberikan putusannya, sehingga cenderung menjatuhkan

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 152-153.

vonis yang menguntungkan terdakwa. Keragu-raguan hakim ini didukung oleh fakta bahwa sejumlah saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan (PT. Adei Plantation), tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa yaitu sebagai pelaku pembakaran lahan. Dihubungkan dengan tujuan pemidanaan terlepas apakah hakim memahami atau tidak adanya kecenderungan pemidanaan seperti yang dirumuskan oleh Tim Perancang Konsep KUHP, jika hakim memberikan putusan yang demikian maka tujuan perlindungan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan terabaikan, karena menurut penulis, putusan hakim tersebut lebih berpihak kepada pelaku TPLH daripada kepentingan masyarakat dan sumber daya alam itu sendiri.

Untuk mengatasi keragu-raguan ini, sebenarnya hakim dapat mengatasinya dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada bab percobaan dari WvS, yaitu yang terdapat dalam Pasal 53. Dalam pasal tersebut ditentukan syarat adanya permulaan pelaksanaan, yang mana pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendak dari dalam pelaku sendiri. Sehingga putusan hakim yang mengadili perkara TPLH dengan menggunakan UUPLH dapat berbunyi, melanggar Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jo. Pasal 53 KUHP (WvS). Penggunaan ketentuan Pasal 53 WvS ini dimungkinkan dengan adanya ketentuan yang terdapat pada Pasal 103 WvS. Dengan demikian ketentuan Pasal 103 ini dapat dijadikan jembatan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif.

Mengenai tujuan pemidanaan, Pasal 50 Konsep KUHP menyebutkan adanya 4 macam tujuan yang kesemuanya menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku dengan kepentingan masyarakat. Adapun tujuan pemidanaan dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini dipertegas di dalam Penjelasan Konsep KUHP tersebut yang mengatakan, sekalipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Apabila dikaji lebih lanjut, tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP itu tidak saja penting bagi hakim ketika akan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, tetapi juga penting bagi pembuat kebijakan pidana pada tahap penetapan pidana. Dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, tentunya pembuat kebijakan dapat lebih tepat dalam memilih dan menentukan sarana berupa jenis pidana tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan dibuatnya suatu kebijakan. Di samping itu, adanya perumusan tujuan pemidanaan ini dapat pula membantu aparat pelaksana pemidanaan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian keterjalinan yang erat sebagai suatu proses dari ketiga tahap penegakan hukum (pidana) dapat pula terwujud dengan adanya tujuan pemidanaan ini.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) tidak disebutkan secara tegas tujuan diadakannya kebijakan hukum pidana beserta sanksinya. Namun dengan mempelajari tujuan dan asas-asas yang terkandung di dalamnya (yaitu asas legalitas, asas pembangunan yang berkelanjutan, asas pencegahan, dan asas pengendalian), maka tujuan dirumuskannya sanksi pidana dalam UUPLH tersebut adalah sama dengan tujuan diundangkannya UUPLH dimaksud, yaitu melindungi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan cara mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jika terjadi tindak pidana lingkungan hidup dan menurut hakim terdakwa memang terbukti tidak mengindahkan kelestarian alam dan lingkungan, maka hakim tidak akan ragu-ragu menjatuhkan pidananya.

Agar putusan yang dijatuhkan benar-benar adil dan bermanfaat, selain memperhatikan tujuan pemidanaan, hakim juga perlu memperhatikan pedoman pemidanaan sebagai bahan pertimbangan. Tujuan diadakannya pedoman pemidanaan ini adalah:⁵⁹

1. Untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut dari suatu sistem perumusan ancaman pidana, baik perumusan tunggal maupun perumusan alternatif. Dengan adanya pedoman pemidanaan ini dimungkinkan:
 - a. Suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau kumulatif.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 118-119.

- b. Suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem kumulatif.
2. Sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatarbelakangi disusunnya konsep (KUHP). Ide-ide ini antara lain:
- a. Prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana (menurut Barda Nawawi Arief ini sering terlupakan).
 - b. Ide individualisasi pidana.
 - c. Ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat *non custodial* atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan limitatif).
 - d. Ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang bersifat “pidana” (*straf/punishment*) dengan jenis sanksi yang lebih bersifat “tindakan” (*maatregel/treatment*), walaupun disadari adanya kekaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi ini.
 - e. Ide untuk menghindari eksekusi dari pidana pendek.
3. Pedoman pemidanaan ini penting bagi hakim dalam kaitannya dengan kedudukan dan peranan korban, sebagai faktor yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidana, baik sebagai pihak yang perlu mendapat perlindungan, maupun sebagai faktor yang dapat memperberat atau memperingan pidana terhadap pelaku.

Pedoman pemidanaan ini ada tiga macam bentuk, yaitu:

1. Pedoman pemidanaan yang bersifat umum, bertujuan untuk memberikan pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
2. Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus, untuk memberi pengarahannya kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
3. Pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pemidanaan yang bersifat umum diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Konsep, berupa daftar atau *check-list* dari hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, namun tidak bersifat limitatif, dalam arti masih dimungkinkan bagi hakim untuk memberikan pertimbangan lainnya ketika akan memberikan putusannya, yaitu:

- a. kesalahan pembuat;
- b. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- f. sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan atau
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dengan adanya pedoman pemidanaan ini, apabila sebelumnya tidak terdapat keseragaman tentang faktor-faktor apa yang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim ketika akan memberikan putusannya, maka adanya kriteria minimal yang diberikan oleh Konsep, diharapkan akan ada pula keseragaman pedoman bagi semua hakim di Indonesia pada tahap penjatuhan pidana.

Mengenai sistem perumusan ancaman pidana yang ditetapkan di dalam konsep adalah sebagai berikut:

- a. sistem tunggal;
- b. sistem alternatif; dan
- c. sistem kumulatif-alternatif.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, pedoman pemidanaan ini sebenarnya dapat pula digunakan oleh hakim dalam memutus TPLH. Daftar atau *check-list* dapat membantu mempermudah hakim dalam menetapkan ukuran berat ringannya pidana. Apabila hakim ragu-ragu dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku TPLH, maka pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam Konsep KUHP tersebut dapat pula dijadikan pedoman.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam UUPLH adalah sistem kumulatif, sedangkan perundang-undangan sektoral di bidang lingkungan menganut ketiga sistem yang juga terdapat di dalam Konsep KUHP Baru (diuraikan dalam tabel 2). Menurut Konsep KUHP, sistem gabungan hanya dikenakan secara khusus untuk tindak pidana yang dapat menimbulkan keuntungan ekonomis/keuangan yang cukup tinggi, pidana penjara

dapat dialternatifkan dan dikumulatikan dengan pidana denda (sistem alternatif-kumulatif), sedangkan denda yang dikumulatikan adalah denda dengan Kategori V (maksimal 30 juta rupiah).

Mengenai sistem perumusan alternatif, Konsep memberikan kesempatan kepada hakim untuk memilih jenis pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda. Namun di dalam melakukan pilihan, hakim diingatkan untuk:

- a. selalu berorientasi pada “tujuan pemidanaan”;
- b. lebih mengutamakan pidana yang lebih ringan, bila pidana yang lebih ringan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan;
- c. walaupun diancam dengan pidana alternatif, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif dengan catatan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (maksimum penjara ditambah maksimum denda).

Di dalam perundang-undangan lingkungan sektoral, sistem perumusan tunggal antara lain dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengancam dengan pidana denda sebesar 225 juta bagi pelanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan 7 undang-undang ini.

Sistem perumusan tunggal ini menurut Barda Nawawi Arief memiliki beberapa kelemahan⁶⁰, yaitu:

1. Mempunyai sifat sangat kaku, absolut dan imperatif. Ketentuan ini sama sekali tidak memberi kesempatan bagi hakim menerapkan pidana yang

⁶⁰ *Ibid*, hal. 156-157.

dianggap paling sesuai untuk terdakwa, pemidanaan yang berorientasi pada orang berkurang, khususnya dalam menentukan jenis pidana.

2. Sistem ini merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana, sehingga sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana.
3. Dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, sistem ini menunjukkan adanya kontradiksi ide dimana konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi, dan individualisasi pidana.
4. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan hakim dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini kurang menunjang kecenderungan saat ini di banyak negara (berdasarkan kongres-kongres internasional) untuk mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana pentingnya tujuan maupun pedoman pemidanaan, wajar apabila Tim Perumus KUHP Baru memasukkan kedua hal tersebut di dalam Rancangan Konsep KUHP Baru. Adanya perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan ini tidak hanya penting bagi penerapan KUHP itu sendiri sebagai induk dari seluruh kebijakan pidana materiil, tetapi dapat pula menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan di bidang hukum (pidana) lainnya, termasuk kebijakan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan

putusan dalam menyelesaikan TPLH hakim harus memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat dalam KUHP.

Untuk menampung aspirasi akibat adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana, Tim Perumus Rancangan KUHP Baru telah menerima doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 Buku I Konsep KUHP 1999/2000.

- (1) Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Dalam hal tertentu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang
- (3) Untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Pembenaran perumusan konsep "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" tersebut dapat dikaji atas dasar tujuan hukum pidana dan pemidanaan yang bersifat integratif dalam kerangka perlindungan sosial (*social defence*). Tujuan hukum pidana dan pidana yang bersifat integratif adalah: (1) pencegahan umum dan pencegahan khusus; (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; dan (4) pengimbalan atau pengimbangan.⁶¹

Pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan dalam hukum pidana, bukan hal yang mudah apabila dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan korporasi. Demikian pula membuktikan kesalahan korporasi dalam TPLH. Untuk memudahkan pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan untuk korporasi dalam TPLH, kiranya pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan

⁶¹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hal. 81-87.

menyimpang dari asas kesalahan dimaksud dengan menganut doktrin "*strict liability*" dan doktrin "*vicarious liability*". Karena dengan perkembangan teknologi dan kecanggihannya, tidaklah mudah mendapatkan bukti yang memadai tentang kesalahan dari para pengurus korporasi. Bahkan dengan pesatnya kemajuan industri semakin pula membawa resiko besar, karena rumitnya hubungan sebab-akibat. Sementara dampak dari industrialisasi dan perkembangan iptek yang amat cepat itu, pihak korban sudah sangat menderita dan tidak mempunyai pilihan yang lebih baik terutama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memadai.

Dengan menganut konsep *strict liability* dan *vicarious liability* di samping asas pidana tanpa kesalahan, diharapkan kesulitan pembuktian unsur kesalahan dalam TPLH yang dilakukan oleh korporasi dapat dipecahkan, artinya penggunaan *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) hanya diutamakan dalam menghadapi tindak pidana oleh korporasi.

Urgensi penggunaan kedua doktrin di atas untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam TPLH, menurut hemat penulis didasarkan pada:

1. profit yang akan diperoleh korporasi melalui TPLH merupakan keuntungan yang cukup besar bagi korporasi yang diimbangi oleh kerugian-kerugian pada individu atau masyarakat, lingkungan hidup maupun negara.
2. pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan dalam hukum pidana, bukan pekerjaan yang mudah bila dihadapkan pada kasus-kasus TPLH yang dilakukan oleh korporasi.

3. pembedanaan berdasarkan kedua doktrin tersebut di atas tidak berarti korporasi (pelaku TPLH) tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan tetap ada, yaitu gagal mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan aktivitas di masyarakat.
4. pembedanaan korporasi berdasarkan strict liability dan vicarious liability bukan atas dasar kesalahan subjektif, tetapi atas dasar perlindungan kepentingan sosial yang mengalami gangguan keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi.

Sebagaimana diketahui, kedudukan kebijakan hukum pidana dalam UUPH hanya merupakan mata rantai yang terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini berarti, jika upaya lain masih dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, maka upaya lain melalui hukum pidana tidak lagi digunakan.

Namun mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi hukum pidana dalam fungsinya sebagai *social defence* (perlindungan sosial atau pengayoman masyarakat), maka untuk meningkatkan fungsionalisasi hukum pidana terhadap TPLH yang dilakukan oleh korporasi, penulis berpendapat sebagai *shock therapy* sudah masanya menempatkan kedudukan kebijakan hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah, hukum pidana memiliki upaya paksa yang bersifat menderitakan/nestapa bagi siapa saja yang dikenakan sanksi tersebut, dan tidak dimiliki oleh bidang-bidang hukum lainnya. Selanjutnya dari laporan ICEL (Indonesia Center for Environmental Law) diketahui, bahwa penanganan kasus lingkungan melalui proses peradilan pidana

hanya tiga persen. Kenyataan ini menunjukkan adanya anggapan bahwa dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* menimbulkan sikap menunggu dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Selama ini inisiatif untuk menjaring pelaku TPLH justru lebih banyak berasal dari masyarakat maupun LSM. Sejalan dengan hal tersebut J.C. Oudijk mengemukakan⁶², meski anggapan hukum pidana sebagai sarana untuk melawan tindak pidana lingkungan merupakan "*ultimum remedium*" semakin lama semakin ditinggalkan, asumsi ini masih dianut cukup banyak sarjana. Anggapan atau asumsi ini mengandung bahaya, dalam arti memunculkan kemalasan atau sikap menunggu di kalangan kejaksaan. Padahal seringkali mereka justru dituntut untuk bekerja secara aktif.

Di samping itu, penyelesaian melalui jalan musyawarah maupun penyelesaian melalui instrumen hukum lain (sanksi administrasi dan hukum perdata) ternyata tidak juga membuat jera korporasi-korporasi melakukan pelanggaran norma lingkungan, bahkan semakin hari intensitas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka bila sebelumnya hukum pidana menempati urutan terakhir, dengan beralihnya fungsi hukum pidana menjadi *primum remedium* maka hukum pidana dengan sanksi yang dimilikinya itu menjadi pilihan yang pertama di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan.

⁶² J.C. Oudijk, *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, opcit, hal. 464.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua permasalahan di dalam penulisan ini, maka dapat ditarik dua macam kesimpulan yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan khusus.

A. KESIMPULAN UMUM

Lingkungan hidup adalah milik bersama yang harus dijaga kelestariannya, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini tetapi juga untuk kepentingan generasi mendatang.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilaksanakan pembangunan, yaitu sebagai upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam guna meningkatkan mutu kehidupan seluruh rakyat. Semakin meningkat kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan akan sumber daya alam, sedangkan pelaksanaan pembangunan berkaitan erat dengan berkembangnya korporasi-korporasi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar yang semuanya bergerak di bidang perekonomian. Di dalam kegiatannya, korporasi-korporasi tersebut menghasilkan produk sampingan berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan terganggunya daya dukung lingkungan, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Menghadapi problem lingkungan ini perlu dikembangkan pengelolaan lingkungan sebagai suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya, dan

untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan nasional mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menjaga keberadaan lingkungan hidup beserta ekosistemnya, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). UUPLH ini merupakan undang-undang yang berfungsi sebagai “undang-undang payung” atau “*umbrella act*” atau “*umbrella provition*”, artinya merupakan dasar bagi semua kebijakan di bidang lingkungan serta menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan lingkungan, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat. Dengan kata lain, UUPLH adalah undang-undang yang memiliki tujuan untuk merangkum keseluruhan kebijakan hukum lingkungan ke dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia.

Untuk memperkuat, maka UUPLH dilengkapi dengan berbagai kebijakan hukum berikut sanksinya. Salah satu dari kebijakan hukum dimaksud adalah kebijakan hukum pidana dengan sanksi pidananya, dan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 maka korporasi yang melakukan TPLH (pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup) dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun karena fungsi sanksi di dalam kebijakan lingkungan hanya sebagai *ultimum remedium*, maka keberadaan pasal tersebut cenderung kurang dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani TPLH yang

dilakukan oleh korporasi, sehingga kasus-kasus TPLH yang melibatkan korporasi sebagai pelaku jarang terdengar memasuki wilayah kerja pengadilan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh fakta yang menggambarkan, bahwa penanganan terhadap kasus-kasus lingkungan yang tidak terselesaikan sebesar 51 persen. Di samping itu beberapa kasus mendapat sanksi administratif, namun penyelesaiannya masih belum jelas, sedangkan penyelesaian TPLH melalui jalur perdata hanya 5 persen dari jumlah kasus yang ada dan 3 persen adalah penyelesaian melalui jalur pidana.

B. KESIMPULAN KHUSUS

Dari pembahasan terhadap permasalahan pokok yang pertama, penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup adalah:

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPLH dapat dikenakan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi yang lain. Selain itu juga mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin atau kedua-duanya. Mengenai hal ini, di dalam perundang-undangan sektoral tidak ada ketentuan yang jelas.
- b. Korporasi dikatakan melakukan TPLH jika ada orang atau orang-orang berdasarkan hubungan kerja dan dalam lingkungan badan hukum itu melakukan tindak pidana. Di dalam perundang-undangan sektoral, ketentuan semacam ini tidak ada.

- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi pada prinsipnya menganut *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Hal ini terlihat dari rumusan TPLH dalam beberapa perundang-undangan lingkungan hidup yang sebagian besar mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian.
- d. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku TPLH adalah pidana pokok berupa pidana penjara atau denda dan sanksi tindakan tata tertib. Di dalam perundang-undangan lingkungan sektoral, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok berupa penjara, kurungan dan denda. Di samping itu ada pula yang mencantumkan pidana tambahan.
- e. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 46 dan 47 UUPLH belum berjalan sebagaimana diharapkan disebabkan masih ada kendala-kendala, baik yang berasal dari UUPLH itu sendiri maupun yang berasal dari luar undang-undang.

Dari pembahasan terhadap permasalahan pokok yang kedua, hal-hal yang sepatutnya diformulasikan dalam kebijakan legislatif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPLH adalah:

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan pula dalam perundang-undangan sektoral.
- b. Ketentuan tentang kapan korporasi dikatakan melakukan TPLH diatur secara jelas dan rinci.
- c. Perumusan ketentuan pelaksanaan dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban membayar pidana denda diformulasikan dalam perundang-undangan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

- d. Perumusan tentang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam atau berdasar peraturan perundang-undangan lain sepanjang ditentukan sebagai TPLH, doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*", serta menjadikan hukum pidana sebagai "*primum remedium*" dalam perundang-undangan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

C. SARAN

Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup seyogyanya ditindaklanjuti dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fak. Hukum Undip, Semarang
- , 1992, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Masalah Hukum, Majalah FH Undip Nomor 4
- , 1995, *Beberapa Hasil International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Desember
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang
- , 2002, *Masalah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bahan Kuliah Umum FH UNSWAGATI, Cirebon, 17 Juni
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Abidin, Zainal, 1981, *Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi*, Simposium HPE, Puslitbang Kejagung RI dan FH Unhas.
- , 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Abdullah, Mustafa, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Adji, Oemar Seno, 1981, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta
- , 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta

- Ariman, Rasyid, 1986, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence, A Modern Approach To Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul, London
- Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung
- Box, Steven, 1985, *Power, Crime and Mystification*, London Tavistock Publ
- Clinard, Marshall B. and Peter C. Yeager, 1983, *Corporate Crime*, The Free Press, New York
- Friedmann, W, 1973, *Law in a Changing Society*, Columbia University Press, New York
- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung
- Hatrik, Hamzah, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung
- Harahap, Adnan, et al, 1997, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hidayat, Arief, et al, 1998, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1997, *Peran Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan*, Makalah Seminar Nasional, Medan, 7-8 Januari
- Husein, M. Harun, 1992, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 1997, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sapta Artha Jaya, Jakarta

- John C. Coffe. Jr; 1983, *Corporate Criminal Liability*, dalam Sanford H. Kadish :
Encyclopedia of crime and justice, terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip,
Semarang
- Koeswadji, Hermin Hadiati, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti,
Bandung
- Kunarto, 1996, *IkhtisarImplementasi HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cipta
Manunggal, Jakarta
- Keijzer, Nico, 1997, *Fraud By Corporation*, terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip,
Semarang
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,
Bina Aksara, Jakarta
- , 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- , 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang*,
Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip,
Semarang
- , 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam
Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Nasional
Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, Fakultas Hukum Undip
- , 2001, *Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak
Pidana Ekonomi di Indonesia*, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa
Pasca Sarjana, Undip, Semarang
- dan Dwidja Priyatni, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam
Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung
- dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Alumni, Bandung
- , 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Marpaung, Leden, 1996, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah
Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Gillies, 1990, *Criminal Law*, terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang

- Packer, H.L., 1968, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford California
- Projohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, UI, Jakarta
- , 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, UI, Jakarta
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya
- , dan Drupsteen, 1992, *Kasus-Kasus Hukum Lingkungan (Cases On Environmental Law)*, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda
- Rido, Ali, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung
- Siahaan, N.H.T, 1987 *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta
- Salim, Emil, 1983, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta
- Sudarto, 1976, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, FH Undip, Semarang
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Suparni, Ninik, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Pengegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudjana, Eggi, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1982, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta
- , 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Press, Jakarta
- , 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumantoro, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Susanto, I.S, 1995, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang
- , 1994, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orba*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang

- Soedjono, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung
- , 1994, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Mandar Maju, Bandung
- Sahetapy, J.E, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung
- Schaffmeister, 1994, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , *et al*, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Suharto, Rahmat Bowo, 2001, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1995, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung
- Santosa, Mas Achmad, 1997, *HAM dan Lingkungan Hidup*, Makalah Seminar Tentang Lingkungan Hidup dan HAM, FH Undip, Semarang
- Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wuryan, H. Hadi, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, IKIP, Semarang
- Zen, M.T, 1981, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Gramedia, Jakarta
- Departemen Kehakiman RI, 1985, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, BPHN
- , 1986, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung

Ninth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders (Document No. A/CONF.169/L.3); Cairo, Egypt, 28 April-8 May 1995

Harian Wawasan terbitan Selasa, 28 Agustus 2001

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rancangan Undang-undang dan Risalah

Keterangan Pemerintah Dihadapan Sidang Paripurna DPR-RI Mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan Rancangan Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI

Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, Rancangan Undang-undang RI tentang KUHP